

**KONDISI SOSIAL EKONOMI  
MASYARAKAT DALAM  
KONTEKS BENCANA ALAM  
DI KOTA BENGKULU**



**KONDISI SOSIAL EKONOMI  
MASYARAKAT DALAM  
KONTEKS BENCANA ALAM  
DI KOTA BENGKULU**

**HANING ROMDIATI  
TITIK HANDAYANI  
MITA NOVERIA**



**PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
2008**



© 2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)  
Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI bekerja sama dengan COMPRESS\*

Katalog dalam Terbitan

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Konteks Bencana Alam di  
Kota Bengkulu/Haning Romdiati, Titik Handayani, Mita Noveria –  
Jakarta: LIPI Press, 2008.

xv + 125 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-294-1

1. Bencana Alam    2. Kondisi Sosial Ekonomi    3. Kota  
Bengkulu

303.485

Layout isi : Sutarno  
Desain cover/Perwajahan : Puji Hartana

**Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi**



\* Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI  
Jl. Pasir Putih No. 1, Ancol Timur,  
Jakarta 11048  
Telp. : (021) 682287, 6452425, 683850  
Fax. : (021) 681948, 682287  
*E-mail* : [ppolipi@jakarta.wasantara.net.id](mailto:ppolipi@jakarta.wasantara.net.id)

## ABSTRAK

**K**ondisi geografis dan geologi Kota Bengkulu rentan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Keadaan ini diperparah oleh wilayah pesisir selatan Kota Bengkulu yang telah mengalami degradasi lingkungan, sehingga menjadi daerah yang relatif terbuka dan sangat rawan terhadap ancaman gelombang pasang dan tsunami. Dari aspek kependudukan dan ekonomi, Kota Bengkulu juga rentan, diindikasikan oleh laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi, serta sebagian penduduknya masih hidup dalam kondisi miskin.

Tingkat kerentanan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap risiko bencana. Penelitian 'Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Konteks Bencana Alam' yang dilakukan di Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi kerentanan kependudukan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kelurahan ini memiliki tiga jenis kerentanan, yaitu kerentanan fisik (kondisi struktur bangunan perumahan penduduk yang secara teknis kurang memenuhi standar konstruksi), kerentanan kependudukan (tingkat kepadatan penduduk tinggi), dan kerentanan ekonomi (kemiskinan pada kebanyakan rumah tangga).

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, diketahui tingkat kerentanan sosial ekonomi rumah tangga di lokasi penelitian termasuk dalam kondisi rentan dengan nilai indeks sebesar 3,8. Faktor ekonomi dan kependudukan mempengaruhi kondisi kerentanan tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tanah Patah belum baik. Kira-kira sepertiga rumah tangga mempunyai penghasilan <Rp 600 ribu/bulan yang umumnya diperoleh dari pekerjaan pada sub-sektor perdagangan dengan skala usaha sangat kecil (pedagang kaki lima dan pedagang keliling), dan sektor bangunan dengan jenis pekerjaan sebagai buruh/kernet. Selain rentan ekonomi, sebagian

rumah tangga juga tergolong hampir rentan dilihat dari aspek kependudukan. Kelompok rentan adalah penduduk berumur 0-4 tahun dan 65 tahun ke atas yang mencapai kira-kira 18 persen. Kelompok rentan lainnya adalah wanita hamil, wanita dengan bayi, dan penyandang cacat atau sakit yang memerlukan pertolongan khusus jika terjadi bencana. Sedangkan aspek sosial kemasyarakatan tergolong cukup baik. Meskipun tinggal di wilayah perkotaan, mereka masih memiliki kebiasaan untuk saling tolong menolong dalam menghadapi musibah/kesulitan maupun kegiatan kemasyarakatan lain. Keberadaan tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama) sering menjadi tempat tujuan warga untuk membantu mengatasi persoalan keseharian dan memperkuat modal sosial. Dengan kondisi kerentanan sosial-ekonomi tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pengurangan resiko bencana antara lain melalui upaya pemberdayaan rumah tangga lemah ekonomi, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil, peningkatan ketrampilan dan memperluas akses permodalan, sehingga dapat mengurangi kerentanan ekonomi. Di sisi lain, mengoptimalkan modal sosial di tingkat masyarakat merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pengelolaan bencana yang mengacu pada pengurangan risiko.

## KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap paling rentan terhadap berbagai bencana alam. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah mengalami berbagai bencana alam yang semakin meningkat frekuensi, intensitas maupun dampak kerugian yang ditimbulkan, terutama banyaknya korban jiwa akibat gempa bumi dan tsunami. Selain faktor kekuatan alam, salah satu faktor yang dominan dalam proses bencana alam terutama di negara berkembang adalah kerentanan manusia yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga terbatas kemampuannya dalam mengantisipasi dan/atau menanggulangi bencana alam.

Selama ini penanganan bencana di Indonesia cenderung berfokus pada penanganan pada saat dan pasca bencana yang berorientasi pada pemberian bantuan (*relief*) dan kedaruratan (*emergency*). Dalam perkembangannya, diperlukan penanganan bencana yang lebih berorientasi pada pengurangan risiko bencana dengan cara mengintegrasikan upaya penanganan bencana dengan program pembangunan. Upaya ini memerlukan pemahaman tentang kondisi kerentanan sosial ekonomi masyarakat, terutama di berbagai daerah rawan bencana. Pemahaman tentang tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks bencana alam, dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan pelaksanaan berbagai aksi yang dapat memperkecil risiko bencana alam. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga lebih siap dan lebih berkemampuan dalam mengantisipasi bencana.

Dalam rangka mengantisipasi dan pengurangan risiko bencana alam terutama gempa dan tsunami, pada tahun 2007 LIPI

melakukan serangkaian penelitian tentang kerentanan fisik maupun sosial, terutama di beberapa daerah rawan bencana. Penelitian dengan judul "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Konteks Bencana Alam" yang dimaksudkan terutama untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial ekonomi, dilakukan oleh PPK-LIPI dengan bantuan pewawancara setempat. Penelitian mengambil sampel di lima daerah rawan bencana, yaitu empat daerah pedesaan dan satu daerah perkotaan. Kelima daerah kajian tersebut adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sikka, dan Kota Bengkulu.

Proses kegiatan penelitian sampai selesainya laporan hasil penelitian ini telah melibatkan banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PPK-LIPI atas bantuan dan keterlibatannya secara penuh dalam proses penelitian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan terutama kepada pemerintah daerah beserta segenap jajarannya sampai ke lokasi kajian, yang telah banyak membantu proses penelitian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para *stakeholder* yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melengkapi penelitian.

Akhirnya, penghargaan yang tulus dan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para peneliti dan staf penunjang, teknisi dan administrasi, yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi sejak awal sampai akhir penulisan. Proses pembelajaran sebelumnya dan kerja keras tim peneliti beserta semua pendukungnya, berhasil menyelesaikan laporan penelitian lima daerah tersebut. Kami menyadari, laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan mutu penulisan laporan.

Jakarta, Agustus 2008

Kepala Pusat Penelitian Oceanografi –LIPI

Dr. Suharsono



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xi
<b>DAFTA PETA</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Metodologi .....	5
1.3.1. Ruang Lingkup .....	5
1.3.2. Metode .....	10
1.4. Organisasi Penulisan .....	13
<b>BAB II KONDISI FISIK DAN AKSESIBILITAS</b> .....	15
2.1. Letak dan Tipologi Wilayah.....	15
2.2. Potensi Wilayah.....	18
2.3. Sarana dan Prasarana .....	21
<b>BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN</b> .....	23
3.1. Kondisi Kependudukan Kota Bengkulu .....	23
3.2. Karakteristik Rumah Tangga.....	41
3.3. Kelompok Penduduk Rentan .....	50
<b>BAB IV KONDISI EKONOMI</b> .....	55
4.1. Kondisi Ekonomi Kota Bengkulu.....	55
4.1.1. Struktur Perekonomian .....	56
4.1.2. Pendapatan Asli Daerah.....	59
4.1.3. Kondisi Kemiskinan .....	60
4.2. Ekonomi Rumah Tangga.....	63

4.2.1. Mata Pencaharian.....	64
4.2.2. Sumber Penghasilan Rumah Tangga ..	70
4.2.3. Kesejahteraan.....	79
4.3. Kelompok Rentan.....	88
<b>BAB V KONDISI SOSIAL-KEMASYARAKATAN .....</b>	<b>93</b>
5.1. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Bengkulu...	93
5.2. Kondisi Sosial-Kemasyarakatan Lokasi Penelitian .....	98
5.2.1. Hubungan Kemasyarakatan .....	98
5.2.2. Keberadaan dan Peran Tokoh Masyarakat/Pimpinan.....	103
5.2.3. Keberadaan dan Peran Kelembagaan Masyarakat .....	105
5.3. Modal Sosial.....	109
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
6.1. Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	113
6.2. Kesimpulan dan Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Penduduk Kota Bengkulu Menurut Jumlah Rumah Tangga, Rata-rata Anggota Rumah Tangga dan Kecamatan, 2005 .....	23
Tabel 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kota Bengkulu, 2005 (%) .....	26
Tabel 3.3. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%) .....	29
Tabel 3.4. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%) .....	30
Tabel 3.5. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%) .....	31
Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Jumlah Kepala Keluarga, Kecamatan Ratu Agung, 2007 .....	33
Tabel 3.7. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%) .....	34
Tabel 3.8. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%) .....	38
Tabel 4.1. Struktur Perekonomian Kota Bengkulu, 2000-2005 (%) .....	57
Tabel 4.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, 2006 ...	60

Tabel 4.3. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kesiambungan Sumber Penghasilan yang Dilihat dari Lapangan Pekerjaan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%) .....	75
Tabel 4.4. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kecukupan Penghasilan untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Sepanjang Tahun dan Kesiambungan Sumber Penghasilan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%) .....	79
Tabel 4.5. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Rata-rata Penghasilan per Bulan dan Jumlah ART yang Bekerja di Sektor Informal, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%) .....	81
Tabel 4.6. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Rata-rata Penghasilan per Bulan dan Lapangan Pekerjaan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%) .....	82
Tabel 4.7. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Penerima Program BLT dan Rata-rata Penghasilan per Bulan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%) .....	85
Tabel 4.8. Karakteristik Ekonomi Kelompok Rentan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (n=69) .	89

# DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 3.1. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%) .....	32
Diagram 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%) .....	35
Diagram 3.3. Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut Pekerjaan, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%) .....	37
Diagram 3.4. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%) .....	39
Diagram 3.5. Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut Pekerjaan, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%) .....	40
Diagram 3.6. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	42
Diagram 3.7. Distribusi Rumah Tangga Responden yang Mempunyai ART Usia Balita dan Lansia Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	45
Diagram 3.8. Distribusi Rumah Tangga Responden yang Mempunyai ART Wanita Hamil, Wanita dengan Anak Usia < 1 Tahun, dan Orang Sakit Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	46
Diagram 3.9. Distribusi Rumah Tangga Responden Tanpa ART yang Menguasai Keterampilan yang Berkaitan dengan Bencana Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 (%) ....	47

Diagram 3.10. Tingkat Kerentanan Kependudukan Rumah Tangga Responden Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 .....	52
Diagram 4.1. PDRB/kapita Kota Bengkulu 2000 – 2005 .....	59
Diagram 4.2. Distribusi Rumah Tangga Responden Berdasarkan Status Anggota Rumah Tangga yang Bekerja (%) .....	65
Diagram 4.3. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Jumlah ART yang Bekerja di Sektor Informal (%) .....	68
Diagram 4.4. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Status KRT dan/atau ART yang Bekerja Di Sektor Informal (%) .....	69
Diagram 4.5. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Lapangan Pekerjaan (%) .....	72
Diagram 4.6. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Penghasilan (%) .....	80
Diagram 5.1. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kebiasaan Tolong-Menolong untuk Hajatan Warga, Keperluan Umum, dan Dusun Tetangga, Apabila Terjadi Musibah, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	100
Diagram 5.2. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kebiasaan Tolong Menolong untuk Keperluan Umum Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	101
Diagram 5.3. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kebiasaan Tolong Menolong dengan Dusun Tetangga Apabila Terjadi Musibah Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	101
Diagram 5.4. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pendapat Tentang Sikap Masyarakat Bila	

	Menerima Pendatang dari Luar Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	103
Diagram 5.5.	Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pendapat Tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh Masyarakat, LSM, dan Pemerintah Kelurahan, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	104
Diagram 5.6.	Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pendapat Tentang Keberadaan Kelembagaan dan Partisipasi ART, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	106
Diagram 5.7.	Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Partisipasi ART dalam Kegiatan Kelembagaan dan Perbedaan Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	107
Diagram 5.8.	Distribusi Responden yang Menyatakan Terdapat Kegiatan Kebencanaan Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%) .....	109
Diagram 6.1.	Tingkat Kerentanan Sosial-Ekonomi, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, 2007	114
Diagram 6.2.	Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Menurut Kedekatan dengan Pantai, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, 2007 .....	118





# DAFTAR PETA

	Halaman
Peta 2.1. Peta – Zona Waspada Tsunami, Kota Bengkulu..	18
Peta 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Bengkulu, 2003 .....	24
Peta 3.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Bengkulu, 2003 .....	25



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan potensi tingkat kegempaan yang tinggi karena negara ini terletak di pertemuan tiga lempeng dunia yang aktif, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang apabila bertumbukan akan menghasilkan gempa tektonik. Berdasarkan catatan sejarah gempa bumi, Indonesia merupakan langganan gempa dan tsunami. Pasca meletusnya Gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami besar pada 1883, kira-kira telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia dalam kurun waktu 1990-1996 (Pusat Data dan Analisa *Tempo*, 2006). Sejak 1997 telah terjadi peningkatan eskalasi bencana gempa bumi dalam frekuensi, skala maupun dampak. Sebagai contoh, sebelum terjadi gempa dan tsunami besar di Aceh dan sebagian Sumatera Utara pada tahun 2004, Provinsi Bengkulu juga mengalami gempa bumi dalam skala besar yang terjadi pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2005 terjadi gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias, serta di Provinsi DIY dan Jawa Tengah pada akhir Mei 2006, dan juga di Pangandaran, Jawa Barat. Di luar Jawa dan Sumatera, gempa bumi juga sering terjadi di Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang dialami berbagai wilayah di Indonesia dan berulang di beberapa daerah, menggambarkan penanganan bencana alam selama ini yang cenderung dikelola dengan pendekatan “akibat”, artinya melakukan berbagai tindakan gawat darurat, misalnya pencarian korban pengungsian, pemberian bantuan darurat, dan rehabilitasi-konstruksi. Upaya seperti ini tampaknya tidak menyelesaikan masalah karena semua pihak, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, cenderung melupakan peristiwa bencana alam yang telah lalu. Apabila terjadi bencana alam lagi, semua pihak tidak siap dan

kembali panik sebagaimana yang telah dialami pada bencana sebelumnya. Penanganan bencana alam dengan pendekatan “sebab” atau upaya *preventif* yang sudah mulai dilakukan di Indonesia, perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Pendekatan “sebab” merupakan manajemen bencana yang berfokus pada kegiatan mengurangi atau menghindari ancaman bahaya (*hazard*) yang berpotensi menimbulkan bencana, dan juga mengurangi kerentanan (*vulnerability*)<sup>1</sup> masyarakat. Penanganan bencana dalam upaya preventif, dapat meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan bencana alam karena gempa bumi dan tsunami, serta jenis bencana alam lainnya yang merupakan akibat kolektif atas komponen bahaya/ancaman (*hazard*) di satu pihak dan kerentanan (*vulnerability*) komunitas di pihak lain. Artinya, gempa bumi dan tsunami, juga jenis bencana alam lainnya, merupakan ancaman yang tidak selalu menjadi bencana. Bahaya akan menjadi bencana apabila komunitas berada dalam kondisi rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa permasalahan bencana di Indonesia pada umumnya menjadi rumit karena terjadi di daerah yang kondisi masyarakatnya rentan dan lokasi bencana sulit dijangkau (Sobirin, 2007). Sadisun (2007) juga mengemukakan bahwa kejadian-kejadian bencana alam yang telah menimbulkan banyak kerugian dan penderitaan cukup berat adalah akibat dari perpaduan antara bahaya alam dan kompleksitas permasalahan kerentanan. Dengan kata lain, risiko bencana akan muncul ketika ada bahaya yang kemudian berinteraksi dengan kerentanan (fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan).

---

<sup>1</sup> United Nations/ISDR (2004, seperti disitir dalam “Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015”, 2005) mendefinisikan kerentanan sebagai suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bisa meningkatkan rawannya suatu komunitas terhadap dampak bahaya. Sedangkan Bakornas (2006) mengartikan kerentanan sebagai serangkaian kondisi dan/atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana alam telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan bencana alam. Sebelum Undang-Undang Penanganan Bencana disahkan pada Mei 2007, pemerintah telah melakukan perubahan paradigma penanganan bencana dari paradigma yang bersifat bantuan (*relief*) dan kedaruratan (*emergency*) ke paradigma yang bersifat mitigasi<sup>2</sup>/preventif, yang sekaligus juga paradigma pembangunan. Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perhatian global tentang penanganan bencana dengan cara mengelola dan meredam risiko<sup>3</sup>, Pemerintah Indonesia juga mengarahkan kebijakan penanganan bencana melalui upaya pengurangan risiko (lihat Bakornas, go.id)<sup>4</sup>. Paradigma pengurangan risiko memandang masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan sekaligus sasaran utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sebagai subjek penanganan bencana, masyarakat dilibatkan mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana, dan juga bencana gempa bumi dan tsunami. Masyarakat diberi pengetahuan mengenali ancaman<sup>5</sup> yang ada di lingkungannya, bagaimana mengurangi ancaman, dan mengenali kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta bagaimana

---

<sup>2</sup> Hakekat dari Mitigasi Bencana adalah menekan hingga seminimal mungkin rasio risiko bencana. Risiko bencana memiliki 3 variabel, yaitu aspek jenis bahaya, aspek kerentanan, dan aspek ketidakmampuan.

<sup>3</sup> Lihat "Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015" ([www.mpbj.org/pustaka/files/file4416c8efc617e.pdf](http://www.mpbj.org/pustaka/files/file4416c8efc617e.pdf))

<sup>4</sup> Bakornas (2005) mengembangkan konsep penanganan bencana dari paradigma yang pada awalnya hanya berfokus pada penanganan yang bersifat bantuan (*relief*) dan kedaruratan (*emergency*), kemudian berubah menjadi paradigma mitigasi yang tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah rawan bencana dan mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan juga melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural dan non-struktural, misalnya penataan ruang dan *building code*. Sebelum penanganan bencana dengan paradigma pengurangan risiko, pemerintah juga telah melakukan penanganan bencana dengan paradigma pembangunan, yaitu mengintegrasikan upaya penanganan bencana dengan program pembangunan, seperti upaya penguatan ekonomi, penerapan teknologi, dan pengentasan kemiskinan.

<sup>5</sup> Dalam studi ini lebih dikhususkan pada ancaman terhadap gempa bumi dan tsunami.

meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi setiap ancaman. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis tidak lagi hanya membutuhkan pemahaman dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dari lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Menurut Sobirin (2007), melibatkan masyarakat dalam pengelolaan/manajemen bencana dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, juga upaya mengurangi kerentanan masyarakat yang mencakup kerentanan fisik dan kerentanan sosial-kemasyarakatan (sosial-kependudukan dan ekonomi). Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi kerentanan fisik misalnya penyuluhan atau percontohan bentuk/model bangunan yang memenuhi persyaratan ketahanan terhadap gempa bumi, dengan cara melatih para pemuda setempat agar memiliki kemampuan memberikan bantuan dalam tahap tanggap darurat. Upaya untuk mengurangi kerentanan sosial-kemasyarakatan, lebih bersifat mengintegrasikan penanganan bencana dengan program pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, penerapan teknologi, dan perkuatan kelembagaan masyarakat. Upaya ini bertujuan mengubah keadaan dari situasi kerentanan tinggi dengan kapasitas rendah ke arah kerentanan dikurangi dan kapasitas ditingkatkan. Hal ini akan dapat meminimalkan terjadinya korban dan melakukan upaya pemulihan yang lebih mengutamakan kapasitas lokal.

Upaya penanganan bencana yang mengacu pada paradigma pengurangan risiko bencana alam perlu dibantu melalui upaya meminimalisasi kerentanan masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan survei sosial-ekonomi rumah tangga di daerah-daerah yang menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Data survei yang menghasilkan angka/tingkat kerentanan rumah tangga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan perencanaan dan implementasi mitigasi untuk menekan seminimal mungkin risiko bencana.

## 1.2. TUJUAN

Studi “Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga” bertujuan untuk mengkaji dan memahami kerentanan sosial rumah tangga, yang dilihat dari kerentanan kependudukan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Tujuan penelitian secara lebih rinci adalah

1. mendiskripsikan kondisi kependudukan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan;
2. menghitung dan menganalisis tingkat kerentanan sosial-ekonomi;

## 1.3. METODOLOGI

### 1.3.1. Ruang Lingkup

#### Lokasi

Kajian “Kondisi Sosial-Ekonomi Rumah Tangga” ini dilakukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Bengkulu, yang merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Kota Bengkulu rentan terhadap bahaya alam, gempa bumi, tanah retak dan amblas, abrasi, tanah longsor, banjir dan badai laut (Hidayati dkk, 2006). Kota Bengkulu juga berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga rawan terhadap bencana tsunami sebagai dampak sekunder dari gempa bumi yang berpusat di dasar laut. Keadaan ini diperparah oleh wilayah pesisir selatan Kota Bengkulu yang telah mengalami degradasi lingkungan, sehingga menjadi daerah yang relatif terbuka dan sangat rawan terhadap ancaman gelombang pasang dan tsunami. Menurut WALHI Bengkulu (2006), kerusakan kawasan pantai Kota Bengkulu lebih disebabkan aktivitas manusia daripada faktor alam. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan kerentanan kawasan pantai terhadap gelombang pasang dan tsunami, antara lain penambangan pasir di Teluk Sepang, pembuangan limbah pengerukan Pelabuhan Pulau Baai, penebangan

hutan pantai dan bakau untuk pembuatan jalan dari Pulau Baai, Pantai Panjang, hingga Tapak Padri, dan pengambilan pasir di sekitar Sungai Hitam. Berbagai aktivitas manusia meningkatkan risiko bencana alam di Kota Bengkulu. Kondisi geografis dan geologi yang rentan, serta faktor kerentanan sosial-demografi dan ekonomi, juga menambah tingkat risiko terhadap ancaman bencana di Kota Bengkulu. Sebagaimana ditemukan di daerah perkotaan lainnya, Kota Bengkulu memiliki laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi, yaitu 3,6 persen selama periode 1990-2005, dengan tingkat kepadatan penduduk yang juga tinggi, yaitu 2000 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2005. Sedangkan kerentanan ekonomi terlihat dari cukup tingginya persentase keluarga miskin versi BKKBN, yaitu 29,6 persen pada tahun 2006. Keluarga miskin yang rentan ekonomi, cenderung berisiko lebih tinggi terhadap ancaman bencana dibandingkan dengan penduduk tidak miskin.

Survei “Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga” dilakukan di Kelurahan Tanah Patah, yang komunitasnya memiliki tiga jenis kerentanan, yaitu kerentanan fisik, kependudukan, dan ekonomi. Kerentanan fisik terlihat dari kondisi struktur bangunan perumahan penduduk yang secara teknis kurang memenuhi standar konstruksi. Kerentanan sosial-demografi tercermin antara lain dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu 2.289 jiwa/km<sup>2</sup> karena migrasi masuk ke wilayah kelurahan ini, dengan pelaku migrasi yang umumnya bekerja di sektor bangunan dan perdagangan skala kecil dan sebagian besar tinggal di wilayah pesisir. Sedangkan kerentanan ekonomi, yang berupa kemiskinan, juga ditemukan pada kebanyakan rumah tangga. Sebagian wilayah administrasi Kelurahan Tanah Patah juga mempunyai daerah terbuka yang merupakan bagian wilayah Pantai Panjang, sehingga berisiko tinggi terhadap bencana tsunami dan gelombang pasang.

## **Substansi**

Terdapat banyak variabel yang dapat menggambarkan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga/masyarakat dalam konteksnya dengan keadaan kerentanan suatu komunitas. Berdasarkan studi



tentang dimensi sosial-ekonomi yang berkaitan dengan risiko gempa bumi di daerah perkotaan, Kalaycioglu dkk (2006) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan, kemiskinan, pendidikan, dan umur, merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kesadaran masyarakat akan risiko bencana. Hasil studi juga menemukan bahwa variabel hubungan sosial (*social networks*) juga merupakan indikator penting dalam kaitannya dengan strategi menghadapi ancaman maupun dampak bencana. Literatur lain menyebutkan bahwa kerentanan berhubungan dengan rendahnya sumber pendapatan, kemiskinan, illiterasi, dan tingginya tingkat malnutrisi gizi. Di samping itu, kerentanan juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya akses terhadap 'pasar', jaringan transportasi, dan pelayanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam kajian ini, kerentanan sosial-ekonomi disajikan dalam diagram kerentanan kependudukan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan.

Kerentanan kependudukan menggambarkan kerapuhan penduduk dalam melakukan aktivitas, yang dalam penelitian ini mengacu pada aktivitas penyelamatan diri pada saat kejadian bencana. Bakornas PB (2007) menyebutkan bahwa indikator kerentanan kependudukan meliputi kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk usia tua dan balita, serta persentase penduduk perempuan (<http://72.14.235.104/search?q=cache:inydcdTCZFEJ:www.bakornaspb.go.id/new/id/docu>). Mengacu pada konsep tersebut, pengukuran kerentanan kependudukan dalam penelitian ini menggunakan indikator umur penduduk. Kondisi kerentanan kependudukan adalah proporsi penduduk usia 0-4 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap jumlah seluruh penduduk yang menjadi responden. Penduduk balita (0-4 tahun) dan lanjut usia (65 tahun ke atas) dikategorikan sebagai penduduk rentan karena kelompok penduduk ini memerlukan pertolongan pihak lain untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana.

Pengertian umum kerentanan ekonomi adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memproteksi diri dari ancaman bahaya yang datangnya tidak terduga/mendadak, seperti bencana

alam. Terdapat beberapa pendapat tentang kerentanan ekonomi, dan bahkan pengembangan konsep, determinan, dan prosedur pengukuran kerentanan ekonomi, yang hingga kini terus dilakukan (Cordina, 2004). Di Indonesia, pengertian kerentanan ekonomi pada umumnya mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Bakornas PB (2005), yaitu kemampuan ekonomi individu/masyarakat terkait dengan ancaman bahaya. Dengan kata lain, kerentanan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan ekonomi individu/masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya. Bakornas (2005) lebih lanjut mengemukakan bahwa beberapa indikator dapat menggambarkan kerentanan ekonomi, antara lain proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor rentan, yaitu sektor yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan persentase rumah tangga miskin. Merujuk pada dua indikator ini, rumah tangga/masyarakat yangarganya banyak bekerja di sektor rentan dan hidup miskin, maka rumah tangga/masyarakat tersebut rentan terhadap ancaman bahaya. Rumah tangga/masyarakat tersebut tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan/mitigasi bencana. Dalam penelitian ini, kerentanan ekonomi dilihat dari rata-rata penghasilan/pendapatan rumah tangga, karena indikator ini paling sensitif dalam menggambarkan kerentanan ekonomi. Rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi adalah rumah tangga yang tidak rentan ekonomi, karena rumah tangga tersebut mempunyai kemampuan ekonomi untuk memproteksi anggota rumah tangganya dari ancaman bahaya, misalnya dengan membangun rumah tinggal yang tahan gempa, dan mempunyai akses yang luas terhadap investasi yang dapat digunakan sewaktu-waktu, dan juga dalam keadaan darurat, antara lain waktu menghadapi bencana. Keadaan sebaliknya terjadi pada rumah tangga yang rentan ekonomi atau berpendapatan rendah, yang umumnya mempunyai keterbatasan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan yang sangat mendasar yaitu pangan, sehingga mereka juga tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan upaya mitigasi bencana. Penentuan rumah tangga rentan didasarkan pada nilai pendapatan yang dipakai untuk menentukan rumah tangga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). yang ditujukan untuk rumah tangga miskin. Mengacu pada nilai ini, rumah

tangga rentan ekonomi adalah rumah tangga yang mempunyai rata-rata penghasilan sebesar < 600.000 rupiah per bulan.

Indikator sosial kemasyarakatan merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam mengkaji kerentanan dan kapasitas masyarakat yang berkaitan dengan bencana alam. Ensiklopedia *Wikipedia* mengemukakan bahwa kerentanan sosial merupakan salah satu dimensi kerentanan karena berbagai tekanan dan adanya sesuatu termasuk bencana alam. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kerentanan sosial merujuk pada ketidakmampuan penduduk, organisasi, dan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif dari berbagai ancaman bahaya. Dengan demikian, kerentanan sosial adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan komunitas untuk mempersiapkan dan mampu melakukan proses pemulihan dari kejadian bencana. Sebaliknya, masyarakat tidak berada dalam kondisi rentan, maka mempunyai potensi dan kapasitas. Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai komunitas disebut modal sosial. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum dalam sebuah masyarakat atau dalam berbagai bagian paling kecil di masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan, dan bisa menjadi kebiasaan, dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok masyarakat yang besar di tingkat negara. ([http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_Vulnerability](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Vulnerability)). Kerentanan sosial kemasyarakatan dalam kajian ini diukur berdasarkan keberadaan kelembagaan, seperti lembaga keagamaan, kesenian/budaya, ekonomi dan keamanan lingkungan, serta keterlibatan anggota rumah tangga dalam kelembagaan dan juga keterlibatan anggota rumah tangga dalam kegiatan tolong-menolong apabila terjadi musibah..Semakin tinggi keterlibatan anggota rumah tangga dalam kelembagaan dan kegiatan tolong-menolong, maka tingkat kerentanan rumah tangga/ masyarakat akan rendah. Masyarakat dengan tingkat kerentanan rendah dan kapasitas modal sosial yang tinggi, akan dapat mengurangi risiko apabila terjadi bencana. Kapasitas di tingkat rumah tangga dan masyarakat sangat penting untuk menanggulangi bencana. Berdasarkan pengalaman selama ini, penanganan awal tiga

hari pertama pada saat terjadi bencana, sangat tergantung pada peran masyarakat sekitar. Dengan demikian, peningkatan kapasitas rumah tangga dan masyarakat sangat diperlukan.

### 1.3.2. Metode

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang bersifat kuantitatif, atau biasa disebut data kuantitatif. Jenis data ini diperoleh dengan cara melakukan survei menggunakan daftar pertanyaan berstruktur yang dikemas dalam sebuah kuesioner. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi terfokus. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data di tingkat masyarakat dan data yang tersedia di berbagai instansi/lembaga, hasil penelitian/kajian sebelumnya, kebijakan/ program terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami, dan berbagai bahan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan *desk review*.

Data kuantitatif diperoleh dari 200 rumah tangga yang dipilih secara proporsional dengan perbandingan 3:2:1, yang berturut-turut untuk wilayah dekat, sedang, dan jauh dari pantai. Penentuan ini didasarkan pada kemungkinan tingkat risiko yang akan dihadapi jika terjadi gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak berstrata (*stratified random sampling*). Responden adalah kepala rumah tangga, tetapi jika tidak ada di tempat, maka diganti pasangannya (istri/suami) atau anggota rumah tangga dewasa yang mengetahui kondisi rumah tangga bersangkutan. Data yang dikumpulkan dari kegiatan survei meliputi tiga aspek penting sesuai dengan fokus kajian. *Pertama*, data karakteristik KRT, yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kegiatan ekonomi, karakteristik sosial-demografi ART yang mencakup jumlah, komposisi umur, dan jumlah ibu hamil, ibu

mempunyai bayi, dan ART cacat permanen, kemampuan membaca huruf latin, dan keterampilan yang berkaitan dengan pertolongan pertama jika terjadi bencana. *Kedua*, keadaan ekonomi yaitu pengangguran, pekerjaan atau lebih khusus mereka yang bekerja di sektor informal, lokasi tempat kerja yang dilihat jaraknya dari pantai, penghasilan, kesinambungan serta kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar sepanjang tahun, dan pemilikan serta kondisi rumah tinggal. *Ketiga*, keadaan sosial-kemasyarakatan yang mencakup keikutsertaan dalam kelembagaan sosial-kemasyarakatan dan ekonomi, peran kelembagaan terhadap penanganan bencana, kerjasama masyarakat dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh formal dan informal. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan oleh enam pewawancara (*interviewer*) yang telah diberi pelatihan agar memiliki pemahaman yang sama tentang substansi pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Jawaban semua pertanyaan yang dikumpulkan oleh pewawancara kemudian diperiksa oleh peneliti secara langsung di lokasi survei.

Peneliti mengumpulkan data/informasi kualitatif menggunakan beberapa cara, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Pengumpulan informasi kualitatif dengan cara wawancara mendalam, dilakukan pada individu/perorangan dan unsur lembaga pemerintah maupun non-pemerintah). Penduduk setempat dan tokoh informan adalah perorangan/individu yang menjadi informan dari unsur masyarakat. Pihak pemerintah yang menjadi narasumber adalah unsur pemerintahan dari kelurahan (lurah dan staf), kecamatan (camat dan staf), wilayah kota (antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan – Pemkot Bengkulu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan Satpol PP), Provinsi (Dinas Sosial), TNI, dan Satlak. Di luar unsur Pemerintah Kota Bengkulu, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap LSM, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi, yang mengetahui dan/atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan bencana. Pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok terfokus dilakukan terhadap beberapa LSM di tingkat Kota/Provinsi dan unsur masyarakat di lokasi. Jenis data

kualitatif yang diperoleh dari berbagai cara pendekatan kualitatif tersebut antara lain kegiatan penanganan bencana gempa bumi yang pernah dilakukan di Kota Bengkulu.

Data yang dikumpulkan melalui pendekatan kuantitatif digunakan untuk memahami kondisi kependudukan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan dalam konteks bencana alam. Beberapa indikator kependudukan, ekonomi, dan sosial digunakan untuk menghitung indeks kerentanan sosial-ekonomi.

Indeks merupakan angka perbandingan antara satu bilangan dan bilangan lain yang berisi informasi tentang karakteristik tertentu pada waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks purata, dengan rumus sebagai berikut<sup>6</sup>

$$\frac{\sum bi * fi}{\sum fi}$$

Di mana:

bi = bobot bagi pilihan jawaban ke-i

fi = frekuensi yang memilih jawaban ke-i

Indeks purata digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan masyarakat menurut parameter kependudukan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Penilaian kerentanan masyarakat secara umum dilakukan dengan menggabungkan indeks masing-masing parameter dengan rumus sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Lihat Al-Hammad, et. al. (1996) dalam <http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2004/1JSB/Part2/RAFSYAMIR@AMIRBA000005D03T4.doc> atau <http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2004/1JSB/Part1/EMELIANURHAYATIAA990107D03TT3.doc>

$$\frac{5 * IDDK + 2 * IEK + 3 * ISOS}{10}$$

Di mana:

- IDDK = Indeks Kependudukan  
IEK = Indeks Ekonomi  
ISOS = Indeks Sosial Kemasyarakatan

Tingkat kerentanan masyarakat dapat dibedakan menjadi lima tingkatan, sebagai berikut

- Sangat tidak rentan dengan nilai indeks : 0,00 - 0,99
- Tidak rentan dengan nilai indeks : 1,00 - 1,99
- Hampir rentan dengan nilai indeks : 2,00 - 2,99
- Rentan dengan nilai indeks : 3,00 - 3,99
- Sangat rentan dengan nilai indeks : 4,00 - 5,00

Angka indeks dipahami menggunakan informasi/data yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, karena dua jenis data tersebut dapat saling melengkapi untuk kepentingan analisis fenomena yang diteliti. Kondisi kependudukan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan juga dipahami berdasarkan pada data kuantitatif dan kualitatif.

#### 1.4. ORGANISASI PENULISAN

Tulisan ini diawali dengan Bab I (Pendahuluan) yang mencakup uraian tentang latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penulisan, serta metode penelitian. Kondisi fisik dan aksesibilitas yang berisi uraian tentang kondisi geografis dan lingkungan, potensi wilayah, dan sarana-prasarana terdapat di Bab II. Pembahasan tentang kondisi kependudukan di tingkat wilayah dan rumah tangga dikemukakan pada Bab III. Kondisi kependudukan di tingkat rumah tangga yang dibahas adalah karakteristik rumah tangga dan kelompok rentan. Pada Bab IV dibahas kondisi ekonomi Kota Bengkulu dan rumah tangga di lokasi penelitian. Struktur perekonomian, pendapatan

asli daerah, dan kemiskinan diuraikan untuk menggambarkan kondisi ekonomi wilayah, sedangkan kondisi ekonomi rumah tangga mencakup mata pencaharian, sumber penghasilan, dan tingkat kesejahteraan. Pada Bab IV dibahas kelompok rentan ekonomi. Bab V menganalisis kondisi sosial-kemasyarakatan, yang meliputi hubungan kemasyarakatan, kepercayaan, dan peran tokoh formal dan informal, keberadaan dan peran kelembagaan kemasyarakatan, serta modal sosial. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan sintesis bab-bab sebelumnya.



## **BAB II**

### **KONDISI FISIK DAN AKSESIBILITAS**

#### **2.1. LETAK DAN TIPOLOGI WILAYAH**

**K**ota Bengkulu secara historis merupakan wilayah langganan gempa bumi, terutama karena daerah ini merupakan bagian wilayah tiga lempeng bumi, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang aktif. Proses dinamika yang intensif tiga lempeng tersebut telah membentuk relief permukaan bumi yang bervariasi dan berpengaruh terhadap berbagai ancaman bencana alam lainnya, yaitu tsunami, gelombang pasang, dan banjir di daerah pantai, tanah longsor, dan amblas di daerah pegunungan yang lerengnya curam (Sadisun, 2007). Lebih dari itu, wilayah pesisir selatan Kota Bengkulu telah mengalami degradasi lingkungan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia, sehingga menjadi daerah yang relatif terbuka dan sangat rawan terhadap ancaman gelombang pasang dan tsunami, yang merupakan efek sekunder gempa bumi.

Mengacu pada beberapa parameter untuk melihat tingkat kerawanan gempa bumi, Kota Bengkulu termasuk daerah rawan bencana yang terbagi dalam tiga zona rawan bencana, yaitu zona A (lemah), zona B (sedang), dan zona C (kuat) (Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bengkulu, 2006). Zona A merupakan daerah yang rentan atau mudah terpengaruh gempa bumi akibat struktur batuan yang labil. Zona B merupakan daerah yang memiliki struktur batuan cukup kuat menahan guncangan gempa bumi. Sedangkan zona C merupakan zona yang kuat menahan guncangan gempa bumi, dan bangunan fisik di zona ini tidak terpengaruh adanya gempa.

Posisi geografis Kota Bengkulu adalah antara  $102^{\circ} 15' - 102^{\circ} 22' 30''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ} 44' 30'' - 3^{\circ} 58' 30''$  Lintang Selatan. Kota Bengkulu berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah

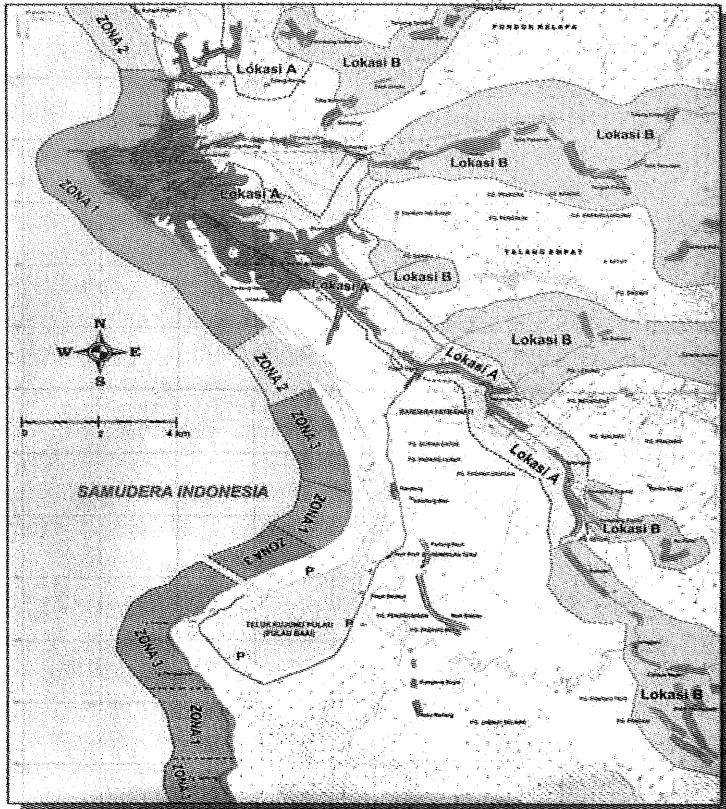
utara dan timur, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan bagian barat dengan Samudera Indonesia. Kota dengan luas wilayah 144,52 km<sup>2</sup> ini, terbagi dalam 8 kecamatan dan 67 kelurahan. Beberapa kecamatan berlokasi di pinggir pantai, antara lain Ratu Agung, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Kampung Melayu. Meskipun demikian, tidak semua kecamatan di pinggir pantai adalah daerah yang rawan tsunami.

Kondisi topografi (relief permukaan tanah) Kota Bengkulu adalah datar hingga berbukit-bukit. Terdapat dataran pantai, dan juga relief permukaan tanah di sebagian wilayah Kota Bengkulu berbukit-bukit dengan kemiringan landai. Di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil dengan relief-relief kecil (<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/bengkulu/bengkulu.pdf>. Profil Kabupaten/Kota: Kota Bengkulu). Ketinggian wilayah sangat bervariasi, mulai dari 0-5 meter, 5-20 meter, dan >20 meter dari permukaan laut. Pembagian berdasarkan wilayah ketinggian ini, sangat bermanfaat untuk menentukan lokasi-lokasi rawan bencana tsunami. Namun, tidak semua daerah yang berada dalam ketinggian paling rendah rentan terhadap bahaya tsunami. Berdasarkan "Peta Zona Waspada Tsunami" yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bengkulu (2006), sebagian wilayah pantai tidak rentan tsunami adalah kawasan hutan lindung dan Pulau Baai Ujung (Peta 2.1). Berdasarkan peta tersebut, wilayah pesisir Kecamatan Ratu Agung, Gading Cempaka, dan Teluk Segara, termasuk daerah rawan tsunami. Sebagian kecil wilayah Kecamatan Kampung Melayu dan Selebar merupakan daerah yang rawan tsunami. Sepanjang pantai Kota Bengkulu pada umumnya telah menjadi daerah terbuka sebagai akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Kegiatan penambangan pasir, penebangan hutan, perkembangan permukiman, dan kawasan wisata (juga pembangunan hotel), merupakan beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan kawasan sempadan pantai menjadi daerah yang terbuka. Laju degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pantai, meningkatkan risiko bahaya bencana alam, terutama gelombang pasang dan tsunami.

Pemanfaatan ruang di Kota Bengkulu meliputi lahan untuk bangunan, yaitu permukiman dan sarana-prasarana, perkantoran, lahan pertanian, antara lain sawah dan kebun, rawa/semak belukar, hutan, dan lainnya. Di antara berbagai pemanfaatan ruang tersebut, penggunaan lahan untuk permukiman menempati urutan teratas, yaitu 30 persen, kemudian semak belukar, 21,7 persen, dan rawa belukar seluas kira-kira 1.471,7 ha atau 10,18 persen, dan selebihnya tersebar dalam berbagai jenis pemanfaatan ruang (Bappeda Kota Bengkulu, 2005). Data tata guna lahan ini menggambarkan masih terdapat cukup banyak lahan kosong, berupa semak/rawa/ruang terbuka lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, tetapi perlu mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan kesesuaian lahan dalam kaitannya dengan ketahanan terhadap gempa bumi dan tingkat risiko terhadap tsunami.

Kota Bengkulu merupakan pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan sosial, serta jasa. Oleh karena itu, kawasan jasa dan perdagangan merupakan kawasan yang cukup luas. Kawasan perdagangan menyebar di seluruh wilayah kota, tetapi kawasan perdagangan terluas dengan aktivitas perdagangan yang tinggi, terdapat di pusat kota. Kawasan perkantoran, yang merupakan sektor jasa pemerintahan, juga terletak menyebar, meskipun sebagian lainnya ada yang mengelompok. Dikaitkan dengan klasifikasi zona rawan bencana, kawasan perdagangan dan perkantoran yang merupakan dua sektor perekonomian penting di Kota Bengkulu, yang kebanyakan sarana-prasarana, terletak di daerah yang tidak berisiko tinggi terhadap bencana tsunami. Namun, beberapa tahun belakangan ini justru sedang dibangun pusat perbelanjaan berskala besar di dekat Pantai Panjang, yang tentunya berisiko tinggi terhadap bencana tsunami. Berbagai langkah dan cara untuk upaya menyelamatkan diri jika terjadi bencana tsunami, perlu disiapkan di lokasi tersebut. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, yang berada di berbagai daerah yang memiliki ancaman bahaya tsunami.

**Peta 2.1 : Peta – Zona Waspada Tsunami, Kota Bengkulu**



Sumber: Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bengkulu, 2006.

## 2.2. POTENSI WILAYAH

Potensi wilayah yang dimaksud dalam tulisan ini mencakup sumberdaya alam darat dan laut, maupun sumberdaya ekonomi, antara lain potensi ekonomi di bidang perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata, yang sudah maupun belum dimanfaatkan. Deskripsi

potensi wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat berdampak terhadap ancaman bencana gempa bumi dan berbagai jenis bencana alam lainnya. Semakin besar potensi wilayah yang dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis, akan semakin besar pula ancaman bencana alam.

Sebagai Ibukota Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu mempunyai banyak peran, antara lain sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa di Provinsi Bengkulu. Potensi wilayah kota ini juga terkait erat dengan beberapa fungsi kota, tetapi potensi paling menonjol adalah sektor perdagangan dan jasa. Fungsi dan peran seperti ini membawa konsekuensi pada tingginya potensi wilayah di bidang jasa dan perekonomian. Potensi perdagangan merupakan sektor dasar dalam perekonomian Kota Bengkulu. Kegiatan perdagangan mencakup perdagangan skala pelayanan lokal dan regional. Pelayanan perdagangan skala lokal dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat, sedangkan skala pelayanan regional ditujukan untuk kegiatan pemasaran dan distribusi barang ke daerah lain. Berbagai jenis barang perdagangan diperdagangkan di Kota Bengkulu. Beragam hasil bumi dari daerah *hinterland* diperdagangkan di pusat-pusat perdagangan Kota Bengkulu, yang kemudian dikirim ke daerah lain. Sebaliknya, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang didatangkan dari daerah lain, terutama Jawa, juga melewati Kota Bengkulu, sebelum sebagian didistribusikan ke beberapa kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Kegiatan perdagangan di Kota Bengkulu semakin berkembang, terutama di pusat kota, yang diikuti dengan munculnya beberapa kawasan kumuh di sekitar kawasan perdagangan. Realitas ini berakibat pada menurunnya keseimbangan daya dukung lingkungan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan bencana banjir ketika musim hujan.

Kota Bengkulu juga memiliki potensi sumberdaya alam dan kelautan yang cukup besar. Perikanan tangkap merupakan potensi sumberdaya kelautan yang cukup potensial karena wilayah tangkapan yang meliputi laut teritorial dan wilayah ZEE mengandung berbagai

jenis ikan dan mengandung nilai ekonomi tinggi. Namun, potensi perairan di laut tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan Kota Bengkulu karena keterbatasan alat tangkap. Tingkat pemanfaatan ikan laut hanya sebesar 142,46 ton per tahun (BPS Kota Bengkulu, 2005). Perikanan darat juga cukup potensial untuk dikembangkan, berupa perikanan tambak dan kolam.

Potensi sumberdaya alam lain yang ada di Kota Bengkulu adalah potensi pertanian. Dengan lahan pertanian yang hanya ditemukan di pinggir kota, produksi pertanian juga hanya terbatas pada tanaman pangan (padi, palawija, sayuran dan buah-buahan). Rendahnya potensi sumber daya alam juga ditemukan untuk jenis bahan galian yang berupa lapukan batuan lava andesit yang dimanfaatkan penduduk untuk bahan pembuatan genteng dan batu bata.

Potensi wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bengkulu adalah sektor wisata. Kota Bengkulu memiliki objek wisata dan daya tarik wisata yang beragam, wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Wisata alam meliputi rekreasi pantai, antara lain Pantai Panjang di wilayah administrasi Kecamatan Ratu Agung dan Gading Cempaka, Pantai Pasir Putih Pulau Baai di Selebar, dan rekreasi di Pulau Tikus. Pulau ini terdiri dari satu pulau induk dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, dan di pulau ini terdapat terumbu karang yang indah (Ramadhani Sutrisno, Provinsi Bengkulu. [http://students.ukdw.ac.id/~22012558/kota\\_bengkulu.htm](http://students.ukdw.ac.id/~22012558/kota_bengkulu.htm)). Jenis wisata alam lainnya adalah Danau Dendam Tak Sudah di Selebar. Sedangkan wisata sejarah dan budaya meliputi Benteng Malborough di Teluk Segara, Monumen Thomas Par di Teluk Segara, Rumah Peninggalan Bung Karno, kesenian Tabot, dan kerajinan kain Besurek. Beberapa tempat wisata alam dan budaya tersebut perlu pengelolaan yang lebih baik, sehingga dapat menarik wisatawan dari daerah lain.

Berbagai potensi wilayah tersebut jika dapat dikelola dengan baik, dapat bermanfaat demi peningkatan pendapatan penduduk melalui penyediaan lapangan kerja/usaha di berbagai bidang,

misalnya perdagangan, pariwisata dan pendukungnya, industri, jasa, pertanian dan perikanan. Hal tersebut berdampak dalam mengurangi tingkat kerentanan komunitas, khususnya di bidang ekonomi.

### 2.3. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi fisik yang berkaitan dengan infrastruktur dan menggambarkan kerentanan terhadap faktor bahaya (*hazard*) tertentu, dapat dilihat dari berbagai indikator, di antaranya persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, jaringan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi serta PDAM (Bakornas, 2005). Berdasarkan RTRW Kota Bengkulu, kawasan terbangun yang ada, masih kurang dari separuhnya atau 46 persen, dan sisanya merupakan hutan dan rawa-rawa yang berpotensi untuk dikembangkan. Akan tetapi, lokasi pemukiman penduduk Kota Bengkulu cenderung mengelompok di daerah rawan tsunami, sehingga kondisi ini juga berpotensi terkena risiko bencana.

Infrastruktur dan penempatan fasilitas penting di Kota Bengkulu yang berkaitan dengan kebencanaan, adalah fasilitas kesehatan. Berdasarkan data 'Bengkulu Dalam Angka Tahun 2005', fasilitas kesehatan di Kota Bengkulu adalah 4 unit, terdiri dari RSUD M. Yunus, RS Polisi, RS Tentara (DKT), dan RS Raflesia sebagai rumah sakit swasta. Dilihat dari segi lokasi, fasilitas kesehatan yang ada secara umum menyebar mengikuti lokasi permukiman yang cukup rentan terhadap bahaya tsunami. Hanya RSUD M. Yunus yang cukup jauh dari pantai, tetapi pada waktu gempa bumi pada 4 Juni 2000 dan 12 September 2007, rumah sakit tersebut juga mengalami kerusakan. Bangunan untuk pelayanan kesehatan harus dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan ditempatkan di berbagai lokasi aman terhadap bahaya tsunami.

Prasarana lain adalah instalasi air bersih dan jaringan listrik. Kapasitas air bersih sebesar 150 l/detik dengan total produksi 9.381.192 m<sup>3</sup>. Kapasitas listrik terpasang 150,52 MW yang melebihi kebutuhan masyarakat. Penyebaran tempat pengolahan air bersih

sebagian besar berada cukup jauh dari pantai sehingga tingkat kerentanan terhadap tsunami cukup kecil. Begitu juga pembangkit listrik yang sudah interkoneksi dengan daerah di luar Kota Bengkulu, sehingga pemasangan tidak akan terganggu kecuali kerusakan pada jaringan ke pengguna. Sarana telekomunikasi berkembang dengan pesat dengan adanya jaringan telepon seluler. Jaringan Telkom menyebar sesuai dengan penyebaran permukiman. Permasalahan komunikasi relatif berkurang seandainya terjadi bencana gempa bumi maupun tsunami karena adanya telepon seluler. Akan tetapi, pengalaman gempa bumi 12 September 2007 menunjukkan jaringan listrik dan telepon mengalami pemadaman dan gangguan beberapa saat.

Sarana dan prasarana transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Sarana transportasi laut yang ada adalah Pelabuhan Baai yang berfungsi sebagai tempat melayani penumpang dari Bengkulu ke Enggano. Transportasi udara dilakukan dari Pelabuhan Udara Fatmawati, yang mampu didarati pesawat besar Boeing 737 dan relatif aman dari tsunami karena cukup jauh dari pantai. Tetapi, waktu terjadi gempa bumi tektonik mengalami kerusakan meskipun tidak parah. Jaringan jalan sekitar pantai cukup rentan terhadap tsunami, namun banyaknya jalan yang vertikal menjauh dari garis pantai memudahkan untuk evakuasi masyarakat.

Dilihat dari kondisi fisik lingkungan dan pengamatan bentang alam, Kota Bengkulu memiliki banyak pilihan jalur dan tempat evakuasi sementara maupun permanen dalam menghadapi bencana tsunami dan gempa bumi. Kota Bengkulu Selatan atau Teluk Sepang sementara waktu akan mendapat kesulitan karena terisolir bila ada bencana besar, seperti gempa bumi, kecuali ada jalan baru. Beberapa keuntungan Kota Bengkulu adalah dataran rendah tepi pantai yang cukup sempit, yaitu hanya sekitar 300 m – 500 m, dan tidak jauh dari pantai sudah sampai pada ketinggian 2 – 5 m atau sampai 10 m, kecuali daerah Kandang dan Teluk Sepang (LIPI, 2006). Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana penting berkaitan dengan pengurangan risiko bencana seharusnya ditempatkan di lokasi aman dengan konstruksi tahan gempa.



# BAB III

## KONDISI KEPENDUDUKAN

### 3.1. KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA BENGKULU

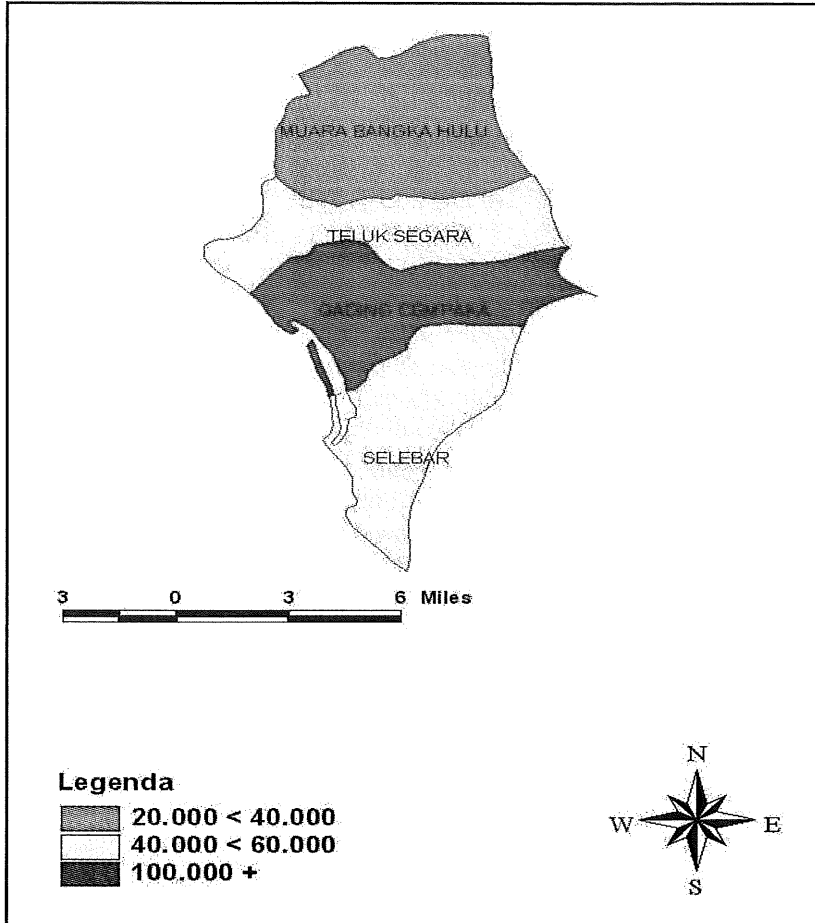
**K**ota Bengkulu merupakan satu dari empat kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Bengkulu. Kota ini berpenduduk 275.420 jiwa pada tahun 2005, yang terdiri dari 68.280 rumah tangga. Tingkat kepadatan penduduk kota ini pada tahun 2005 adalah 1.992 jiwa/km<sup>2</sup>, yang meningkat dari 1.793 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2000. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan untuk tahun 2003 dapat dilihat pada Peta 3.1 dan 3.2. Penduduk Kota Bengkulu tersebar di delapan wilayah kecamatan, dengan jumlah penduduk terbanyak bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, diikuti Kecamatan Ratu Agung dan Selebar (BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006). Jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan rata-rata jumlah anggota dalam setiap rumah tangga pada setiap kecamatan yang termasuk wilayah Kota Bengkulu disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Penduduk Kota Bengkulu Menurut Jumlah, Rumah Tangga, Rata-rata Anggota Rumah Tangga, dan Kecamatan, 2005**

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata ART/Rumah Tangga
Selebar	31.760	6.100	5,21
Kampung Melayu	21.070	8.800	2,39
Gading Cempaka	71.540	17.360	4,12
Ratu Agung	47.650	11.070	4,30
Ratu Samban	26.850	5.630	4,77
Teluk Segara	26.220	6.980	3,76
Sungai Serut	19.810	4.890	4,05
Muara Bangkahulu	30.520	7.450	4,10
Jumlah	275.420	68.280	4,10

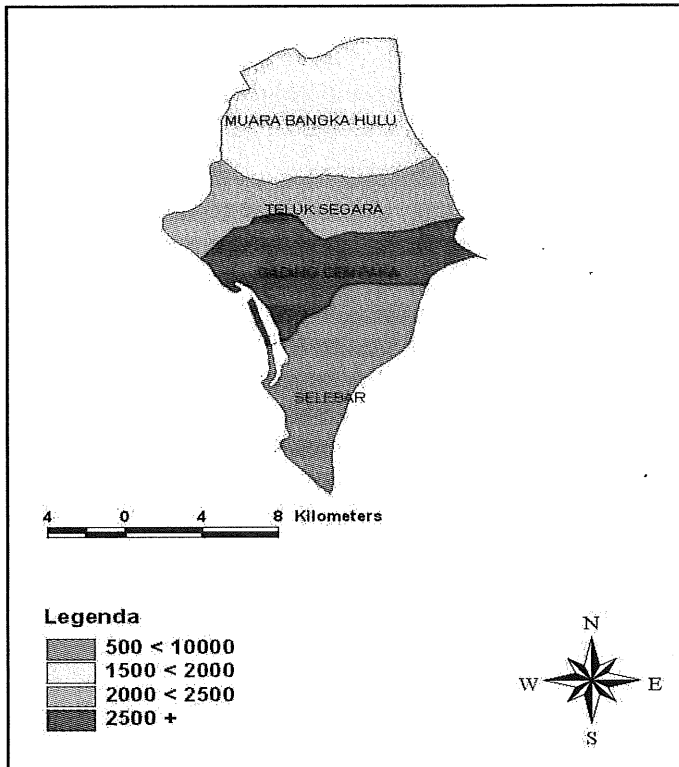
Sumber: BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006.

**Peta 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Bengkulu, 2003**



Sumber: BPS, Kota Bengkulu Dalam Angka, 2003.

### Peta 3.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Bengkulu, 2003



Sumber: BPS, Kota Bengkulu Dalam Angka, 2003.

Berdasarkan data pada tabel 3.1 terlihat bahwa beberapa rumah tangga di Kota Bengkulu merupakan rumah tangga kecil, dengan rata-rata jumlah anggota secara keseluruhan sebanyak 4 orang. Di Kecamatan Kampung Melayu, rata-rata jumlah anggota rumah tangga bahkan lebih kecil, yaitu hanya dua orang untuk setiap rumah tangga. Hanya Kecamatan Selebar mempunyai rata-rata anggota rumah tangga lebih banyak, yaitu lima orang. Ada kemungkinan keadaan ini berkaitan dengan program keluarga berencana (KB) yang dilaksanakan di Kota Bengkulu. Pada tahun

2007, jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi akseptor KB di kota ini mencapai 78 persen dari 45.788 PUS (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Bengkulu, 2007).

Data pada Tabel 3.2 memperlihatkan komposisi penduduk Kota Bengkulu menurut kelompok umur. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sekitar dua per tiga penduduk Kota Bengkulu berada dalam kelompok umur ekonomi produktif (15-64 tahun). Sisanya, yaitu 31,6 persen dan 2,2 persen adalah kelompok penduduk usia muda (0-9 tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas). Komposisi tersebut menunjukkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Bengkulu yang sebesar 0,51. Artinya, dua penduduk berusia produktif menanggung satu penduduk kelompok non-produktif. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kota Bengkulu tergolong rendah, sebagaimana dikemukakan oleh Sudarmadi (2005) bahwa rasio ketergantungan termasuk rendah jika angkanya sebesar 0,40-0,50 (dikutip dari Tim Peneliti PPK-LIPI, 2006).

**Tabel 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kota Bengkulu, 2005 (%)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki + Perempuan
0 - 4	11,2	10,5	10,9
5 - 9	12,4	8,9	10,7
10-14	10,6	9,5	10,0
15-19	11,3	12,9	12,1
20-24	9,1	11,3	10,2
25-29	8,0	10,5	9,2
30-34	7,8	7,3	7,5
35-39	6,4	8,5	7,4
40-44	7,6	7,7	7,6
45-49	6,1	3,3	4,7
50-54	3,9	3,7	3,8
55-59	1,7	1,8	1,8
60-64	1,8	1,8	1,8
65+	2,2	2,3	2,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2006

Proporsi penduduk perempuan berusia produktif lebih besar daripada penduduk laki-laki jika dibandingkan menurut jenis kelamin. Sebaliknya, proporsi penduduk usia muda laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hampir tidak ada perbedaan antara penduduk lanjut usia laki-laki dan perempuan. Mengacu pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan secara tradisional, yaitu laki-laki berperan sebagai pencari nafkah dan perempuan bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga, dapat dikatakan bahwa proporsi yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama lebih kecil. Hal ini kemungkinan menyebabkan beban ekonomi laki-laki menjadi lebih berat.

Kota Bengkulu dihuni penduduk dari berbagai suku bangsa. Terdapat empat suku bangsa yang dominan, yaitu suku Jawa, suku asli Bengkulu yang terdiri dari suku Rejang, Serawai, Lembak, Melayu Pasemah, dan Melayu Bengkulu, serta suku Minangkabau dan Sunda Priangan. Penduduk suku Jawa mendominasi pendatang yang tinggal di Kota Bengkulu, dengan proporsi sebesar 13,9 persen dari jumlah seluruh penduduk (BPS, 2001). Suku Minangkabau berada pada urutan selanjutnya, yaitu sebanyak 11,9 persen, dan suku Sunda Priangan sebanyak 2,6 persen. Di antara suku asli Bengkulu, yaitu suku Serawai dan Melayu Bengkulu, merupakan suku dengan proporsi terbesar, yaitu 15 persen, diikuti suku Rejang, Lembak dan Melayu Pasemah dengan proporsi berturut-turut sebesar 7,3 persen, 4,4 persen, dan 2,5 persen.

Banyaknya penduduk suku Jawa yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu berkaitan erat dengan program transmigrasi. Sejak program tersebut masih bernama kolonisasi, Provinsi Bengkulu sudah menjadi daerah penerima transmigran. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1909 sebanyak 265 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.059 jiwa telah dipindahkan ke berbagai lokasi transmigrasi di provinsi ini melalui program kolonisasi ([http://www.nakertrans.go.id/statistik\\_trans/Data%20TRANSMIGRAN/Kolonial.php](http://www.nakertrans.go.id/statistik_trans/Data%20TRANSMIGRAN/Kolonial.php)). Pemandahan penduduk ke Provinsi Bengkulu terus berlanjut sampai Pelita VI. Sebagian transmigran kemungkinan pindah ke Kota Bengkulu dan melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Keberadaan migran suku

Jawa di Kota Bengkulu tidak terhindarkan lagi mendorong penduduk dari suku yang sama untuk datang secara spontan, tidak melalui pengaturan pemerintah seperti program transmigrasi.

Penduduk Kota Bengkulu yang berusia 15 tahun ke atas melakukan berbagai kegiatan. Sekitar separuh dari mereka atau 55 persen berstatus bekerja, dan 7,3 persen lainnya mencari pekerjaan, dan sisanya 14,5 persen, 17,6 persen serta 5,4 persen secara berturut-turut mempunyai kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan umum yang terdapat di daerah lain juga ditemui di Kota Bengkulu. Proporsi penduduk laki-laki berusia di atas 15 tahun yang bekerja adalah sekitar dua kali lebih besar daripada perempuan dalam kelompok umur yang sama. Sebaliknya, proporsi laki-laki yang mengurus rumah tangga jauh lebih kecil dibandingkan dengan perempuan. Kenyataan ini sejalan dengan fenomena umum yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Nilai/anggapan yang dianut oleh masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam keluarga menyebabkan lebih banyak kelompok penduduk ini yang bekerja. Namun, perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan data tersebut. Kelompok laki-laki tidak selalu berperan sebagai pencari nafkah, karena adakalanya perempuan tidak menganggap diri mereka bekerja, meskipun melakukan berbagai kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai 'bekerja'.

Fenomena menarik yang ditemukan di kalangan penduduk Kota Bengkulu yang berusia 15 tahun ke atas adalah lebih banyak perempuan yang bersekolah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan kondisi di Provinsi Bengkulu pada umumnya, yaitu proporsi penduduk laki-laki dan perempuan yang bersekolah adalah sama besarnya, yaitu masing-masing 11 persen (BPS, 2001). Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai tradisional yang memberikan prioritas untuk bersekolah, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, kepada anak laki-laki daripada anak perempuan sudah tidak lagi dianut penduduk kota ini.

Proporsi terbesar dari penduduk yang bekerja di Kota Bengkulu melakukan berbagai pekerjaan di sektor jasa, diikuti yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian. Kenyataan ini mudah dimengerti karena sektor perdagangan dan jasa menjadi penopang atau penggerak perekonomian Kota Bengkulu, yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Bengkulu (BPS Kota Bengkulu, 2006). Kesempatan kerja di sektor perdagangan dan jasa juga lebih banyak tersedia di kota ini. Hal ini terlihat dari data pada Tabel 3.3, yaitu terjadinya peningkatan proporsi penduduk yang bekerja di kedua sektor tersebut sejak tahun 2003.

**Tabel 3.3. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%)**

Lapangan Pekerjaan	2003	2004	2005
Pertanian	14,2	9,5	10,4
Pertambangan dan Pengecambahan	0,8	0,5	0,9
Industri Pengolahan	6,0	4,3	4,3
Listrik, Gas dan Air Minum	1,0	0,5	0,2
Konstruksi	4,7	8,6	5,1
Perdagangan	27,1	26,8	33,3
Transportasi dan Komunikasi	7,8	8,9	4,6
Bank dan Lembaga Keuangan	1,9	3,0	1,5
Jasa	36,2	37,1	39,7
Lainnya	0,3	0,7	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006

Distribusi penduduk menurut jenis pekerjaan menunjukkan bahwa tenaga usaha penjualan mempunyai proporsi terbesar di antara berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk (Tabel 3.4). Keadaan ini berkaitan erat dengan sektor pekerjaan, yaitu perdagangan menempati urutan kedua dalam penyerapan tenaga kerja. Perkembangan sektor perdagangan yang membuka kesempatan

lebih besar bagi pemilik modal untuk bergerak di sektor tersebut telah menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi penduduk Kota Bengkulu. Perdagangan skala besar maupun skala kecil semakin berkembang. Berkembangnya usaha pertokoan memerlukan tenaga penjualan. Kesempatan ini diisi penduduk Kota Bengkulu, sehingga banyak di antara mereka bekerja sebagai tenaga penjualan.

**Tabel 3.4. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%)**

Jenis Pekerjaan	2003	2004	2005
Tenaga Professional, Teknis, dan sejenisnya	15,7	11,7	11,2
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1,4	1,3	2,1
Tenaga Tata Usaha	14,6	13,4	12,9
Tenaga Usaha Penjualan	23,5	24,8	31,4
Tenaga Usaha Jasa	21,5	10,0	9,2
Tenaga Usaha Pertanian	0,0	9,2	10,4
Tenaga Produksi, Operator Alat Pengangkutan dan Pekerja Kasar	22,2	27,6	20,1
Lainnya	1,2	1,9	2,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006

Berdasarkan status pekerjaan, proporsi terbesar penduduk Kota Bengkulu yang bekerja adalah buruh/karyawan, diikuti yang berusaha sendiri dan yang berusaha dibantu oleh anggota rumah tangga/buruh tidak tetap (Tabel 3.5). Buruh/karyawan ini antara lain terdiri dari yang bekerja sebagai pegawai di kantor/institusi pemerintah maupun swasta, serta yang bekerja sebagai tenaga penjualan di banyak toko yang terdapat di Kota Bengkulu. Penduduk yang berusaha sendiri serta dibantu oleh anggota rumah tangga/buruh tidak tetap terdiri dari yang bergerak di sektor perdagangan, terutama dalam skala kecil yang tidak memerlukan buruh/karyawan tetap.



**Tabel 3.5. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%)**

Status Pekerjaan	2003	2004	2005
Berusaha sendiri	19,6	20,8	25,8
Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap	9,6	7,9	8,8
Berusaha dengan dibantu buruh tetap	4,3	5,0	3,2
Buruh/Karyawan	52,9	54,1	51,4
Pekerja Bebas di Pertanian	2,5	1,9	2,8
Pekerja Bebas di Non-pertanian	4,0	6,2	2,8
Pekerja tidak dibayar	7,1	4,0	5,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0

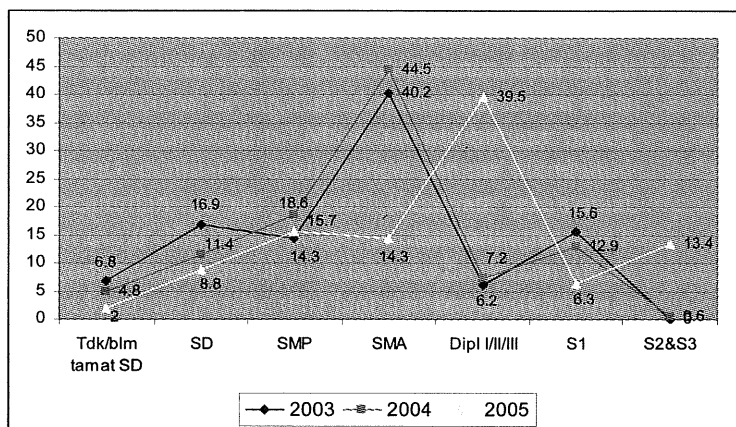
Sumber: BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006

Diagram 3.1. memperlihatkan tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kota Bengkulu. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir dua per tiga penduduk yang bekerja mempunyai pendidikan tingkat SMA dan atau lebih tinggi. Sebaliknya, hanya sekitar 10 persen di antaranya berpendidikan rendah, yaitu tamat SD dan tidak/belum tamat SD. Data ini sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mencakup pegawai di berbagai institusi pemerintah yang mensyaratkan pendidikan minimal setingkat SMA. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa membawa konsekuensi semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja.

Hal menarik yang terlihat pada Diagram 3.1 adalah peningkatan yang tajam pada pekerja dengan pendidikan setingkat D I/II/III antara tahun 2004 dan 2005. Kondisi yang sama juga ditemukan pada pekerja yang berpendidikan pasca sarjana meskipun tidak setajam pada mereka yang berpendidikan diploma. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut. Pertama adalah pada tahun 2004 kemungkinan mereka tidak tercatat sebagai pekerja.

Kedua adalah pada tahun 2005 kemungkinan terjadi peningkatan kesempatan kerja untuk lulusan pendidikan tersebut. Khusus tingkat diploma kemungkinan dikarenakan pesatnya perkembangan sektor jasa, dan kesempatan kerja untuk lulusan pendidikan yang mencetak “tenaga siap kerja” lebih banyak tersedia. Tidak mengherankan banyak di antara mereka terserap dalam pasar kerja. Selanjutnya, pekerja yang berpendidikan pasca sarjana kemungkinan adalah dosen pengajar di berbagai universitas yang terdapat di Kota Bengkulu, yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat tersebut dan kembali mengajar pada tahun 2005.

**Diagram 3.1. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Bengkulu, 2003-2005 (%)**



Sumber: BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006

Catatan: \* Penduduk usia 10 tahun ke atas

Sebelum berdiri menjadi kecamatan terpisah, Kecamatan Ratu Agung yang menjadi kecamatan sampel dalam penelitian ini, termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Gading Cempaka. Pemekaran Kecamatan Gading Cempaka menyebabkan terbentuknya dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban. Kecamatan Ratu Agung mempunyai delapan kelurahan, meliputi

Kelurahan Lempuing, Kebun Tebeng, Tanah Patah, Nusa Indah, Kebun Beler, Kebun Kenanga, Sawah Lebar serta Kelurahan Sawah Lebar Baru. Pada April 2007 jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Ratu Agung adalah 45.316 orang, terdiri dari 22.675 orang laki-laki dan 22.641 orang perempuan (Kecamatan Ratu Agung, 2007). Jumlah tersebut menunjukkan kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.010 orang/km<sup>2</sup>, jauh lebih tinggi daripada Kota Bengkulu yang memiliki tingkat kepadatan 1.992 orang/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk tersebut menempati urutan kedua terbesar setelah Kelurahan Gading Cempaka. Jumlah penduduk setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Ratu Agung disajikan pada Tabel 3.6. Tabel tersebut menunjukkan Kelurahan Sawah Lebar memiliki penduduk terbanyak. Dua kelurahan yang berpenduduk terbanyak setelah kelurahan tersebut secara berturut-turut adalah Tanah Patah dan Sawah Lebar Baru, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Sawah Lebar.

**Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Jumlah Kepala Keluarga, Kecamatan Ratu Agung, 2007**

Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
Lempuing	2.089	2.070	5.159	978
Kebun Tebeng	2.434	2.431	4.865	1.011
Tanah Patah	3.433	3.434	6.867	1.545
Nusa Indah	2.486	2.547	4.943	1.210
Kebun Beler	2.080	1.964	4.044	885
Kebun Kenanga	2.629	3.304	5.933	1.479
Sawah Lebar	3.893	3.758	7.651	1.740
Sawah Lebar Baru	3.631	3.223	6.854	1.483
Jumlah	22.675	22.641	45.316	10.331

Sumber: Kecamatan Ratu Agung, 2005

Catatan: Keadaan sampai bulan April 2007.

Komposisi umur penduduk Kecamatan Ratu Agung mirip dengan keadaan Kota Bengkulu secara keseluruhan. Data pada Tabel 3.7. memperlihatkan sekitar sepertiga penduduk kecamatan ini berusia 0-12 tahun dan hampir dua per tiga di antaranya berusia produktif. Komposisi tersebut menunjukkan kota ini memerlukan berbagai pelayanan untuk penduduk usia muda dan produktif, yaitu sarana pendidikan dan kesempatan kerja.

**Tabel 3.7. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 6	14,0	15,0	14,5
7 -12	17,1	15,6	16,3
13-18	13,9	16,1	15,1
19-24	19,8	19,9	19,8
25-55	24,4	23,9	24,1
56-79	10,1	8,9	9,5
80 +	0,7	0,6	0,7
Jumlah (N)	100,0 (22.675)	100,0 (22.641)	100,0 (45.316)

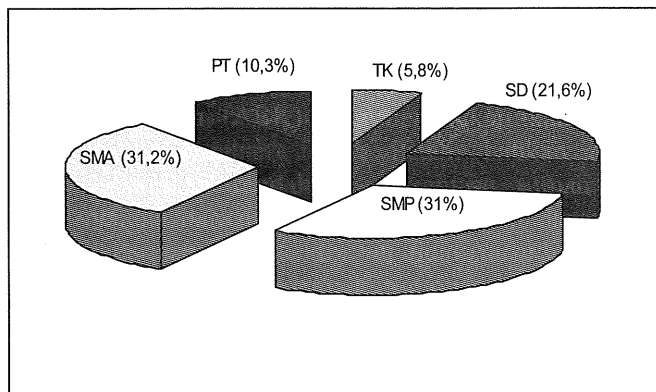
Sumber: Kecamatan Ratu Agung, 2005.

Catatan: Keadaan sampai bulan April 2007.

Komposisi penduduk Kecamatan Ratu Agung menurut tingkat pendidikan disajikan pada Diagram 3.2. Diagram tersebut memperlihatkan relatif tingginya tingkat pendidikan penduduk di kecamatan ini, yaitu lebih dari 40 persen penduduk menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengacu pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Kecamatan Ratu Agung relatif telah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terlihat dari hampir tiga per empat penduduknya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke atas, meskipun

sebanyak 31 persen di antaranya masih berada di bangku SMP<sup>7</sup>. Kenyataan ini mudah dimengerti mengingat Kecamatan Ratu Agung terletak di wilayah perkotaan yang mempunyai banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan kemudahan akses untuk mencapainya. Pada tahun 2005 Kota Bengkulu memiliki 102 SD, 45 SMP, 26 SMA, dan 17 SMK (BPS Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006). Selain itu, juga terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang mudah dijangkau karena ketersediaan sarana transportasi.

**Diagram 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%)**



Sumber: Kantor Kecamatan Ratu Agung, 2005

Catatan: - Keadaan sampai bulan April 2007

- Tidak termasuk penduduk yang belum sekolah serta yang tidak pernah sekolah.

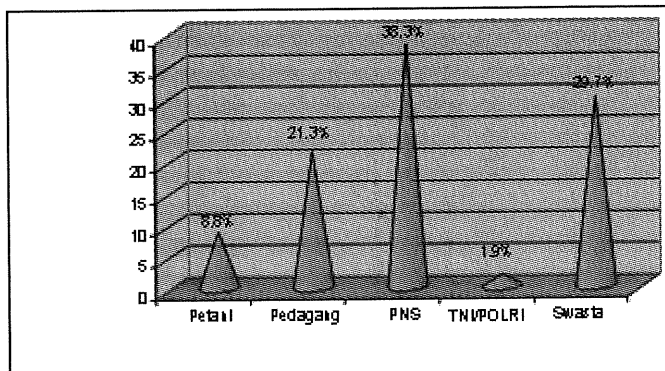
Pekerjaan penduduk di Kecamatan Ratu Agung mencerminkan tipikal daerah perkotaan, seperti terlihat pada Diagram 3.3. Lebih dari 90 persen penduduk yang bekerja melakukan

<sup>7</sup> Merujuk pada definisi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendidikan adalah jenjang yang telah ditamatkan penduduk. Menggunakan definisi tersebut, maka 31 persen penduduk yang berpendidikan setingkat SLTP berarti telah menamatkan pendidikan.

pekerjaan non-pertanian. Proporsi terbesar di antara mereka adalah pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah yang terdapat di Kota Bengkulu. Penduduk yang bekerja sebagai petani adalah yang melakukan kegiatan ekonomi bertanam sayur-sayuran, bertani sawah, dan berkebun kelapa sawit. Kegiatan menanam sayuran dilakukan penduduk di beberapa kelurahan, seperti di Lempuing, Tanah Patah, dan Kelurahan Kebun Tebeng. Pertanian sawah dilakukan di Kelurahan Sawah Lebar dan Kebun Tebeng, yang memanfaatkan irigasi teknis Danau Dendam Tak Sudah. Perkebunan kelapa sawit terletak di Kelurahan Muara Bangkahulu, Selebar, dan Kampung Melayu (wawancara dengan pegawai Kantor Kecamatan Ratu Agung).

Kelurahan Tanah Patah merupakan kelurahan dengan penduduk kedua terbanyak di Kecamatan Ratu Agung. Kepadatan penduduk kelurahan ini adalah 2.289 orang/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kelurahan Tanah Patah lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada umumnya. Penduduk kelurahan ini tersebar di 4 RW yang seluruhnya berjumlah 19 RT, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 60-101 kepala keluarga (KK) di setiap RT. Seluruh RT tersebut yang menunjukkan jumlah KK terbanyak adalah RT 14, yaitu 191 KK. Hal ini mudah dimengerti karena RT 14 terletak paling dekat dengan pantai, yang banyak terdapat rumah petak (penduduk setempat menyebutnya “rumah bedeng”), yang disewakan bagi pendatang. Setiap rumah petak pada umumnya disewa satu keluarga, sehingga daerah ini menjadi padat penduduknya. Kondisi yang sama juga ditemukan di RT 13 yang juga berlokasi di dekat pantai. RT ini dihuni 90 KK. Jika dibandingkan dengan RT 14 dan RT 13, RT-RT lainnya yang terletak lebih jauh dari pantai memiliki KK yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki jumlah rumah petak sewaan sangat sedikit. Rumah sewa pada umumnya berupa rumah yang berdiri sendiri, sehingga harga sewa juga relatif lebih mahal daripada rumah petak. Dengan demikian, jumlah keluarga penyewa rumah juga lebih sedikit.

**Diagram 3.3. Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut Pekerjaan, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%)**



Sumber: Kecamatan Ratu Agung, 2007

Jumlah penduduk Kelurahan Tanah Patah berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 3.8. Tabel tersebut memperlihatkan kecenderungan perbedaan komposisi umur penduduk antara Kelurahan Tanah Patah dan Kecamatan Ratu Agung pada umumnya. Komposisi umur penduduk Kelurahan Tanah Patah relatif lebih muda dibandingkan penduduk Kelurahan Ratu Agung. Proporsi penduduk usia muda (0-12 tahun) di Kelurahan Tanah Patah adalah 34,9 persen, atau sekitar 4 persen lebih banyak dibandingkan kelompok penduduk usia yang sama di Kecamatan Ratu Agung. Penduduk kelompok umur lebih tua (13-55 tahun) adalah 56,5 persen, yang lebih rendah daripada proporsi di Kecamatan Ratu Agung. Keadaan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan tingkat penggunaan kontrasepsi, yakni presentase peserta KB di Kelurahan Tanah Patah yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang sama di Kecamatan Ratu Agung. Data memperlihatkan proporsi PUS di Kelurahan Tanah Patah yang menjadi akseptor KB adalah 10 persen, sedangkan proporsi PUS yang menjadi akseptor KB di Kecamatan Ratu Agung adalah 11,5 persen dari seluruh PUS akseptor KB di Kota Bengkulu (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Kantor

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Bengkulu, 2007).

**Tabel 3.8. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 6	15,9	18,5	17,2
7 -12	18,6	16,7	17,7
13-18	18,6	18,6	18,6
19-24	19,4	18,4	18,9
25-55	18,0	19,5	18,8
56-79	7,2	6,6	6,8
80 +	2,3	1,6	1,9
Jumlah	100,0 (3.433)	100,0 (3.434)	100,0 (6.867)

Sumber: Kecamatan Ratu Agung, 2005.

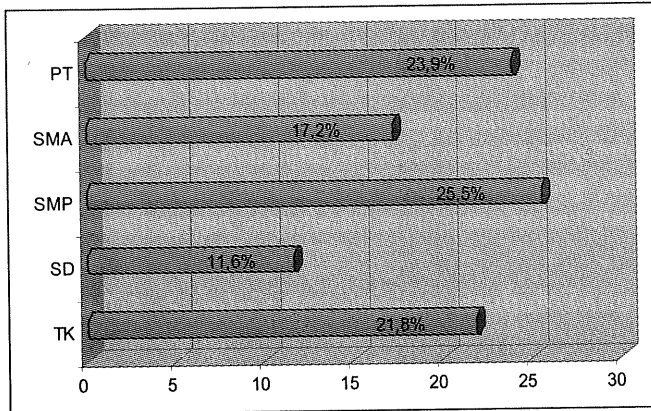
Catatan: Keadaan sampai bulan April 2007.

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Tanah Panah cenderung hampir sama dengan penduduk Kelurahan Ratu Agung pada umumnya. Tingkat pendidikan penduduk kelurahan ini relatif tinggi, sebagaimana terlihat pada Diagram 3.4. Lebih dari 40 persen penduduk Kelurahan Tanah Patah berpendidikan setingkat SMA dan lebih tinggi. Proporsi penduduk yang menamatkan perguruan tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan angka untuk kelompok penduduk yang sama di tingkat Kecamatan Ratu Agung. Sama halnya dengan kondisi di tingkat kecamatan dan Kota Bengkulu pada umumnya, keadaan ini merupakan cerminan tipikal daerah perkotaan. Dari satu sisi, ketersediaan kesempatan kerja bagi mereka yang berpendidikan tinggi telah menarik pendatang untuk tinggal dan bekerja di daerah perkotaan. Sedangkan di sisi lain, sarana dan prasana pendidikan yang tersedia sampai tingkat yang tinggi (SMA ke atas) kemungkinan menyebabkan penduduk kota mempunyai



kesempatan besar untuk melanjutkan pendidikan, yang menyebabkan banyak penduduk daerah ini berpendidikan tinggi.

**Diagram 3.4. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%)**



Sumber: Kecamatan Ratu Agung, 2005

Catatan: Keadaan sampai bulan April 2007

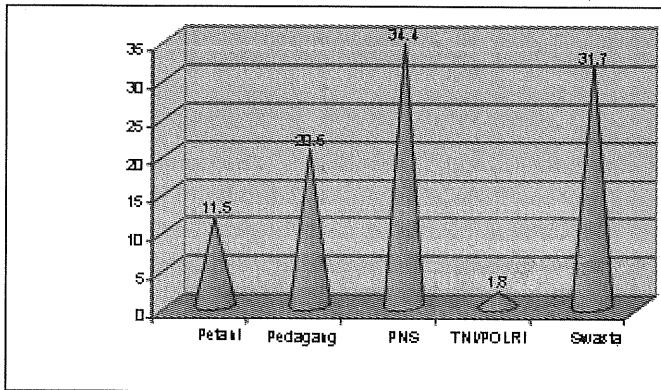
Tidak termasuk penduduk yang belum sekolah dan yang tidak pernah sekolah

Pekerjaan yang dilakukan menunjukkan perbedaan kecenderungan antara penduduk Kelurahan Tanah Patah dan penduduk Kecamatan Ratu Agung serta Kota Bengkulu pada umumnya, khususnya yang bekerja di sektor pertanian. Namun, perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok. Diagram 3.5. memperlihatkan 11,5 persen penduduk kelurahan ini bekerja di sektor pertanian. Angka tersebut lebih besar dibandingkan proporsi penduduk yang sama untuk Kecamatan Ratu Agung, yaitu 8,8 persen dan Kota Bengkulu secara keseluruhan, yaitu 10,4 persen pada tahun 2005. Mereka yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya adalah petani sayur, yang beberapa di antaranya bergabung dalam kelompok tani. Sebaliknya, persamaan antara Kelurahan Tanah Patah dan Kecamatan Ratu Agung adalah proporsi tertinggi penduduk yang

bekerja pada kelompok pegawai negeri sipil. Kelompok ini terdiri dari pegawai berbagai instansi pemerintah yang terdapat di Kota Bengkulu atau daerah sekitarnya, seperti Arga Makmur.

Penduduk Kelurahan Tanah Patah banyak yang bekerja di sektor pertanian, ditunjang oleh ketersediaan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian<sup>8</sup>. Lahan yang dimanfaatkan tidak luas dan bahkan ada yang hanya memanfaatkan lahan pekarangan, namun kegiatan pertanian ini dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian tetap. Sebagai contoh, satu patok lahan berukuran sekitar 1/36 Ha, dalam satu kali panen atau 18 hari dapat memberikan penghasilan sekitar 75.000 - 100.000 rupiah (wawancara dengan staf Kecamatan Ratu Agung). Selama musim hujan hasil yang diperoleh petani sayur lebih besar dibandingkan waktu-waktu lainnya.

**Diagram 3.5. Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut Pekerjaan, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, 2007 (%)**



Sumber: Kantor Kecamatan Ratu Agung, 2007

<sup>8</sup> Kegiatan pertanian yang dilakukan penduduk pada umumnya adalah bertanam tanaman sayur seperti bayam, kangkung, sawi, dan bawang daun.

Lahan pertanian sayur di Kelurahan Tanah Patah terdapat di beberapa RT, yaitu RT 7, 8, 16, 17, 12, 13, dan RT 14. RT 7 merupakan sentra pertanian sayur organik yang menggunakan lahan milik perorangan. Kegiatan pertanian tersebut dilakukan melalui bantuan dan binaan teknis dari Dinas Pertanian Kota Bengkulu. RT 12, 13, dan RT 14 yang berjarak paling dekat dengan pantai, menanam tanaman sayur di antara lahan perumahan. Lahan tersebut kebanyakan milik penduduk yang tinggal di luar kelurahan dan kemudian dimanfaatkan untuk bertanam tanaman pangan dengan cara menyewakannya kepada orang lain.

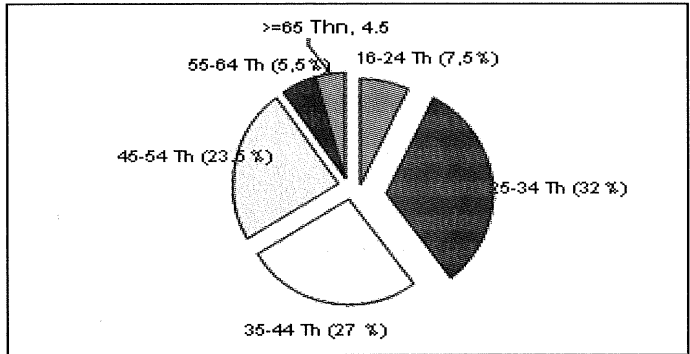
### **3.2. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA**

Bagian ini membahas kondisi kependudukan di tingkat rumah tangga, yaitu rumah tangga yang menjadi sampel penelitian. Bahasan difokuskan pada kondisi yang menunjukkan kerentanan rumah tangga dari aspek kependudukan, yang memberi kontribusi terhadap tingkat kerentanan sosial rumah tangga. Kondisi kependudukan di tingkat rumah tangga mencakup umur dan jenis kelamin anggota rumah tangga (ART), pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga (KRT), ART yang memerlukan pertolongan khusus saat bencana, seperti wanita hamil, wanita dengan anak bayi berusia kurang dari satu tahun, dan ART yang sakit dan mengalami hambatan dalam mobilitas, antara lain penyandang cacat. Selain itu juga dibahas kemampuan/keterampilan ART yang berkaitan dengan upaya penyelamatan diri pada saat bencana terjadi, meliputi pemberian pertolongan pertama, penyelamatan diri ketika bencana, antara lain berenang, memanjat, pembuatan alat-alat evakuasi, dan pengolahan air bersih. Karakteristik yang berkaitan langsung dengan ART dalam kondisi fisik dan penguasaan kemampuan tertentu, juga akan dibahas yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kerentanan kependudukan. Karakteristik tersebut adalah kepadatan hunian tempat tinggal.

Mayoritas responden dari rumah tangga sampel adalah perempuan, dengan proporsi sebesar 62 persen. Separuh dari

responden tersebut adalah istri kepala keluarga. Responden berusia antara 16-78 tahun dengan distribusi seperti diperlihatkan data pada Diagram 3.6. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa proporsi terbesar responden adalah berusia 25-34 tahun, diikuti kelompok 34-44 tahun, dan 45-54 tahun.

**Diagram 3.6. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Lebih dari dua per tiga rumah tangga responden mempunyai kepala rumah tangga berpendidikan SMP dan/atau lebih tinggi. Sebanyak 47,5 persen di antaranya telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau lebih tinggi. Keadaan ini menunjukkan kecenderungan yang sama dengan komposisi pendidikan penduduk yang bekerja di Kota Bengkulu dan Kecamatan Ratu Agung secara umum. Kemungkinan mereka yang tinggal di daerah dengan status daerah perkotaan, juga berpendidikan tinggi karena kesempatan kerja untuk penduduk dengan pendidikan tinggi lebih banyak tersedia di kota. Mereka yang berpendidikan tinggi bisa dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama terdiri dari penduduk non-migran yang tinggal menetap dan menempuh pendidikan di kota ini. Kelompok kedua terdiri dari kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di luar kota, dan juga dari daerah pedesaan di Provinsi Bengkulu atau

provinsi terdekat kota ini seperti Sumatra Selatan dan Lampung, dan bermigrasi ke Kota Bengkulu dengan tujuan bekerja atau mencari pekerjaan.

Mayoritas kepala rumah tangga responden, yaitu 94,0 persen, memiliki kegiatan 'bekerja'. Keadaan ini dapat dimaklumi karena status sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama mengharuskan kepala rumah tangga untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hanya 1,5 persen dari antara mereka menganggur dan mengurus rumah tangga. KRT yang mengurus rumah tangga pada umumnya perempuan yang tinggal bersama dengan anak-anak mereka karena ditinggal mati suami atau bercerai.

Pekerjaan yang dilakukan kepala rumah tangga responden, bervariasi mulai dari pekerjaan di sektor formal sampai dengan sektor informal. Pekerja di sektor formal pada umumnya adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di berbagai instansi pemerintah serta pegawai perusahaan swasta. Pekerja sektor informal meliputi mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan atau pedagang kecil yang berjualan di rumah, pedagang makanan di pinggir pantai atau pedagang makanan keliling. Buruh bangunan serta pedagang kebanyakan tinggal di daerah yang sangat dekat pantai, yaitu di RT 12, RT 13, dan RT 14, wilayah RW 04. Ketiga RT tersebut memiliki banyak bangunan berupa rumah petak atau rumah bedeng yang disewakan dengan sistem bulanan seharga 75.000 rupiah - 125.000 rupiah/bulan atau kontrak tahunan sebesar 1.200.000 rupiah/tahun. Harga sewa/kontrak yang relatif murah tersebut menjadi daya tarik bagi buruh dan pedagang untuk tinggal di rumah bedeng. Lokasi pedagang makanan sangat dekat dengan pantai menjadikan sebagian wilayah Kelurahan Tanah Patah sebagai lokasi pilihan untuk tempat tinggal sekaligus tempat berusaha.

Seluruh rumah tangga responden mempunyai anggota sebanyak 902 orang, yang terdiri dari 454 orang laki-laki dan 448 orang perempuan. Dari seluruh rumah tangga tersebut, terdapat 9 rumah tangga yang tidak mempunyai anggota laki-laki. Beberapa rumah tangga yang terpilih menjadi responden penelitian ini dilihat

dari umur anggota, dapat digolongkan rumah tangga muda. Dari seluruh rumah tangga responden, terdapat 36,5 persen yang mempunyai anggota rumah tangga berusia 0-4 tahun. Sebanyak 4,5 persen di antaranya mempunyai 2 anak balita. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan pada anak-anak usia 5-9 tahun. Dari semua rumah tangga responden, terdapat sekitar 40 persen rumah tangga mempunyai anak berusia 5-9 tahun, yaitu secara berturut-turut 7 persen dan 1 persen rumah tangga dengan 2 orang dan 1 orang anggota dalam usia tersebut. Sebaliknya, hanya 10,5 persen rumah tangga responden yang mempunyai anggota berusia 65 tahun dan lebih tua (Diagram 3.7.).

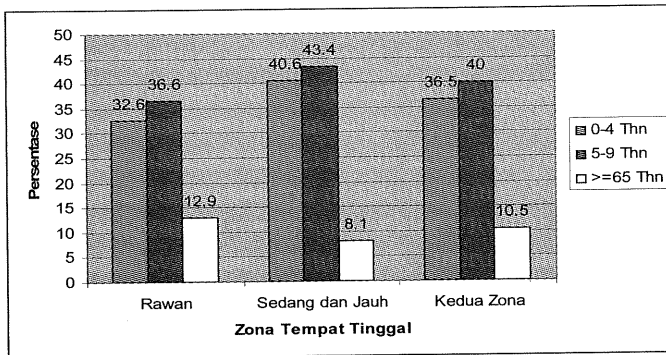
Penelitian ini menemukan perbedaan komposisi umur antara anggota rumah tangga yang termasuk kategori zona rawan dan rumah tangga zona sedang dan jauh<sup>9</sup>. Proporsi penduduk yang berusia muda, yaitu anak-anak balita usia 0-4 tahun dan anak-anak usia 5-9 tahun, yang tinggal dalam rumah tangga zona rawan, lebih kecil jumlahnya daripada kelompok rumah tangga zona sedang dan jauh. Penelitian ini mendapatkan 32,6 persen dan 36,6 persen anggota rumah tangga zona rawan secara berturut-turut adalah anak-anak balita dan anak-anak berusia 5-9 tahun. Persentase tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang sama yang tinggal di rumah tangga zona sedang dan jauh. Rumah tangga kelompok ini memiliki proporsi anak-anak balita dan anak-anak berusia 5-9 tahun secara berturut-turut adalah 40,4 persen dan 43,4 persen. Keadaan yang sebaliknya

---

<sup>9</sup> Berdasarkan lokasi tempat tinggal dari pantai, beberapa rumah tangga yang menjadi responden penelitian ini dikelompokkan dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kelompok rumah tangga yang tinggal dalam jarak kurang dari 500 meter dari pantai, yang selanjutnya disebut zona rawan). Kategori kedua terdiri dari kelompok rumah tangga yang tinggal dalam jarak 500 meter atau lebih dari pantai, disebut zona sedang dan jauh. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kerentanan penduduk menurut tingkat kerentanan tempat tinggal mereka terhadap bencana gempa dan tsunami. Daerah yang terletak kurang dari 500 meter dari pantai lebih rentan terhadap bencana tsunami daripada daerah yang terletak sejauh 500 meter atau lebih dari wilayah pantai. Dengan demikian, upaya antisipasi terhadap bencana dapat dilakukan sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk dan tempat tinggal.

terjadi pada kelompok penduduk usia lanjut. Data memperlihatkan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas anggota rumah tangga zona rawan lebih besar dibandingkan dengan kelompok rumah tangga zona sedang dan jauh, yaitu secara berturut-turut 12,9 persen dan 8,1 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan kelompok penduduk usia muda pada rumah tangga zona sedang dan jauh, lebih rentan dibandingkan dengan rumah tangga zona rawan. Sebaliknya, rumah tangga zona rawan lebih rentan daripada rumah tangga zona sedang dan jauh untuk kelompok penduduk usia lanjut.

**Diagram 3.7. Distribusi Rumah Tangga Responden yang Mempunyai ART Usia Balita dan Lansia Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



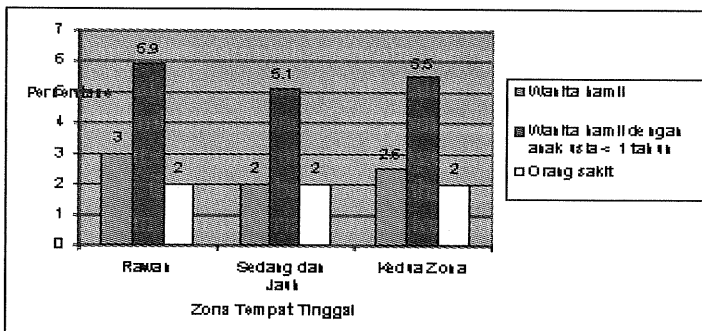
Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Seluruh anggota rumah tangga yang menjadi responden penelitian memiliki kelompok penduduk yang memerlukan pertolongan khusus, terutama untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Kelompok tersebut terdiri dari wanita hamil, wanita dengan bayi berumur kurang dari satu tahun, dan orang sakit, juga penyandang cacat. Sebanyak 2,5 persen di antara rumah tangga responden mempunyai wanita hamil, sebanyak 5,5 persen rumah tangga mempunyai wanita dengan bayi berusia kurang dari satu tahun, dan hanya 2 persen rumah tangga yang mempunyai anggota

dalam kondisi sakit, termasuk cacat (lihat Diagram 3.8). Berdasarkan kenyataan tersebut, proporsi ART yang memerlukan pertolongan khusus relatif kecil.

Data pada Diagram 3.8. memperlihatkan perbedaan yang sangat kecil antara rumah tangga zona rawan dan rumah tangga zona sedang dan jauh berdasarkan anggota yang memerlukan pertolongan khusus. ART yang sakit tidak menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok rumah tangga menurut zona yang berbeda. Perbedaan ditemukan pada kelompok wanita hamil, yaitu 3 persen ART pada zona rawan dan 2 persen ART di zona sedang dan jauh mempunyai wanita hamil. Hal yang sama juga ditemukan pada kelompok wanita dengan bayi berumur kurang dari satu tahun. Proporsi kelompok ini adalah 5,9 persen pada rumah tangga yang tinggal di zona rawan dan 5,1 persen untuk rumah tangga di zona sedang dan jauh. Perbedaan tersebut tidak mencolok, namun hasil penelitian memperlihatkan beberapa rumah tangga pada zona rawan lebih rentan dibandingkan beberapa rumah tangga di zona sedang dan jauh. Mengacu pada kenyataan ini, beberapa rumah tangga di zona rawan harus mendapat perhatian lebih besar dalam upaya penanggulangan bencana daripada beberapa rumah tangga di zona sedang dan jauh.

**Diagram 3.8. Distribusi Rumah Tangga Responden yang Mempunyai ART Wanita Hamil, Wanita dengan Anak Usia < 1 Tahun, dan Orang Sakit Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 (%)**

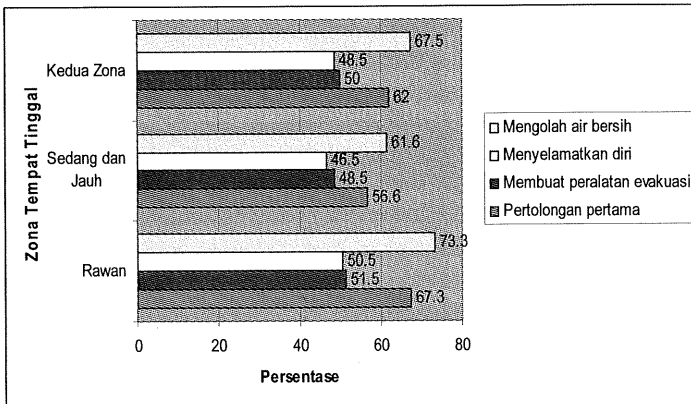


Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007



Data tentang penguasaan ART terhadap keterampilan yang berkaitan dengan upaya penyelamatan diri ketika bencana terjadi menunjukkan terdapat 62 persen rumah tangga yang tidak mempunyai satu orang anggota pun yang menguasai keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama dan 67,5 persen untuk mengolah air bersih. Selanjutnya, sebanyak 50 persen rumah tangga responden tidak mempunyai minimal satu orang anggota yang mampu membuat peralatan untuk evakuasi dan 48,5 persen rumah tangga tidak mempunyai satu orang anggota pun yang menguasai keterampilan untuk menyelamatkan diri (Diagram 3.9.). Bertolak dari kenyataan ini, risiko bencana dikurangi dengan perlu melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat menguasai berbagai keterampilan yang sangat diperlukan saat dan setelah terjadinya bencana alam. Pelatihan keterampilan untuk melakukan pertolongan pertama, membuat alat evakuasi, menyelamatkan diri serta mengolah air bersih, perlu diberikan kepada penduduk di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mempertahankan diri saat bencana terjadi dan sesudahnya.

**Diagram 3.9. Distribusi Rumah Tangga Responden Tanpa ART yang Menguasai Keterampilan yang Berkaitan dengan Bencana Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Perbandingan kelompok rumah tangga yang tinggal di zona rawan dengan yang tinggal di zona sedang dan jauh yang menggunakan keempat jenis keterampilan itu, menunjukkan perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Perbedaan yang cukup besar terlihat pada penguasaan keterampilan pemberian pertolongan pertama dan pengolahan air bersih. Sebanyak 67,3 persen rumah tangga zona rawan tidak mempunyai anggota yang menguasai keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama, sedangkan pada zona sedang dan jauh proporsinya 56,6 persen. Untuk keterampilan mengolah air bersih, ditemukan 73,3 persen rumah tangga zona rawan tidak mempunyai satu pun anggota yang menguasai keterampilan tersebut, 61,6 persen rumah tangga zona sedang dan jauh tidak mempunyai anggota yang menguasai keterampilan mengolah air bersih. Proporsi rumah tangga zona rawan dan zona sedang dan jauh yang anggotanya tidak mempunyai keterampilan membuat peralatan evakuasi berturut-turut adalah 51,5 persen dan 48,5 persen. Untuk keterampilan menyelamatkan diri, sebanyak 50,5 persen rumah tangga zona rawan dan 46,5 persen rumah tangga zona sedang dan jauh tidak mempunyai anggota yang menguasai keterampilan tersebut.

Berdasarkan kenyataan terlihat rumah tangga zona rawan lebih rentan dibandingkan rumah tangga zona sedang dan jauh meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok. Kenyataan ini mengimplikasikan bahwa kelompok rumah tangga zona rawan dalam upaya pengurangan risiko bencana, harus mendapat perhatian yang lebih besar daripada rumah tangga yang tinggal di zona sedang dan jauh. Kapasitas ART zona rawan perlu ditingkatkan agar mereka dapat menolong diri sendiri dan anggota rumah tangga lainnya ketika terjadi bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan berbagai pelatihan keterampilan dalam menghadapi kondisi darurat bencana, seperti berenang, membuat peralatan evakuasi, dan melakukan pertolongan pertama. Hal ini sangat diperlukan untuk menekan dampak negatif bencana alam.

Keadaan yang berlawanan dengan penguasaan keterampilan yang berkaitan dengan bencana, ditemukan pada kemampuan ART

membaca huruf latin dan berbahasa Indonesia. Tidak ada satu pun rumah tangga yang mempunyai anggota yang tidak bisa membaca huruf latin. Sebanyak 95,5 persen rumah tangga, dan bahkan semua anggotanya, memiliki kemampuan tersebut. Sebanyak 4,5 persen rumah tangga memiliki paling sedikit satu orang anggota yang bisa membaca huruf latin. Kondisi tersebut sejalan dengan kemampuan anggota rumah tangga untuk berbahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan 95 persen rumah tangga memiliki anggota yang semuanya bisa berbahasa Indonesia. Hanya 5 persen rumah tangga memiliki paling sedikit satu orang anggota yang bisa berbahasa Indonesia.

Fenomena tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat lokasi penelitian adalah daerah perkotaan yang mempunyai akses pendidikan, baik formal maupun informal, dan dihuni penduduk dari berbagai suku. Tersedianya fasilitas sekolah menyebabkan sebagian penduduk mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, mereka yang sudah berumur di atas usia sekolah, juga tersedia kesempatan untuk belajar dalam bentuk Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, yang memberikan keterampilan membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia. Penduduk Kota Bengkulu hidup bersama dan berinteraksi dengan penduduk dari berbagai suku, maka Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi dengan penduduk yang berasal dari daerah lain. Hal ini menyebabkan mayoritas penduduk, termasuk anggota rumah tangga sampel penelitian, menguasai Bahasa Indonesia. Keadaan ini merupakan salah satu keuntungan mengurangi dampak bencana. Kemampuan membaca dan berbahasa Indonesia ini menjadikan mereka dapat mengetahui informasi yang disampaikan dalam bahasa nasional secara lisan maupun tulisan.

Kepadatan hunian mengacu pada luas bangunan/rumah tinggal yang ditempati per jumlah penghuni/anggota rumah tangga. Hampir sepertiga rumah tangga responden, yaitu 33 persen, menempati rumah dengan kepadatan hunian  $< 8 \text{ m}^2$ . Persentase tertinggi adalah rumah tangga yang tinggal di hunian tidak padat, yaitu  $\geq 9 \text{ m}^2$ , sebanyak 53 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 14 persen menempati rumah dengan kepadatan sedang, yaitu  $8 \text{ m}^2 - 9 \text{ m}^2$ .

Kepadatan hunian seperti ini menggambarkan kebanyakan rumah tangga responden menempati rumah tinggal yang cukup layak dilihat dari kebutuhan ruang hunian. Menurut standar internasional, sesuai ketentuan ILO, kepadatan ruang hunian untuk tempat tinggal adalah 9 m<sup>2</sup>/orang. Dari pengamatan diketahui, jarak antara satu rumah dan rumah yang lain cukup dekat, dan pada umumnya rumah tangga responden tinggal di tempat yang tidak melebihi kapasitas suatu hunian. Kondisi seperti ini sebaiknya tetap dipertahankan agar lingkungan permukiman tidak berkembang menjadi lingkungan hunian kumuh, yang biasanya banyak ditemukan di kawasan perkotaan yang menyediakan sewa tempat tinggal dengan harga murah, seperti dijumpai di wilayah pesisir Kelurahan Tanah Patah.

### 3.3. KELOMPOK PENDUDUK RENTAN

Kerentanan mengacu pada kecenderungan pada kerusakan/bahaya yang disebabkan oleh kekuatan/faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal) (<http://72.14.205.104/search?q=cache:acrN0YKAXHEJ:www.sidsnet.org/docshare/other/2>). Berbagai kerentanan dapat terjadi sepanjang kehidupan manusia, dan salah satu di antaranya adalah kerentanan sosial (Wisner, 2001). Menurut UNDP (2000, dalam <http://72.14.205.104/search?q=cache:acrN0YKAXHEJ:www.sidsnet.org/docshare/other/2>), kerentanan sosial menunjukkan tingkat tekanan atau bahaya yang dihadapi masyarakat atau kelompok sosial ekonomi, yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, yang berpengaruh negatif terhadap kohesivitas suatu negara. Salah satu variabel kerentanan sosial adalah kerentanan kependudukan.

Kelompok penduduk yang rentan terhadap bencana alam adalah anak-anak, penduduk lanjut usia, perempuan, dan penyandang cacat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2006; Bakornas PBP, 2007). Dwyer dkk. (2004) dalam studi mereka mengenai metodologi untuk mengidentifikasi tingkat risiko terhadap bencana alam di Australia, juga menggunakan indikator yang secara spesifik mengelompokkan penduduk berusia kurang dari lima tahun

dan berumur 65 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk rentan., Studi Dwyer menggunakan umur dan jenis kelamin, dan juga jumlah penghuni dalam rumah tangga sebagai indikator kerentanan penduduk.

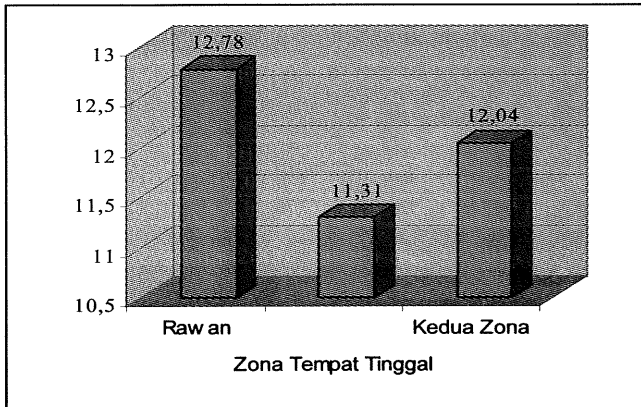
Penelitian ini menyebut penduduk rentan adalah mereka yang berusia 0-4 tahun atau balita (anak di bawah lima tahun) dan 65 tahun ke atas atau usia lanjut/lanjut usia (lansia). Kelompok penduduk tersebut dikategorikan sebagai kelompok rentan karena berbagai alasan. Alasan yang utama berkaitan dengan kemampuan fisik, misalnya anak-anak dan lansia memiliki kerentanan dalam mobilitas, terutama untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Kerentanan fisik yang ada pada anak-anak dan lansia, menyebabkan mereka memerlukan makanan khusus dan mudah dicerna serta memerlukan perawatan kesehatan yang spesifik (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2006).

Kerentanan kependudukan dalam penelitian ini dilihat dari proporsi penduduk usia 0-4 tahun dan di atas 65 tahun terhadap penduduk usia produktif atau 15-65 tahun. Semua rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam lima kategori kerentanan berdasarkan proporsi tersebut. Kelompok pertama adalah kelompok rumah tangga sangat tidak rentan, yaitu rumah tangga yang memiliki kurang dari 1 persen anggota yang berumur 0-4 tahun dan di atas 65 tahun, yang termasuk kelompok umur rentan. Kelompok kedua yaitu rumah tangga tidak rentan yang terdiri dari 1-4 persen anggota dalam usia rentan. Kelompok ketiga adalah rumah tangga hampir rentan yang mempunyai 5-9 persen anggota dalam umur rentan. Kelompok keempat adalah rumah tangga rentan sebanyak 10-14 persen yang anggotanya berada dalam kategori umur rentan. Kelompok terakhir adalah rumah tangga sangat rentan meliputi rumah tangga yang mempunyai lebih dari 15 persen anggota dalam kelompok umur 0-4 tahun dan 65 tahun ke atas.

Berdasarkan kondisi kerentanan kependudukan yang diukur menggunakan parameter kelompok umur, penduduk di lokasi penelitian termasuk dalam kategori rentan. Hal ini ditunjukkan oleh

persentase ART yang berada dalam usia rentan (0-4 dan 65+) sebesar 12,04 persen (lihat Diagram 3.10). Perbandingan yang dilihat menurut lokasi tempat tinggal, menunjukkan rumah tangga di zona rawan dan rumah tangga di zona sedang dan jauh berada dalam kategori kerentanan yang sama meskipun proporsi penduduk rentan yang dimiliki kedua kelompok rumah tangga tersebut tidak sama besarnya. Proporsi penduduk rentan yang menjadi anggota rumah tangga zona rawan lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di rumah tangga zona sedang dan jauh, yaitu secara berturut-turut 12,78 persen dan 11,31 persen. Hal ini mengimplikasikan dalam upaya penanganan bencana kelompok rumah tangga di zona rawan harus memperoleh perhatian yang lebih besar daripada rumah tangga zona sedang dan jauh meskipun tidak terlalu mencolok.

**Diagram 3.10. Tingkat Kerentanan Kependudukan Rumah Tangga Responden Menurut Zona Tempat Tinggal, Kota Bengkulu, 2007**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Masuknya beberapa rumah tangga yang menjadi responden penelitian ke dalam kategori rentan, lebih disebabkan oleh besarnya proporsi rumah tangga yang mempunyai ART berusia balita daripada

ART yang berusia lanjut. Rumah tangga yang mempunyai anggota berusia balita mencapai 36,5 persen. Sebaliknya, hanya sekitar 10 persen rumah tangga memiliki ART lansia. Kerentanan kependudukan akibat pengaruh ART balita, kemungkinan besar dikarenakan struktur umur penduduk masih berada dalam usia produktif, sehingga angka kelahiran masih tergolong tinggi.

Uraian di atas menunjukkan tingkat kerentanan kependudukan di lokasi penelitian di Kota Bengkulu yang bervariasi menurut tiap-tiap parameter kerentanan. Beberapa rumah tangga yang menjadi responden penelitian termasuk kategori rentan menurut parameter usia ketergantungan (0-14 tahun dan  $\geq 65$  tahun) dan penguasaan keterampilan yang berkaitan dengan kondisi darurat bencana. Sebaliknya, beberapa rumah tangga tersebut tidak rentan berdasarkan parameter kondisi fisik, yang memerlukan pertolongan khusus, dan kemampuan membaca huruf latin serta berbahasa Indonesia. Jika diperhatikan lokasi rumah mereka, tingkat kerentanan antara responden yang tinggal di zona rawan dan yang tinggal di zona sedang dan jauh, menunjukkan perbedaan. Perbedaan yang sangat mencolok ditemukan pada parameter penguasaan keterampilan yang diperlukan dalam situasi bencana. Pada parameter lainnya, perbedaan antara rumah tangga di kedua zona ini tidak mencolok meskipun rumah tangga di zona rawan lebih rentan dibandingkan rumah tangga zona sedang dan jauh.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa rumah tangga di zona sedang dan jauh memerlukan perhatian yang lebih besar dalam upaya meminimalkan dampak bencana, salah satunya adalah memberdayakan mereka melalui pelatihan berbagai keterampilan yang diperlukan saat terjadi bencana. Dengan demikian, mereka dapat membantu menyelamatkan anggota keluarganya sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.





## **BAB IV**

### **KONDISI EKONOMI**

**K**ondisi perekonomian suatu daerah/wilayah dapat dipahami antara lain dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, serta angka kemiskinan. PDRB dan PDRB/kapita merupakan salah satu variabel utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat menggambarkan sektor-sektor mana yang memberi kontribusi besar/sedang/kecil terhadap PDRB total. Di tingkat rumah tangga, beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga adalah aspek kesejahteraan rumah tangga, yang dilihat dari besar pendapatan, status, dan kondisi tempat tinggal, kegiatan ekonomi rumah tangga dan sumber penghasilan serta kesinambungannya. Analisis tentang kondisi ekonomi di tingkat wilayah dan rumah tangga berikut ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga dalam wilayah Kota Bengkulu. Analisis ini dapat dipakai sebagai data dasar dalam penyusunan strategi/upaya mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga sesuai dengan kondisi wilayah setempat.

#### **4.1. KONDISI EKONOMI KOTA BENGKULU**

Deskripsi kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah dapat dipakai antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan pendapatan per kapita, dan struktur perekonomian. Dalam tulisan ini, uraian tentang kondisi ekonomi di Kota Bengkulu dilihat dari struktur perekonomian, yaitu PDRB dan

sumbangannya menurut sektor serta PDRB per kapita, pendapatan asli daerah, dan angka kemiskinan.

#### **4.1.1. Struktur Perekonomian**

Produk Domestik Regional Bruto digunakan bukan hanya untuk melihat struktur perekonomian tetapi juga untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Data PDRB menurut sektor pada Tabel 4.1 menunjukkan beberapa sektor yang terlihat menonjol dalam menyumbang PDRB Kota Bengkulu. Sektor perekonomian yang dominan sebagai penyumbang terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Di antara tiga sektor ini, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberi kontribusi kira-kira sepertiga dari total PDRB Kota Bengkulu, atau menempati urutan teratas. Pada tahun 2005, sumbangan sektor ini terhadap PDRB sedikit lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Namun, secara umum terlihat kecenderungan yang meningkat selama 2000-2005. Peningkatan yang terus-menerus dan tingginya peran sektor ini sebagai penyumbang PDRB tertinggi, terutama berasal dari sub-sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu mencapai 35,92 dari seluruh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (BPS dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006). Keadaan ini tidak terlepas dari peran Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi Bengkulu, sehingga pusat kegiatan perdagangan terpusat di kota ini yang tentunya dimanfaatkan penduduk dari kabupaten lain untuk melakukan aktivitas perdagangan di Kota Bengkulu.

Sektor jasa yang menyumbang sekitar seperlima total PDRB Kota Bengkulu dikarenakan kontribusi dari anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/POLRI yang cukup besar. Data menunjukkan pada tahun 2005, sekitar 12,5 persen dari sumbangan sektor jasa berasal dari sub-sektor pemerintahan umum dan pertahanan, sedangkan sub-sektor jasa dari swasta yang paling besar berasal dari jasa perorangan dan rumah tangga, yaitu 5,32 persen (BPS dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006, Tabel 4.1). Proporsi

sumbangan sektor jasa yang dilihat perkembangannya antara 2000-2005, cenderung menurun dengan lambat. Jika ditelusuri dari data yang tersedia, penurunan tersebut juga terjadi pada sub-sektor pemerintahan umum dan pertahanan. Keadaan ini menggambarkan sektor swasta menunjukkan perkembangan yang positif dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu meskipun masih dalam jumlah sangat kecil.

**Tabel 4.1. Struktur Perekonomian Kota Bengkulu, 2000-2005 (%)**

Sektor	2000	2001	2002	2003*	2004**	2005***
Pertanian	5,95	6,34	6,48	6,58	6,92	7,02
Pertambangan & Penggalian	0,72	0,70	0,68	0,6	0,64	0,65
Industri Pengolahan	4,56	4,43	4,32	4,43	4,35	4,45
Listrik dan Air Bersih	0,57	0,62	0,81	0,77	0,77	0,74
Bangunan	3,83	4,03	3,94	3,60	3,30	3,30
Perdagangan, Hotel, & Restoran	35,14	35,12	35,18	37,11	37,74	37,63
Pengangkutan & Komunikasi	17,48	17,91	18,20	16,77	16,43	17,59
Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	10,07	9,84	9,49	9,24	9,11	8,68
Jasa-jasa	21,69	21,02	20,91	20,85	20,74	19,94
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nilai (juta Rp)	1.234,8	1.411,8	1.646,0	1.911,2	2.159,3	2.677,5

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006: Tabel 1 dan 3

Catatan: \* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

\*\*\* angka sangat-sangat sementara

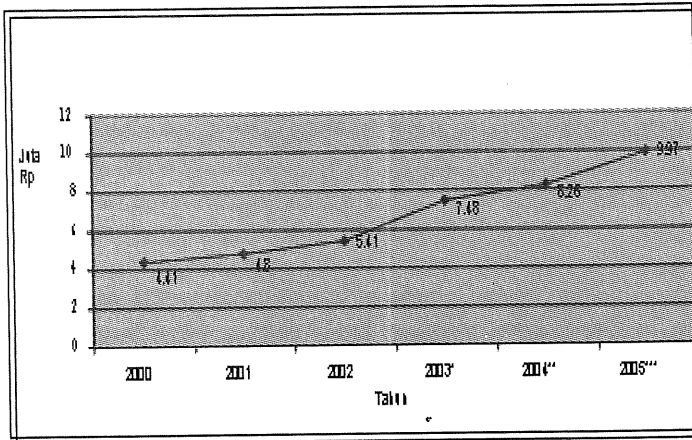
Sektor yang termasuk kontributor cukup besar dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap perekonomian Kota Bengkulu kembali meningkat, meskipun menunjukkan tren yang sedikit menurun antara 2003-2004 dan antara 2004-2005. Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh aktivitas

transportasi yang cukup lancar, terutama angkutan darat. Di dalam kota, aktivitas pengangkutan penumpang sangat tinggi untuk merespon kegiatan ekonomi dan non-ekonomi penduduk Kota Bengkulu yang cukup tinggi. Angkutan antar-kabupaten dan antar-provinsi, terutama jalur Lampung-Bengkulu-Sumatera Barat, juga melewati wilayah Kota Bengkulu, sehingga dapat memberi kontribusi terhadap perekonomian Bengkulu. Angkutan barang antar-provinsi pada umumnya menggunakan angkutan darat, meskipun di Kota Bengkulu terdapat satu pelabuhan laut dan satu bandar udara.

Laju pertumbuhan seluruh sektor pada tahun 2005 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih adalah tertinggi, yaitu 13,31 persen, meskipun kontribusinya terhadap PDRB hanya rendah (BPS dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006, Tabel 3). Sektor-sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,29 persen, sektor pertanian, sebesar 6,53 persen, dan jasa sebesar 5,57 persen. Apabila dikaitkan dengan sumbangan setiap sektor terhadap perekonomian daerah, hanya sektor pengangkutan dan komunikasi memberi kontribusi besar dengan angka pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB, hanya tumbuh sekitar 4,24 persen.

Perkembangan perekonomian Kota Bengkulu yang cukup baik juga ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PDRB per kapita selama 2004-2005 (Diagram 4.1). Pada tahun 2005, PDRB per kapita kira-kira sebesar 9,97 juta rupiah, atau meningkat sebanyak 17,19 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk Kota Bengkulu juga semakin membaik. Kenaikan angka PDRB per kapita pada 2002-2003 terlihat paling tinggi dengan angka pertumbuhan sekitar 27,6 persen. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh ketersediaan data yang belum pasti karena data tahun 2003 masih merupakan data sementara.

**Diagram 4.1. PDRB/kapita Kota Bengkulu, 2000-2005**



Sumber: BPS dan Bappeda Kota Bengkulu, 2006: Tabel 1 dan 3

Catatan: \* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

\*\*\* angka sangat-sangat sementara

### 4.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah pada umumnya besumber dari penerimaan pajak, restribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro (Masyarakat Transparansi Indonesia, 1999. <http://www.transparansi.or.id/otoda/sumber.html>).

Penerimaan PAD Kota Bengkulu secara keseluruhan pada tahun anggaran 2006 adalah 12.555.416.656,99 rupiah atau kira-kira 68,51 persen dari jumlah yang ditargetkan atau 18.326.769.000,00 rupiah (Perwakilan BPK-RI di Palembang, 2006). Rendahnya

realisasi penerimaan PAD merupakan kontribusi dari kecilnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan tidak ada penerimaan dari laba BUMD yang ditargetkan sebesar 275.000.000 rupiah. Data menunjukkan realisasi penerimaan dari dua sumber PAD adalah 61,29 persen dan 52,68 persen, yang masing-masing untuk pos pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi yang tinggi, bahkan melebihi target yang ditentukan, adalah dari pos lain-lain PAD yang sah, yaitu mencapai 141,48 persen. Data ini menggambarkan pendapatan asli daerah yang seharusnya dapat diterima dalam jumlah besar dari pos pajak dan retribusi daerah tetapi hanya dapat direalisasikan separuhnya. Besarnya PAD Kota Bengkulu secara lebih rinci menurut sumbernya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, 2006**

Sumber	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
Pajak Daerah	8.455.000.000,00	5.182.008.327,00	61,29
Retribusi Daerah	6.986.769.000,00	3.680.638.799,79	52,68
Bagian Laba BUMD	275.000.000,00	-	-
Lain-lain PAD yang sah	2.610.000.000,00	3.692.769.530,20	141,48
Jumlah	18.326.769.000,00	12.555.416.656,99	68,51

Sumber: Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan-RI di Palembang, 2006: 10  
[http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006i/apbd/081\\_LKD\\_Kota\\_Bengkulu.pdf](http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006i/apbd/081_LKD_Kota_Bengkulu.pdf)

#### 4.1.3. Kondisi Kemiskinan

Sejalan dengan semakin beragamnya bencana alam, baik jenis maupun skala bencana, isu kemiskinan juga semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bencana alam dapat menimbulkan dampak cukup parah terhadap kemiskinan dan berbagai prospek pembangunan. Bencana alam dapat mengganggu berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.

Sebaliknya, penduduk yang hidup dalam kemiskinan umumnya lebih rentan terhadap dampak bencana alam, terutama karena kemiskinan menyebabkan penduduk menempati daerah yang rawan bencana. Dalam konteks gempa bumi misalnya, penduduk miskin yang tinggal di daerah rawan gempa bumi cenderung lebih rentan daripada mereka yang relatif lebih sejahtera yang tinggal di daerah yang sama, karena penduduk miskin pada umumnya tidak mampu membangun tempat tinggal dengan konstruksi yang aman terhadap gempa. Deskripsi kondisi kemiskinan pada bagian ini adalah melihat situasi kemiskinan di tingkat wilayah administrasi kota yang dapat menggambarkan kerentanan masyarakat. Lebih dari itu, data/informasi kemiskinan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar untuk upaya mitigasi bencana alam yang memperhatikan kondisi ekonomi penduduk.

Kemiskinan sering diartikan keadaan yang berhubungan dengan kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian ini mencerminkan persoalan kemiskinan mencakup dimensi yang luas, bukan hanya aspek materi/ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan dalam konteks yang luas termasuk aspek politik. Oleh karena itu, konsep dan ukuran kemiskinan juga beragam. Badan Pusat Statistik mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin melalui cara penentuan garis kemiskinan yang mendasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan dan bukan makanan yang sangat mendasar. Data yang dihasilkan dari hasil perhitungan adalah data kemiskinan absolut yang disajikan dalam angka mutlak dan persentase. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS tersebut, diketahui angka kemiskinan di Kota Bengkulu pada tahun 2004 hanya sebesar 10,11 persen (BPS, 2004:10). Angka ini kurang lebih hanya separuhnya daripada angka kemiskinan di tingkat provinsi yang sebesar 22,39 persen. Angka kemiskinan di Kota Bengkulu tersebut paling rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, misalnya Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 33,45 persen dan Kabupaten Utara sebesar 23,91 persen, serta Rejang Lebong sebesar 17,87 persen. Keadaan ini mudah dipahami karena di Kota Bengkulu terdapat kesempatan kerja/usaha yang lebih luas dibandingkan dengan daerah lainnya,

sehingga memfasilitasi penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan bukan makanan, yang merupakan indikator untuk mengelompokkan penduduk dalam kategori miskin/tidak miskin. Dalam konteks bencana alam, angka kemiskinan yang sangat rendah mencerminkan hanya sedikit penduduk Kota Bengkulu yang rentan menghadapi bencana alam karena faktor kemiskinan.

Persentase rumah tangga miskin menurut data BKKBN termasuk tinggi, yaitu sebanyak 15.984 keluarga pada tahun 2006 atau kira-kira 29,56 persen, meskipun persentase penduduk miskin menurut versi BPS adalah rendah (BKKBN Kota Bengkulu, 2007). Disamping menentukan data keluarga miskin, BKKBN juga mengklasifikasikan keluarga menjadi beberapa tahapan, yakni keluarga Pra-Sejahtera (PKS), Keluarga Sejahtera (KS) I, KS II, KS III, dan KS III plus. Berdasarkan klasifikasi tersebut, keluarga PKS dan KS I dikategorikan sebagai keluarga miskin. Data menunjukkan angka 16.726 atau 30,94 persen pada tahun 2006 yang menggambarkan perlunya prioritas penanganan kemiskinan dalam program pembangunan. Upaya mengatasi persoalan kemiskinan bukan hanya berdampak pada membaiknya kondisi ekonomi penduduk, tetapi juga dapat mengurangi risiko ancaman terhadap bencana. Banyaknya penduduk miskin di Kota Bengkulu yang tinggal di wilayah pesisir pantai, yang umumnya rawan bencana alam, misalnya tsunami, gelombang pasang, dan banjir, dengan bangunan tempat tinggal yang secara teknis kurang aman jika terjadi gempa bumi, mengindikasikan mereka sangat rawan terhadap ancaman bahaya bencana alam.

Keluarga miskin di Kota Bengkulu menyebar di semua kecamatan (lihat Lampiran Tabel 1). Kecamatan Ratu Agung yang merupakan lokasi survei memiliki 2.982 keluarga miskin menurut versi BKKBN, atau 34,52 persen dari total keluarga di kecamatan ini. Angka ini lebih tinggi dari angka di tingkat kota, bahkan termasuk tingkat terendah ketiga. Persoalan kemiskinan di Kecamatan Ratu Agung tampaknya berhubungan dengan cukup banyaknya pendatang untuk bekerja di berbagai lapangan pekerjaan, terutama pekerja



bangunan dan perdagangan, dengan kondisi perekonomian yang kurang baik. Mereka pada umumnya tinggal di rumah-rumah kontrak/sewa berukuran sempit, sehingga kemungkinan besar mereka diklasifikasikan sebagai keluarga miskin. Namun, sebagian kecil dari mereka mungkin mempunyai rumah dan kebun di daerah asalnya, yakni mereka yang berasal dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.

Sebagian keluarga miskin di Kecamatan Ratu Agung tinggal di Kelurahan Tanah Patah. Urutan persentase keluarga miskin di Kelurahan Tanah Patah adalah pada urutan kedua teratas, yang sangat berbeda dengan posisi urutan persentase keluarga miskin di tingkat kecamatan yang berada di posisi ketiga terbawah dari seluruh kecamatan di Kota Bengkulu (lihat Lampiran Tabel 2). Keluarga miskin di Kelurahan Tanah Patah pada umumnya tinggal di wilayah pesisir pantai yang sering terkena bencana banjir pada musim hujan, bahkan juga berisiko tinggi terhadap ancaman gelombang pasang dan tsunami. Sedangkan daerah tengah wilayah kelurahan ini cenderung ditempati penduduk dengan kondisi ekonomi mampu atau tidak miskin. Kenyataan ini mengindikasikan persoalan kemiskinan sangat berkaitan dengan risiko bencana, terutama gelombang pasang dan tsunami, meskipun persentase penduduk miskin di Kelurahan Tanah Patah lebih rendah daripada angka di kelurahan lain,.

## **4.2. EKONOMI RUMAH TANGGA**

Kegiatan ekonomi, pekerjaan/mata pencaharian, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal, yang diuraikan dalam bagian ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga yang sekaligus juga dapat dipakai untuk mengetahui keadaan kerentanan ekonomi rumah tangga. Sebagai contoh, rumah tangga yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan di sektor informal yang umumnya mempunyai pendapatan yang tidak menentu atau tidak berkesinambungan, cenderung berada dalam kondisi rentan ekonomi maupun rentan terhadap dampak bencana alam. Demikian pula rumah tangga/keluarga yang menempati rumah bukan milik sendiri atau

rumah sewa atau kontrak, yang umumnya terbuat dari bahan-bahan bangunan berkualitas rendah di lokasi yang padat terutama di perkotaan, cenderung lebih rentan dibandingkan mereka yang tinggal di rumah sendiri dengan bangunan yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas baik dan tahan terhadap bencana alam. Pembahasan kondisi ekonomi di tingkat rumah tangga dalam tulisan ini didasarkan pada data hasil survei 'Kondisi Sosial-Ekonomi Rumah Tangga' yang dilakukan pada 200 rumah tangga di Kota Bengkulu, dengan mengambil lokasi di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung.

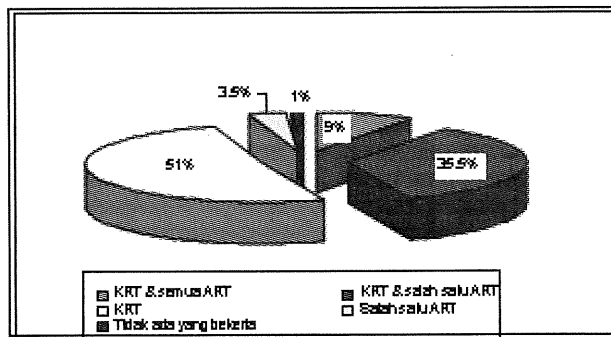
#### **4.2.1. Mata Pencaharian**

Seperti kondisi di daerah perkotaan lainnya, sektor informal merupakan sumber mata pencaharian penduduk, terutama mereka yang berpendidikan rendah dan menengah. Hal ini dikarenakan sektor informal merupakan sektor yang fleksibel dalam menyerap tenaga kerja. Memasuki sektor ini tidak diperlukan persyaratan sebagaimana untuk dapat bekerja di sektor formal. Kondisi ini juga terjadi di Kota Bengkulu, meskipun sektor formal, terutama sub-sektor jasa kemasyarakatan, yaitu PNS, merupakan sumber mata pencaharian penting bagi mereka yang memiliki pendidikan menengah ke atas. Pentingnya peran sektor informal sebagai sumber mata pencaharian penduduk di Kota Bengkulu kemungkinan besar berkaitan dengan ketersediaan kesempatan kerja yang dapat menampung pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan menengah, seperti di sektor perdagangan, bangunan/konstruksi, dan jasa, terutama sub-sektor jasa perorangan. Pekerjaan di sektor informal juga menjadi andalan sumber mata pencaharian bagi kebanyakan rumah tangga yang menjadi sampel penelitian di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Namun, sebelum pekerjaan rumah tangga sampel dibahas, bagian ini menyajikan pembahasan tentang kegiatan ekonomi ART responden.

Hasil survei menunjukkan terdapat dua rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan ekonomi bekerja, yang dilakukan ART atau

KRT. Kira-kira separuh rumah tangga yang mempunyai kegiatan ekonomi bekerja hanya dilakukan KRT sebesar 51 persen, sedangkan sepertiganya sebesar 35,5 persen memiliki kegiatan ekonomi bekerja, yang terdiri dari KRT dan salah satu ART (lihat Diagram 4.2). Selebihnya dilakukan KRT dan semua ART, yaitu kelompok yang KRT dan lebih dari satu ART memiliki kegiatan ekonomi bekerja. Data ini sekaligus juga menggambarkan kebanyakan rumah tangga responden hanya memiliki satu orang yang memiliki sumber mata pencaharian. Lebih lanjut, hasil survei menemukan rumah tangga responden yang memiliki ART bekerja lebih dari dua orang, walaupun jumlah dan persentasenya kecil (kelompok KRT dan semua ART digambarkan pada Diagram 4.2). Temuan ini mencerminkan kecenderungan kepala rumah tangga yang masih merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Dalam konteks lokasi penelitian, keadaan ini kemungkinan besar dikarenakan faktor struktur umur, artinya sebagian besar ART pada rumah tangga sampel kebanyakan dalam kelompok umur muda. Data umur KRT memperlihatkan lebih dari separuh KRT berumur 40 tahun ke bawah, sehingga diperkirakan sebagian besar anak-anak mereka masih berada di bangku sekolah.

**Diagram 4.2. Distribusi Persentase Rumah Tangga Responden Berdasarkan Status Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Tingginya persentase rumah tangga yang hanya memiliki satu orang KRT saja atau salah satu ART saja yang bekerja, memberikan gambaran kerentanan ekonomi pada kebanyakan rumah tangga sampel, karena mayoritas dari mereka bekerja tidak menentu dilihat dari jam kerja maupun pendapatan yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, pekerjaan tersebut dimasukkan ke dalam sektor informal. Pengertian ini berbeda dengan konsep sektor informal yang biasa digunakan di tingkat nasional, yaitu menggunakan variabel status pekerjaan atau kombinasi antara status pekerjaan dan jenis pekerjaan. Merujuk pada pengertian sektor informal yang digunakan dalam kajian ini, jenis pekerjaan sebagai tenaga jasa perorangan yang mendapat gaji/upah tetap dan diperoleh sepanjang tahun secara terus-menerus, seperti tukang cuci, pembantu rumah tangga, dikategorikan sebagai pekerja di sektor formal.

Survei terhadap 198 rumah tangga yang mempunyai ART bekerja di Kelurahan Tanah Patah menemukan hanya 25,3 persen anggota rumah tangga responden yang bekerja pada jenis pekerjaan dengan jam kerja teratur dan pendapatan tetap/ berkesinambungan, atau disebut sektor formal. Termasuk kelompok ini adalah mereka yang bekerja pada sektor pemerintahan, sebagai PNS, dan karyawan pada perusahaan swasta, serta sebagian kecil lainnya sebagai buruh tetap yang mendapat upah bulanan pada perorangan, seperti buruh bengkel milik perusahaan, tenaga penjualan milik perorangan, dan pembantu rumah tangga.

KRT dan ART yang bekerja di sektor informal yang mencapai sekitar tiga per empat dari keseluruhan rumah tangga responden, pada umumnya bekerja sebagai kuli pada sektor konstruksi, pedagang keliling, tenaga penjualan di warung/kedai di rumah, pemulung, penjahit, tenaga jasa perbengkelan, dan petani sayuran. Sedangkan pekerjaan di sektor formal, yaitu pekerjaan dengan jam kerja dan pendapatan teratur, cenderung didominasi pekerjaan sebagai karyawan swasta dan pegawai negeri sipil. Pengamatan dan wawancara yang mendalam dengan beberapa narasumber dari masyarakat maupun institusi pemerintah kantor kelurahan dan kecamatan, diketahui pekerjaan di sektor informal pada

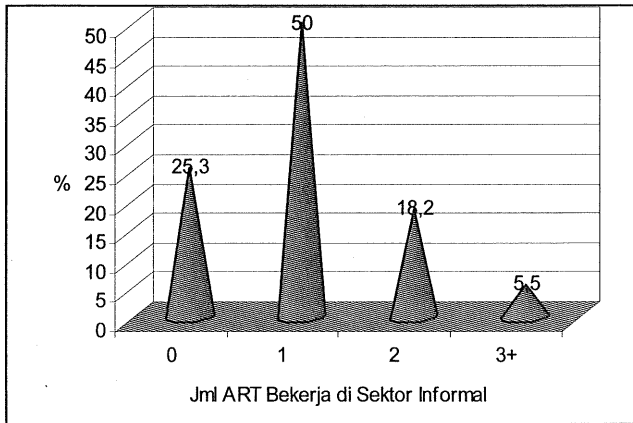
umumnya dilakukan ART dan KRT sampel yang tinggal di wilayah pesisir Kelurahan Tanah Patah, dan dalam konteks yang lebih luas juga di Kelurahan Lempuing. Mereka umumnya bekerja pada lapangan usaha bidang bangunan dan perdagangan, serta sebagian kecil lainnya di sektor pertanian terutama tanaman sayur. Pekerjaan sebagai petani sayur pada umumnya dilakukan rumah tangga yang memanfaatkan lahan tidur milik pihak lain, meskipun hanya dapat dilakukan pada musim kering karena pada musim hujan lahan tersebut terendam air.

Jumlah orang yang bekerja di sektor informal dapat dilihat pada Diagram 4.3, yang menunjukkan kira-kira seperempat rumah tangga atau 25,3 persen, tidak ada yang bekerja di sektor informal. Sedangkan persentase tertinggi adalah rumah tangga yang hanya mempunyai satu orang bekerja di sektor informal. Rumah tangga dengan satu orang pekerja di sektor informal ini pada umumnya dilakukan KRT dan hanya sebagian kecil dilakukan ART (Diagram 4.4.). Banyaknya rumah tangga yang memiliki sumber mata pencaharian di sektor informal dengan pekerja terbanyak hanya terdiri satu orang per rumah tangga, menunjukkan keadaan ekonomi kebanyakan rumah tangga responden tergolong kategori ekonomi lemah. Lebih lanjut, Diagram 4.3. memperlihatkan cukup banyaknya rumah tangga responden yang memiliki mata pencaharian di sektor informal dengan jumlah pekerja dua orang atau lebih, yang hampir mencapai seperempat dari jumlah responden. Tercakup dalam kelompok ini adalah rumah tangga yang KRT dan pasangannya yang umumnya berstatus istri, dan/anak yang semuanya bekerja di sektor informal. Pekerjaan di sektor informal yang dilakukan antara KRT dan ART pada umumnya berbeda dalam hal jenis pekerjaan, misalnya KRT sebagai kuli bangunan, istri sebagai petani sayur/penjual makanan/tukang cuci. Rumah tangga seperti ini juga cenderung rentan ekonomi, meskipun rumah tangga yang mempunyai pekerja di sektor informal berjumlah dua orang atau lebih. Hal ini dikarenakan pekerjaan di sektor informal yang mereka lakukan pada umumnya hanya memberikan penghasilan yang rendah dan diperoleh secara tidak teratur. Informasi kualitatif yang diperoleh dari salah seorang

Ketua RT di Kelurahan Tanah Patah menggambarkan kerentanan ekonomi pekerja sektor informal yang merupakan kelompok terbanyak di lingkungan RT tersebut.

“.....gaji dari proyek (kuli bangunan yang diberikan setiap hari Sabtu) paling cukup untuk satu minggu makan dan hanya bisa untuk bertahan hidup. Sebagian teman bahkan sulit untuk makan. Biasanya mereka pinjam dulu ke warung, Sabtu baru mereka bayar setelah dapat upah dari proyek.”

**Diagram 4.3. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Jumlah ART yang Bekerja di Sektor Informal (%)**

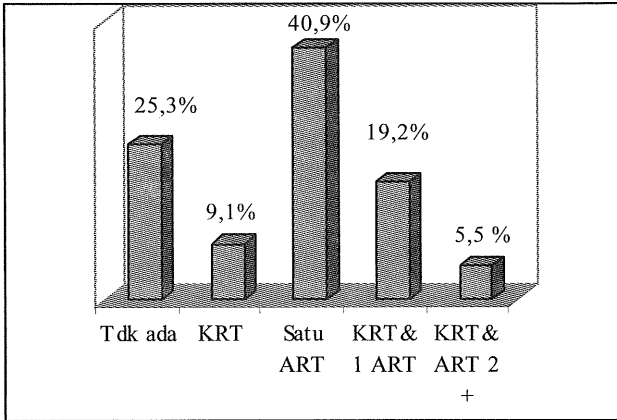


Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Kerentanan ekonomi dilihat dari mata pencaharian yang dikategorikan sebagai sektor informal juga dialami mereka yang berstatus sebagai pedagang keliling. Jenis barang dagangan umumnya berupa makanan, antara lain es, bakso mi pangsit, dan jamu gendong, dengan skala usaha sangat kecil menunjukkan keuntungan yang diperoleh rendah. Sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk

kebutuhan konsumsi, sehingga kebutuhan dasar lainnya tidak dapat terpenuhi. Di antara mereka jarang dapat menempati rumah tinggal yang secara teknis aman terhadap gempa bumi.

**Diagram 4.4. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Status KRT dan/atau ART yang Bekerja di Sektor Informal (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Sesuai dengan sifat pekerjaan di sektor informal yang umumnya tidak teratur dilihat dari jam kerja dan pendapatan, pekerjaan pada sektor ini juga cenderung dilakukan di lokasi/tempat kerja yang tidak menentu pula. Kuli bangunan dan pedagang makanan-minuman yang dilakukan oleh cukup banyak rumah tangga responden di Kelurahan Tanah Patah adalah beberapa jenis pekerjaan sektor informal yang lokasi kerjanya tidak menentu. Demikian pula lokasi tempat kerja pemulung dan sopir angkutan kota juga tidak menentu. Sedangkan petani sayur, tukang cuci pada rumah tangga lain, berjualan di warung, dan usaha bengkel, mempunyai tempat kerja menetap. Oleh karena itu, mudah dimengerti jika ART yang tempat kerjanya selalu dekat dengan pantai (< 500 meter) hanya 28,3

persen dari seluruh rumah tangga sampel. Di antara mereka yang bekerja dengan lokasi tempat kerja tidak menentu, yang terkadang dekat/jauh dari pantai, adalah pekerja di rumah tangga sampel sebesar 4,3 persen dari 316 individu. Dengan demikian, tempat kerja untuk kebanyakan ART pada rumah tangga sampel adalah jauh dari pantai ( $\geq 500$  meter), yang berarti mereka berisiko kecil terhadap dampak tsunami, apalagi topografi wilayah di Kelurahan Tanah Patah adalah datar/landai di wilayah pesisir dan sedikit bergelombang pada wilayah yang jauh dari garis pantai. Mereka yang bekerja jauh dari pantai bukan hanya mereka yang bekerja di sub-sektor jasa pemerintahan, dengan lokasi kantor pemerintah kebanyakan berada di pusat kota, dan sektor usaha/pekerjaan lain milik PT/CV dan perseorangan yang lokasi tempat usaha menetap jauh dari pantai.

#### **4.2.2. Sumber Penghasilan Rumah Tangga**

Sumber penghasilan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi ekonomi penduduk. Sumber penghasilan yang dicakup dalam tulisan ini tidak hanya diperoleh dari suatu pekerjaan/usaha yang dilakukan anggota rumah tangga, tetapi juga mencakup penerimaan pendapatan, misalnya pensiun dan kiriman/pemberian dari keluarga/pihak lain di luar rumah tangga. Analisis sumber penghasilan dimaksudkan untuk mengetahui kecukupan dan kesinambungan penghasilan yang diperoleh rumah tangga, yang selanjutnya berdampak pada kondisi kerentanan ekonomi rumah tangga.

Data sumber penghasilan rumah tangga menunjukkan hampir dua per tiga rumah tangga responden memiliki satu sumber lapangan pekerjaan, yaitu 64,5 persen. Sebaliknya, sangat sedikit rumah tangga dengan sumber penghasilan berjumlah tiga atau lebih, yaitu 4,5 persen. Sisanya adalah rumah tangga dengan sumber penghasilan dari dua lapangan pekerjaan, yaitu 31,0 persen. Mereka yang memiliki satu sumber penghasilan mungkin dikarenakan kebanyakan rumah tangga juga hanya memiliki satu orang yang bekerja (lihat Bagian 4.2.1). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan rumah

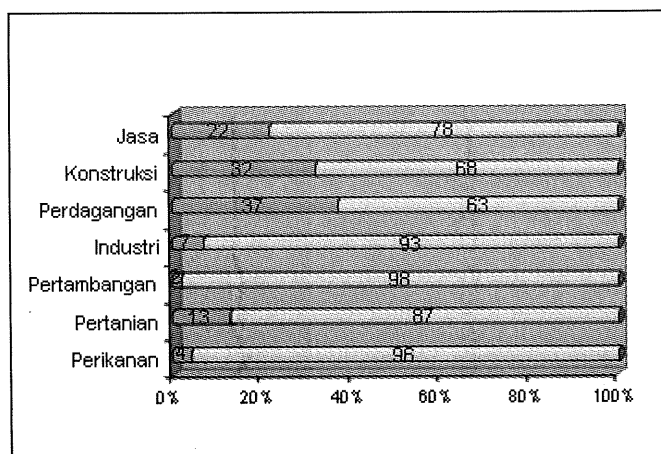


tangga yang mempunyai sumber penghasilan dari satu lapangan pekerjaan juga mempunyai lebih dari satu orang pekerja, artinya dalam satu rumah tangga terdapat dua orang atau lebih yang bekerja pada lapangan pekerjaan yang sama, misalnya KRT/ART yang sama-sama bekerja di sektor jasa pemerintahan, KRT dan ART yang keduanya bekerja di sektor perdagangan. Dengan demikian, jumlah sumber penghasilan yang dilihat dari lapangan pekerjaan, tidak selalu menunjukkan indikasi keadaan ekonomi rumah tangga, artinya semakin banyak jumlah sumber penghasilan tidak menjamin rumah tangga tersebut memiliki kondisi ekonomi yang semakin baik, terutama dilihat dari besarnya pendapatan. Masih ada faktor lain yang berpengaruh adalah jumlah ART yang bekerja pada sektor yang sama, status pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, rumah tangga dengan dua orang pekerja di sektor jasa pemerintahan, pada jenis pekerjaan sebagai tenaga administrasi dan kepemimpinan, cenderung memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga dengan tiga orang pekerja yang bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian, dengan jenis pekerjaan petani sayur, perdagangan, misalnya pedagang makanan keliling, dan lapangan usaha bangunan sebagai kuli bangunan. Dengan demikian, penggunaan indikator jumlah sumber penghasilan yang hanya didasarkan pada lapangan pekerjaan untuk melihat kerentanan ekonomi rumah tangga, memberikan gambaran yang kurang tepat jika tanpa dikontrol dengan jumlah orang yang bekerja dalam setiap sumber penghasilan.

Telah dikemukakan pada Bagian 4.2, terdapat cukup banyak rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Keadaan ini sejalan dengan data lapangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, yang persentase tertinggi pertama dan kedua adalah rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari sektor perdagangan dan bangunan/konstruksi (Diagram 4.5). Banyaknya rumah tangga yang memperoleh penghasilan dari dua lapangan pekerjaan dikarenakan pasar kerja di sektor perdagangan dan konstruksi menyediakan kesempatan kerja/usaha yang cukup luas dan cenderung mudah dimasuki oleh tenaga kerja berpendidikan rendah sekalipun.

Di wilayah pesisir Kelurahan Tanah Patah dan sekitarnya merupakan daerah wisata pantai dengan lingkungan permukiman yang padat, sehingga akses terhadap kegiatan usaha perdagangan keliling maupun menetap, termasuk usaha warung di rumah, terbuka cukup luas. Berbagai jenis barang dagangan diperjual-belikan, tetapi terlihat perbedaan antara usaha perdagangan yang dilakukan dengan cara berkeliling dan menetap. Pedagang keliling pada umumnya menjual makanan-minuman dan rokok, sedangkan pedagang menetap, termasuk took, lebih bervariasi dilihat dari jenis barang dagangannya, misalnya barang kebutuhan sehari-hari, makanan-minuman, bahkan juga pakaian. Namun, usaha perdagangan yang berupa warung/kedai yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari dalam skala kecil dan usaha dagang keliling, cenderung lebih dominan daripada usaha perdagangan skala menengah, seperti toko. Keadaan ini kemungkinan besar dikarenakan lapangan pekerjaan ini mudah dilakukan oleh siapa pun yang mempunyai motivasi usaha, tidak memerlukan keterampilan khusus, dan tidak memerlukan modal yang besar karena pada umumnya masih berskala kecil.

**Diagram 4.5. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Lapangan Pekerjaan (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa lapangan pekerjaan yang berperan penting sebagai sumber penghasilan bagi rumah tangga responden di Kelurahan Tanah Patah adalah perdagangan, dan juga sektor bangunan/konstruksi. Mereka yang bekerja di sektor bangunan/konstruksi adalah kebanyakan pendatang dari Jawa yang sudah lama menetap di Kota Bengkulu, sedangkan sebagian lainnya pendatang asal kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Di Kelurahan Tanah Patah, mereka cenderung tinggal mengelompok di lingkungan permukiman di wilayah pesisir karena kemungkinan besar harga sewa tempat tinggal/rumah petak/*bedeng* di daerah ini cukup terjangkau, padahal lokasinya tidak jauh dari pusat kota. Beberapa dari mereka sudah memiliki rumah sendiri, seperti terlihat di salah satu RW yang kebanyakan penduduknya adalah pendatang asal Jawa dengan spesialisasi keterampilan dan pekerjaan di sektor konstruksi, baik sebagai mandor maupun kuli/kernet. Pekerjaan sebagai tukang atau kuli bangunan ini dilakukan tidak hanya pada pekerjaan proyek konstruksi milik pemerintah dan swasta, seperti jalan, gedung perkantoran/rumah toko, mal, tetapi juga pada perseorangan. Pekerjaan sebagai kuli/kernet bangunan cenderung dilakukan atas ajakan mandor, yang biasanya juga mempunyai keahlian sebagai tukang, yang sudah dikenal sebelumnya. Mandor biasanya mengajak kuli yang tinggal dalam satu lingkungan tempat tinggal, satu daerah asal, tetapi ada pula yang dikenal pada saat kuli/kernet meminta pekerjaan di lokasi/tempat kerja.

Lapangan pekerjaan ketiga yang paling banyak menjadi sumber penghasilan penduduk adalah sektor jasa, terutama jasa pemerintahan/kemasyarakatan. Hasil survei secara lebih rinci memperlihatkan sumber penghasilan dari lapangan pekerjaan ini adalah pekerjaan sebagai PNS di berbagai dinas di Pemerintah Kota Bengkulu, dan sebagian kecil lainnya adalah guru serta PNS di luar Kota Bengkulu. Sub-sektor jasa perseorangan menurut standar nasional dan internasional dimasukkan dalam sektor jasa, tetapi dalam penelitian ini dimasukkan dalam kategori lapangan pekerjaan lainnya. Pemisahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sub-sektor jasa perseorangan termasuk dalam lapangan pekerjaan yang rentan

ekonomi dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, seperti pembantu rumah tangga, tukang cuci pakaian, tukang jahit, pekerja salon, pekerja pada usaha percetakan, dan buruh serabutan yang tidak terikat pada orang lain. Beberapa pekerjaan ini cukup banyak dilakukan KRT/ART pada rumah tangga responden, sehingga mudah dimengerti persentase rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari lapangan pekerjaan lain mencapai seperlima dari seluruh rumah tangga responden.

Beberapa lapangan pekerjaan bukan menjadi sumber penghasilan penting bagi rumah tangga responden, yaitu lapangan pekerjaan pertambangan, perikanan, dan industri. Kawasan wilayah Kelurahan Tanah Patah bukan merupakan wilayah tangkap (*fishing ground*) tetapi dikembangkan sebagai kawasan wisata, karena di kelurahan ini terdapat kawasan pesisir pantai. Sumber penghasilan dari lapangan pekerjaan perikanan biasanya diperoleh sebagai anak buah kapal (ABK) yang menangkap ikan di kawasan perairan laut di luar Kelurahan Tanah Patah, bahkan di luar Kota Bengkulu. Sedangkan rendahnya persentase rumah tangga dengan sumber penghasilan di sektor pertambangan dapat dijelaskan karena akses pekerjaan pada sektor ini tidak tersedia di Kota Bengkulu. Sektor industri hanya menjadi tumpuan sumber penghasilan bagi rumah tangga sebanyak 7 persen. Hal ini menggambarkan sektor ini belum banyak berkembang. Padahal potensi sektor industri rumah tangga, terutama bidang pengolahan makanan, cukup besar. Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam, usaha pembuatan kue dan jenis makanan lain yang dilakukan oleh beberapa rumah tangga dapat menambah penghasilan rumah tangga bersangkutan. Dikemukakan pula bahwa pemasaran cukup mudah, yaitu kepada tetangga dan kenalan, yang mungkin usaha ini masih dalam skala usaha kecil.

Kenyataan cukup banyaknya rumah tangga responden mempunyai sumber penghasilan dari sub-sektor perdagangan eceran, yaitu sebagai pedagang kakilima, baik keliling maupun menetap, dan dari sektor bangunan yang umumnya sebagai tenaga kuli/kernet, maka mudah dipahami jika terdapat cukup banyak rumah tangga yang mengatakan bahwa pendapatan mereka kurang berkesinambungan,

artinya pendapatan tidak dapat diperoleh terus-menerus sepanjang tahun. Sebagai contoh, pendapatan rumah tangga dari pekerjaan sebagai kuli/kernet sangat tergantung pada ada/tidaknya pembangunan fisik, misalnya jalan, perkantoran, perumahan, pertokoan, atau permintaan perseorangan untuk membangun/merenovasi rumah tinggal. Dengan kata lain, pekerjaan sebagai kuli/kernet bangunan tidak selalu ada, terkadang mereka menganggur beberapa hari bahkan sering sampai hitungan bulan. Tabel 4.3 dengan jelas memperlihatkan, di antara rumah tangga yang bekerja di sektor bangunan, hampir empat per lima mengatakan penghasilan dari lapangan pekerjaan bangunan tidak dapat memberikan penghasilan yang terus-menerus sepanjang tahun. Hampir dapat dipastikan kelompok ini adalah kuli/kernet bangunan yang banyak ditemukan di wilayah pantai di Kelurahan Tanah Patah. Rumah tangga dengan penghasilan yang berkesinambungan dari sektor ini yang kira-kira hanya seperlima dari jumlah rumah tangga responden, kemungkinan terdiri dari mereka yang berprofesi sebagai mandor bangunan yang berstatus sebagai karyawan pada sebuah perusahaan konstruksi dan mandor lepas yang sering mendapat pekerjaan borongan dari perusahaan maupun perseorangan.

**Tabel 4.3. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kesinambungan Sumber Penghasilan yang Dilihat dari Lapangan Pekerjaan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%)**

Lapangan Pekerjaan	Ya	Tidak	n
Perikanan	(4)	(4)	8
Pertanian	50,0	50,0	26
Pertambangan	(4)	(0)	4
Industri	71,4	(4)	14
Perdagangan	54,0	46,0	74
Bangunan/Konstruksi	21,9	78,1	64
Jasa Kemasyarakatan	95,5	4,5	44
Lainnya	51,2	48,9	41

Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Catatan: ( ) angka mutlak, n<5

Sektor perdagangan tampaknya lebih menjamin untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan rumah tangga secara berkesinambungan daripada sektor bangunan. Survei menemukan, persentase rumah tangga responden yang memperoleh sumber penghasilan secara terus-menerus dari lapangan pekerjaan perdagangan mencapai dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan mereka yang sumber penghasilannya berkesinambungan dari sektor bangunan. Terlepas dari besarnya pendapatan yang diperoleh dari usaha penjualan yang umumnya berskala kecil, tampaknya usaha perdagangan dapat memberikan penghasilan rumah tangga responden secara terus-menerus sepanjang tahun. Keadaan ini kemungkinan besar terjadi karena jenis barang yang dijual merupakan barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan jenis kebutuhan harian lainnya dari jenis non-makanan. Faktor jenis barang yang dijual dan juga faktor pengelolaan usaha yang baik, berpengaruh terhadap kesinambungan usaha perdagangan. Sebagai contoh, pemilik warung/kedai untuk menjaga perputaran modal biasanya memiliki strategi meminjamkan barang dagangan kepada pembeli dengan batas tertentu, yang biasanya diberikan kepada mereka yang mempunyai pekerjaan walau pekerjaan tersebut dilakukan secara tidak teratur, seperti kernet/kuli bangunan, pedagang makanan keliling, dan buruh cuci.

Pola yang mirip dengan lapangan pekerjaan perdagangan adalah sektor pada kategori lain-lain, yang menunjukkan persentase rumah tangga mendapat penghasilan secara berkesinambungan kira-kira separuhnya dari 41 rumah tangga yang bekerja di sektor ini. Pekerjaan dengan penghasilan terus-menerus dan teratur setiap bulan ditemukan antara lain pada rumah tangga yang paling tidak ada salah satu ART melakukan pekerjaan di sub-sektor jasa perorangan, misalnya buruh cuci dan pembantu rumah tangga, dengan mendapat upah secara bulanan.

Lapangan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan rumah tangga secara teratur dan berkesinambungan adalah sektor jasa kemasyarakatan. Keadaan ini mudah dipahami karena mayoritas rumah tangga dengan sumber penghasilan dari sektor ini adalah PNS,

yang bekerja di berbagai dinas di bawah Pemkot dan Pemprov Bengkulu, guru, dan bahkan pada dinas di Pemerintah Kabupaten lain di wilayah Provinsi Bengkulu. Sebagian kecil rumah tangga yang bersumber penghasilan dari sektor ini tetapi tidak memberikan penghasilan secara berkesinambungan adalah kemungkinan rumah tangga yang bekerja pada perseorangan yang mempunyai usaha di bidang pelayanan jasa kemasyarakatan, seperti buruh bengkel, pekerja salon, dan tukang jahit.

Meskipun jumlahnya tidak banyak, separuh rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan di sektor pertanian juga menyatakan berpenghasilan yang berkesinambungan. Dikatakan berkesinambungan karena mereka dapat menanam beberapa jenis sayuran, seperti bayam, sawi, kangkung, daun bawang, dan kacang panjang, secara terus-menerus sepanjang tahun, meskipun pada musim hujan agak terganggu yang berakibat pada berkurangnya hasil panen. Pada saat musim kemarau, mereka tetap dapat menanam sayur dengan cara menyiram tanaman setiap hari dengan sumber air dari sumur gali yang mereka buat sendiri. Masa tanam hingga panen sekitar 18 hari, sehingga penjualan hasil panen sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan ini sangat berbeda dengan petani sayur di wilayah pesisir pantai, terutama di RT 12, 13, dan 14. Kegiatan penanaman sayur tidak bisa dilakukan terus-menerus karena terpengaruh air pasang dari laut dan banjir jika hujan. Dengan kata lain, hasil dari usaha pertanian sayur ini tidak dapat memberikan penghasilan pada rumah tangga di beberapa RW tersebut secara terus-menerus yang besarnya separuh dari rumah tangga responden (lihat Tabel 4.4).

Penelitian ini mencoba menggunakan indikator sumber penghasilan rumah tangga yang dilihat dari lapangan pekerjaan untuk mengklasifikasikan kesinambungan sumber penghasilan rumah tangga menjadi tiga, yaitu (1) sangat berkesinambungan, (2) berkesinambungan, dan (3) tidak berkesinambungan. Berdasarkan konsep ini, terdapat kurang lebih separuh rumah tangga responden, yaitu 50,5 persen, mempunyai sumber penghasilan yang berkesinambungan. Persentase terendah, yaitu 11,5 persen, adalah

rumah tangga dengan sumber penghasilan sangat berkesinambungan, dan 38,0 persen tidak berkesinambungan., sedangkan hanya ada 1 rumah tangga yang menjawab tidak tahu. Kenyataan adanya lebih dari sepertiga rumah tangga responden dengan sumber penghasilan tidak berkesinambungan tersebut menggambarkan masih terdapat cukup banyak rumah tangga yang rentan ekonomi. Dengan kata lain, rumah tangga dengan sumber penghasilan tidak berkesinambungan adalah rumah tangga yang tidak memiliki jaminan atas keberlanjutan matapencahariannya jika terjadi bencana. Berhentinya roda ekonomi keluarga menyebabkan penderitaan mereka menjadi lebih besar, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Keadaan rentan ekonomi juga dicerminkan oleh data kecukupan penghasilan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar sepanjang tahun yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel ini menunjukkan persentase rumah tangga yang termasuk dalam kategori 'kurang cukup' dan 'tidak cukup' berjumlah 39,0 persen. Hal ini dikarenakan antara lain pengaruh sumber penghasilan yang tidak berkesinambungan. Tabel 4.6. dengan jelas memperlihatkan persentase tertinggi untuk rumah tangga pada kategori kurang cukup dan tidak cukup adalah mereka yang mempunyai sumber penghasilan tidak berkesinambungan. Pola sebaliknya terjadi pada rumah tangga yang cukup memenuhi kebutuhan dasar sepanjang tahun, yang persentase tertinggi adalah mereka yang mempunyai sumber penghasilan sangat berkesinambungan, kemudian proporsi semakin mengecil pada rumah tangga yang hanya mempunyai sumber penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Temuan survei ini menggambarkan sedikit-banyaknya sumber penghasilan mempunyai hubungan positif dengan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Namun, tidak menutup kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi kecukupan penghasilan, antara lain jumlah anggota rumah tangga, jenis dan status pekerjaan, serta besar penghasilan.



**Tabel 4.4. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kecukupan Penghasilan untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Sepanjang Tahun dan Kestinambungan Sumber Penghasilan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%)**

Kecukupan Penghasilan	Kestinambungan Sumber Penghasilan			Jumlah
	Sangat Berkesinambungan	Berkesinambungan	Tidak Berkesinambungan	
Cukup	91,3	68,0	42,1	61,0
Kurang Cukup	(0)	19,0	39,5	24,5
Tidak Cukup	(2)	13,0	18,4	14,5
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
N	23	100,0	76	200

Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Catatan: ( ) angka mutlak, n<5

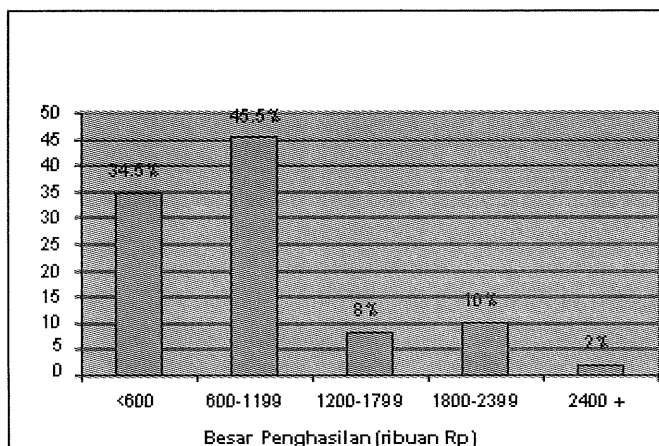
### 4.2.3. Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dipahami dari berbagai aspek, yang bukan hanya dapat digambarkan dari indikator ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan politik. Menurut Syahwier (2005), kesejahteraan diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam tulisan ini, uraian tentang kesejahteraan penduduk hanya ditekankan pada kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang mencakup besar pendapatan, pemilikan dan kondisi tempat tinggal, dan dalam konteks yang lebih luas juga mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa aspek ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga telah dideskripsikan di sub-bagian lain dalam tulisan ini, seperti sumber penghasilan, kecukupan dan kestinambungan penghasilan.

Rata-rata besar penghasilan rumah tangga responden secara keseluruhan pada umumnya adalah rendah, bahkan kira-kira sepertiga

hanya berpenghasilan di bawah 600.000 rupiah per bulan (lihat Diagram 4.6.). Penghasilan sebesar ini hanya dapat untuk bertahan hidup. Mereka sering harus berutang terlebih dahulu untuk dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu makanan, yang kemudian pinjaman tersebut akan dibayar ketika mereka mendapat upah kerja atau mendapat hasil usaha. Lebih lanjut, Diagram 4.4. juga memperlihatkan rumah tangga responden yang memiliki rata-rata penghasilan antara 600.000 - 1.199.000 rupiah per bulan adalah paling banyak, yaitu sekitar 45 persen. Keadaan ini mungkin berkaitan dengan tingginya persentase ART/KRT yang bekerja di sektor informal (lihat Bagian 4.1), yang menunjukkan berbagai jenis pekerjaan di sektor ini pada umumnya tidak dapat memberikan penghasilan yang besar.

**Diagram 4.6. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Penghasilan (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Tabel 4.5. menunjukkan kecenderungan rata-rata penghasilan rumah tangga yang KRT dan/ART bekerja di sektor informal lebih rendah daripada sektor formal. Tabel ini menunjukkan persentase

rumah tangga dengan penghasilan kurang dari 600.000 rupiah per bulan yang diperoleh dari sektor informal dan mencapai kira-kira dua kali lipat lebih besar, yaitu 39,6 persen dan 39,2 persen, yang berturut-turut untuk rumah tangga dengan satu orang dan dua orang atau lebih yang bekerja di sektor informal daripada rumah tangga yang tidak mempunyai ART yang bekerja di sektor informal, yaitu 18,8 persen. Keadaan sebaliknya ditemukan pada rumah tangga yang memiliki rata-rata penghasilan tinggi, yaitu  $\leq 1.200.000$  rupiah per bulan. Bahkan, persentase rumah tangga dengan rata-rata penghasilan pada kelompok teratas, yaitu 1.800.000 rupiah per bulan, yang tidak ada satu orang pun (0 orang) bekerja di sektor informal mencapai sekitar lima kali lebih besar, yaitu 33,3 persen, daripada mereka yang mempunyai paling tidak satu orang bekerja di sektor informal, yakni 5,9 persen. Meskipun demikian, rumah tangga pada kelompok penghasilan tiga kelompok tertinggi tersebut hanya sekitar seperlima dari keseluruhan responden. Rumah tangga yang besar kemungkinannya termasuk kelompok ini adalah rumah tangga yang mempunyai pekerjaan tetap di sektor formal, misalnya pada lapangan usaha jasa pemerintahan/kemasyarakatan.

**Tabel 4.5. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Rata-rata Penghasilan per Bulan dan Jumlah ART yang Bekerja di Sektor Informal, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%)**

Rata-rata Besar Penghasilan	Jumlah ART yang Bekerja di Sektor Informal		
	0	1	2+
< 600.000	18,8	39,6	39,2
600.000 – 1.119.000	33,3	49,5	49,0
1.200.000 – 1.799.000	14,6	5,0	(4)
1.800.000 +	33,3	5,9	(2)
Jumlah	100,0	100,0	100,0
n	48	101	51

Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Catatan: ( ) angka mutlak, n<5

Rata-rata penghasilan rumah tangga yang diperoleh dari sub-sektor jasa pemerintahan yang lebih besar daripada sektor lainnya tersebut, didukung oleh data survei yang tertera pada Tabel 4.6. Tabel ini menunjukkan di antara rumah tangga yang memiliki rata-rata penghasilan pada kelompok teratas, yaitu 1.800.000 rupiah dan lebih, yang tertinggi persentasenya adalah mereka yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan. Namun, Tabel 5.8 memperlihatkan rumah tangga yang bekerja pada lapangan pekerjaan di sektor jasa, yang umumnya bekerja sebagai PNS, memiliki besar penghasilan yang beragam/menyebar di semua kelompok penghasilan. Kondisi ini kemungkinan berhubungan dengan variasi jenis pekerjaan yang dilakukan, antara lain sebagai tenaga administrasi, kepemimpinan, profesional, dan sopir, yang berdampak pada besar gaji yang diterima.

**Tabel 4.6. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Rata-rata Penghasilan per Bulan dan Lapangan Pekerjaan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%)**

Rata-rata Besar Penghasilan	Lapangan Pekerjaan				
	Pertanian	Perdagangan	Bangunan	Jasa	Lainnya
< 600.000	51,9	50,0	31,6	28,3	(3)
600.000 – 1.119.000	37,0	33,3	63,2	37,7	45,8
1.200.000 – 1.799.000	(3)	(1)	(2)	11,3	(3)
1.800.000 +	(0)	(4)	(1)	22,7	20,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	27	30	57	53	24

Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Catatan: ( ) angka mutlak, n<5

Beberapa lapangan pekerjaan yang ditengarai menyerap tenaga kerja rumah tangga responden dengan rata-rata penghasilan yang rendah adalah sektor pertanian dan perdagangan. Data memperlihatkan kira-kira separuh rumah tangga responden yang bekerja di dua lapangan pekerjaan tersebut hanya memperoleh penghasilan <600.000 rupiah per bulan. Persentase rumah tangga pada kelompok ini jauh lebih besar daripada mereka yang bekerja di

sektor sama dengan rata-rata penghasilan antara 600.000 rupiah - 1.119.000 rupiah. Rendahnya rata-rata penghasilan rumah tangga yang menggantungkan kehidupannya dari lapangan pekerjaan pertanian dan perdagangan, diperkirakan berhubungan dengan keterbatasan modal usaha. Mereka yang bekerja di sektor pertanian, pertanian tanaman sayuran, cenderung hanya mengerjakan usaha pada lahan yang sangat sempit, yaitu sekitar 2-3 pematang/patok dengan luas antara 15-25 meter per patok. Lahan sayuran tersebut selain sempit juga bukan milik sendiri, meskipun tidak selalu harus menyewa, artinya sebagian menyewa, sebagian lainnya tanpa menyewa/cuma-cuma. Sayuran dapat dipanen dalam waktu 18 hari, kemudian dijual ke pasar, tetapi terkadang juga ada pedagang yang mengambil ke lokasi lahan sayur. Hasil penjualan panen sayur tergantung pada jenis dan produksi sayur, tetapi rata-rata penghasilan bersih, setelah dikurangi biaya pupuk dan perawatan, berkisar antara 75.000 rupiah - 100.000 rupiah per sekali panen. Dengan demikian, mereka sudah dapat dipastikan masuk dalam kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah, namun dengan catatan rumah tangga tersebut tidak mempunyai lagi tambahan penghasilan dari sumber penghasilan sektor lain. Demikian pula rata-rata besar penghasilan yang rendah di sektor perdagangan juga terutama dikarenakan modal usaha yang terbatas, sehingga barang/jenis dagangan hanya dalam jumlah sedikit. Usaha penjualan minuman/makanan dalam jumlah terbatas yang dijual secara keliling maupun di rumah dengan skala usaha sangat kecil, merupakan jenis kegiatan perdagangan yang menjadi sumber penghasilan sektor ini.

Sektor bangunan yang merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian rumah tangga responden, tampaknya dapat memberi penghasilan lebih besar daripada sektor perdagangan dan pertanian, meskipun jika dilihat dari kesinambungan penghasilan tidak lebih baik (lihat Sub-Bagian 4.2.2). Survei menemukan hampir dua per tiga rumah tangga responden yang sumber penghasilannya berasal dari sektor bangunan, memperoleh rata-rata penghasilan antara 600.000 rupiah - 1.119.000 rupiah per bulan. Angka ini bahkan paling tinggi daripada rumah tangga pada kelompok besar penghasilan sama yang

diperoleh dari sektor lain. Dengan demikian, rata-rata besar penghasilan per bulan menunjukkan kondisi kesejahteraan rumah tangga yang mempunyai sumber penghasilan dari lapangan pekerjaan bangunan, cenderung cukup baik, tetapi penghasilan yang diperoleh secara tidak teratur/kontinyu disebabkan sangat tergantung pada kegiatan proyek pembangunan fisik dari pihak lain.

Diagram 4.4 diperhatikan lagi dan menunjukkan bahwa kurang lebih sepertiga rumah tangga responden memiliki rata-rata penghasilan per bulan di bawah 600.000 rupiah. Penghasilan sebesar itu merupakan batas minimal sebagai salah satu penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, survei menemukan persentase rumah tangga yang pernah menerima BLT adalah sedikit lebih banyak daripada rumah tangga dengan jumlah penghasilan per bulan sebesar <600.000 rupiah (Tabel 4.7). Hal ini terjadi dikarenakan rumah tangga penerima program BLT tidak selalu ditujukan pada rumah tangga yang sama setiap tahun. Artinya, rumah tangga penerima BLT pada tahun ini bisa berbeda dengan tahun sebelumnya sesuai dengan hasil verifikasi penentuan calon penerima BLT yang dilakukan setiap tahun. Dengan kata lain, rumah tangga yang pada saat penelitian berlangsung bukan penerima Program BLT tetapi pernah memperoleh bantuan tersebut, kemudian dalam penelitian ini termasuk dalam rumah tangga penerima BLT. Dengan demikian, penggunaan konsep ‘pernah menerima BLT’ tampaknya berpengaruh pada cukup banyaknya rumah tangga yang menerima program ini.

**Tabel 4.7. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Penerima Program BLT dan Rata-rata Penghasilan per Bulan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (%)**

Penerima BLT	Rata-rata Penghasilan (ribu Rp/bulan)				Jumlah
	<600	600-1.119	1.200-1.799	1.800+	
Tidak	44,9	60,4	75,0	100,0	61,0
Kadang-kadang	27,5	7,7	(0)	(0)	13,0
Ya	27,5	31,9	(4)	(0)	26,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	69	91	16	24	200

Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Catatan: ( ) angka mutlak, n<5

Tabel 4.7 menunjukkan 39 persen rumah tangga responden pernah menerima BLT. Di antara penerima BLT ini, kira-kira sepertiganya mengatakan tidak selalu/kadang-kadang menerima BLT, selebihnya selalu menerima BLT ketika bantuan didistribusikan. Kenyataan ditemukannya beberapa rumah tangga yang memperoleh BLT yang tidak menentu/kadang-kadang tersebut, menggambarkan kesulitan dalam menentukan rumah tangga miskin/tidak miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan program. Oleh karena itu, ketidaktepatan sasaran program tampaknya juga terjadi pada lingkungan permukiman Kelurahan Tanah Patah. Hal ini digambarkan data survei, yaitu sekitar 32 persen rumah tangga responden dengan rata-rata penghasilan antara 600.000 rupiah – 1.799.000 rupiah per bulan sebagai rumah tangga yang pernah menerima BLT. Angka ini lebih tinggi daripada mereka yang hanya berpenghasilan kurang dari 600.000 rupiah per bulan yang sebenarnya sesuai dengan salah satu kriteria sasaran program. Demikian pula, beberapa rumah tangga responden yang berpenghasilan di bawah 600.000 rupiah, tidak pernah menerima BLT, yang mungkin juga merefleksikan persoalan dalam memilih target sasaran. Namun,

kriteria lain<sup>10</sup> yang digunakan untuk menentukan rumah tangga sebagai penerima BLT, tentunya berpengaruh terhadap beberapa rumah tangga responden yang berpenghasilan rendah dan tidak pernah menerima BLT, dan beberapa rumah tangga responden dengan penghasilan cukup besar tetapi pernah menerima BLT.

Kondisi kesejahteraan rumah tangga juga dapat digambarkan dengan sumber pendapatan, status kepemilikan, dan kondisi rumah tinggal. Merujuk pada variabel ini, terdapat cukup banyak rumah tangga responden yang kondisi kesejahtraannya belum baik. Kirakira dua per tiga rumah tangga responden menempati rumah tinggal dengan status sebagai penyewa/pengontrak/penumpang pada orang lain, sebanyak 59 persen tinggal di rumah milik sendiri, sisanya yaitu 9,0 persen menempati rumah orangtua/keluarga.

---

<sup>10</sup> Kelompok sasaran program BLT adalah rumah tangga miskin yang dibedakan menjadi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin, yang tentang penentuan rumah tangga tersebut diperoleh dari hasil pendataan melalui kegiatan sensus oleh BPS. Pengelompokan rumah tangga tersebut didasarkan atas variabel konsumsi makanan yang disetarakan dengan pengeluaran seseorang per bulan (Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program BLT). BPS menggunakan variabel konsumsi dan juga variabel lain yang semuanya ada 14 variabel, yaitu luas lantai bangunan <8 m<sup>2</sup> per orang, jenis lantai dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, fasilitas MCK bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, konsumsi daging/ayam/susu satu kali per minggu, hanya membeli pakaian satu kali dalam setahun, hanya makan satu/dua kali per hari, tak sanggup membayar pengobatan ke puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga <600.000 rupiah/bulan atau dari luas lahan 500 m<sup>2</sup> bagi petani, pendidikan KRT tamat SD ke bawah, dan tidak memiliki tabungan/barang yang dapat dijual dengan nilai minimal 500.000 rupiah (lihat Depsos, BPS, BRI, dan Pos Indonesia, 2005). 14 variabel digunakan, namun rumah tangga yang memiliki karakteristik rumah tangga miskin masuk dalam minimal 9 variabel maka rumah tangga tersebut termasuk dalam rumah tangga miskin. Di samping itu, terdapat 4 variabel yang ditujukan untuk program intervensi, yaitu keberadaan balita, anak usia sekolah, kesertaan KB, dan penerimaan kredit usaha (UMKM) (BPS, 2005).



Rumah tangga responden yang tinggal di rumah sewa/kontrakan, banyak ditemukan di daerah pesisir dan sebagian lainnya di tengah kota. Penyewa pada umumnya adalah pendatang dari kabupaten lain di Provinsi Bengkulu dan provinsi lain, dan juga mereka yang berasal dari Jawa. Kebanyakan pendatang sudah menjadi penduduk tetap di Kota Bengkulu dan sebagian lainnya adalah pendatang musiman yang datang ke Kota Bengkulu untuk bekerja. Rumah sewa/kontrak biasanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu, dan dapur dengan ukuran panjang antara 7-8 meter dan lebar 3,5-4 meter. Sebagian kecil rumah kontrakan berukuran lebih besar. Harga sewa rumah yang berkisar antara 75.000 rupiah - 125.000 rupiah per bulan, tergantung pada kondisi rumah dan letak permukiman yang dilihat dari aksesnya terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Sedangkan harga kontrak yang dibayar tahunan biasanya lebih murah daripada harga sewa bulanan. Rumah tangga responden yang menempati rumah sewa/kontrak cenderung mengelompok di lingkungan permukiman yang dekat dengan pantai, terutama lingkungan RT 12, 13, dan 14. Faktor harga sewa/kontrak rumah yang lebih murah diperkirakan melatarbelakangi pemilihan lokasi untuk mengontrak/menyewa rumah tinggal.

Kondisi rumah pada umumnya cukup baik. Sebagian besar rumah tinggal terbuat dari batu bata dan semen, dan sebagian kecil lainnya terbuat dari semen dan papan, yang biasa disebut setengah permanen. Sangat sedikit rumah yang terbuat dari papan, tetapi rumah papan tersebut kemungkinan besar lebih tahan terhadap gempa bumi, paling tidak gempa bumi skala kecil.

Berkaitan dengan konsumsi pangan, sekitar separuh rumah tangga atau 53 persen mempunyai persediaan makanan pokok minimal untuk 3 hari. Selebihnya adalah rumah tangga yang tidak mempunyai persediaan makanan pokok pada batas minimal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 21 persen, dan mereka yang kadang-kadang mempunyai persediaan minimal untuk 3 hari, yaitu 26 persen. Hampir semua rumah tangga memperoleh bahan makanan pokok dengan cara membeli. Keadaan ini mudah dimengerti karena Kota Bengkulu merupakan daerah perkotaan dan juga berstatus

sebagai daerah provinsi yang sudah jarang ditemui lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hanya 5,5 persen yang memproduksi sendiri. Diperkirakan termasuk kelompok ini adalah rumah tangga petani yang tinggal di pinggir kota dan memanfaatkan lahan kosong untuk menanam padi. Pola makan dengan tiga kali frekuensi makan per hari dilakukan oleh hampir dua per tiga rumah tangga, yaitu 62,5 persen, dan sisanya adalah rumah tangga yang hanya dapat makan sebanyak dua atau satu kali per hari, yang masing-masing sebesar 36,0 persen dan 1,5 persen. Rumah tangga yang termasuk pada dua kelompok terakhir, kemungkinan adalah rumah tangga kurang mampu karena keterbatasan akses terhadap sumber penghasilan yang dapat memberi pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, seperti yang dialami pemulung dan pedagang keliling dengan skala usaha sangat kecil.

### 4.3. KELOMPOK RENTAN

Kelompok rentan ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rumah tangga yang mempunyai rata-rata pendapatan rumah tangga < 600.000 rupiah per bulan. Nilai *cut-off-point* sebesar itu merujuk pada besar pendapatan yang digunakan oleh pemerintah (BPS) sebagai salah satu variabel untuk menentukan penerima Program BLT. Berdasarkan kriteria ini, hasil survei memperlihatkan terdapat sebanyak 69 rumah tangga sampel atau 34,5 persen dari 200 rumah tangga yang disurvei termasuk dalam kelompok rentan.

Kelompok rentan ini secara umum cenderung dicirikan rumah tangga yang hanya mempunyai satu orang anggota rumah tangga yang bekerja, kebanyakan bekerja di sektor informal, antara lain di sektor bangunan, perdagangan, dan pertanian, dan hanya berasal dari satu sumber mata pencaharian. Tabel 4.8. memperlihatkan, lebih dari dua per tiga rumah tangga kelompok rentan hanya mengandalkan satu orang yang bekerja untuk menopang kehidupan rumah tangga. Mayoritas kepala dan/atau anggota rumah tangga rentan ekonomi melakukan pekerjaan di sektor informal, atau hanya 13 persen yang bekerja di sektor formal. Sektor ini pada umumnya dicirikan

pekerjaan berupah rendah atau beberapa jenis usaha berskala sangat kecil, sehingga penghasilan dari sektor informal tidak besar. Mudah dipahami jika kelompok rentan pada umumnya memiliki sumber penghasilan dari berbagai lapangan usaha di sektor informal, yang dalam kajian ini diartikan sebagai sektor dengan jam kerja dan pendapatan tidak teratur.

**Tabel 4.8. Karakteristik Ekonomi Kelompok Rentan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu (n=69)**

Karakteristik Ekonomi	Jarak lokasi tempat kerja dari pantai (zona)		
	Dekat	Sedang-Jauh	Total
Jumlah ART yang bekerja (orang)			
0	(0)	(1)	(1)
1	70,2	63,6	68,1
2 +	29,8	31,8	30,4
Jumlah ART yang bekerja di sektor informal (orang)			
0	12,8	(3)	13,1
1	61,7	54,5	59,4
2 +	25,5	31,8	27,5
Lapangan pekerjaan sbg sumber penghasilan			
Pertanian	21,7	(4)	21,5
Industri	(1)	(0)	(1)
Perdagangan	23,9	(4)	23,1
Bangunan	28,3	26,3	27,7
Transportasi			
Jasa	(23,9)	(4)	23,1
Lainnya	(0)	(1)	4,6
Jumlah sumber penghasilan rumah tangga			
1	74,5	81,8	76,8
2+	25,5	18,2	23,2
<i>N</i>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>69</b>

Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Catatan: ( ) angka mutlak, n<5.

Beberapa lapangan pekerjaan utama yang merupakan sumber penghasilan rumah tangga kelompok rentan adalah bangunan, perdagangan, jasa (kemasyarakatan), dan pertanian. Kecuali sektor jasa, beberapa lapangan pekerjaan tersebut pada umumnya mudah dimasuki oleh tenaga kerja, walaupun tanpa memiliki pendidikan cukup tinggi. Lapangan pekerjaan bangunan dan perdagangan banyak dilakukan kelompok rentan, seperti pekerjaan sebagai tenaga penjualan, misalnya pedagang kakilima dan keliling, pedagang warungan di rumah sendiri. Sedangkan pekerjaan di sektor bangunan antara lain kernet dan tukang bangunan. Responden yang mempunyai sumber penghasilan dari sektor pertanian adalah petani sayur yang melakukan usaha pada tanah milik orang lain dengan cara menyewa ataupun sekadar memanfaatkan lahan tidur milik pihak lain. Usaha pertanian hanya dilakukan pada luas lahan sangat sempit atau petak-petak kecil, maka hasil usaha tani juga terbatas. Bahkan, sebagian besar rumah tangga kelompok rentan yang bekerja di sektor pertanian tanaman sayur tersebut tidak bisa melakukan kegiatan pada musim hujan, karena lahan terendam air atau banjir.

Sektor jasa kemasyarakatan yang didominasi oleh berbagai pekerjaan dengan jam kerja teratur dan pendapatan tetap dari sektor formal juga merupakan sumber penghasilan bagi sekitar 23 persen kelompok rentan. Mereka juga kemungkinan besar adalah tenaga honorer pada berbagai kantor pemerintah dan swasta, antara lain jenis pekerjaan sebagai tenaga penjaga malam (satpam), tenaga kebersihan, dan tenaga non-administrasi lain.

Sebagian kecil rumah tangga kelompok rentan memiliki penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan. Namun, pendapatan yang diperoleh masih juga rendah. Dari wawancara mendalam dan observasi diketahui, rumah tangga memiliki dua sumber lapangan pekerjaan, namun keterbatasan modal usaha, misalnya di sektor pertanian dan perdagangan, mengakibatkan pendapatan yang diperoleh terbatas. Kondisi ini berakibat pada tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan terkadang untuk kebutuhan yang sangat mendasar. Salah seorang tokoh masyarakat di lingkungan permukiman di wilayah pesisir yang

terdapat cukup banyak rumah tangga kelompok rentan, mengemukakan kondisi kehidupan mereka, sebagai berikut

“.... pendapatan dari pekerjaan bangunan hanya 25 ribu (rupiah) per hari. Kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Di sini paling banyak kerja di bangunan. Jumlahnya ya kira-kira sama dengan jumlah yang kerja dagang. Kalau PNS paling hanya kurang dari 10 orang. Kerja bangunan tidak tentu dapat kerjaan. Kadang nggak kerja sampai satu minggu, kadang sampai satu bulan. Kalau sudah begitu, utang di warung menumpuk. Ya utang beras, mie, pokoknya sembako. Nanti kalau sudah kerja dan dapat upah baru bisa bayar utang”. Dalam setahun kalau dijumlahkan, paling hanya bekerja antara 8-9 bulan, yang tiga bulan nganggur. Makanya kalau lagi dapat kerjaan, mereka berusaha menyimpan uang untuk menutup kebutuhan jika sedang tidak kerja. Kalau nganggurnya kelamaan, terpaksa utang di warung hingga numpuk, kadang sampai malu dengan yang punya warung.”

Dilihat menurut zona, diketahui lebih dari dua per tiga atau 68,1 persen kelompok rentan tinggal di dekat pantai atau pada jarak <500 meter, selebihnya berada di zona sedang atau pada jarak 500 s/d 2.000 meter, dan jauh atau pada jarak > 2.000 meter dari pantai. Lebih tingginya persentase kelompok rentan yang tinggal di daerah pantai ini berhubungan dengan faktor kemudahan memperoleh rumah sewa/kontrak dengan harga terjangkau. Rumah sewa/kontrak pada umumnya berupa rumah petak dengan harga kontrak kira-kira 1.200.000 rupiah per tahun, sedangkan harga sewa bulanan sekitar 75.000 rupiah - 125.000 rupiah per bulan. Banyaknya kelompok rentan yang tinggal di daerah dekat pantai disebabkan antara lain kemudahan untuk melakukan usaha penjualan, karena merupakan wilayah permukiman padat penduduk, terdapat sarana-prasarana sekolah dan pariwisata pantai, dan juga di sekitar pantai sedang ada proyek pembangunan jalan dan tembok dari pantai. Pembangunan proyek tersebut melibatkan banyak tenaga kasar di sektor bangunan

yang sebagian di antaranya tinggal untuk beberapa bulan di lokasi penelitian. Beberapa pekerjaan di sektor informal juga dilakukan kelompok rentan di daerah yang berjarak sedang dan jauh dari pantai, namun persentase pekerja cenderung lebih rendah daripada mereka yang bekerja di sektor formal. Sektor pemerintahan yang berada di bawah naungan Pemkot Kota Bengkulu merupakan sektor formal yang tampaknya cukup banyak menyerap responden yang tinggal agak jauh dari pantai. Beberapa sektor formal lainnya adalah mereka yang bekerja di usaha perdagangan skala sedang/besar dan usaha perhotelan. Perbedaan sektor pekerjaan ini berdampak pada pendapatan yang juga berbeda, sehingga kondisi kerentanan ekonomi yang diukur dari rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan, juga berbeda.

## **BAB V**

### **KONDISI SOSIAL-KEMASYARAKATAN**

**K**ondisi sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan strategi pengurangan risiko bencana. Akhir-akhir ini dalam berbagai forum semakin digalakkan pentingnya pendekatan strategis dalam meredam kerentanan dan risiko terhadap bahaya dengan perhatian pada faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan bencana bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Hal terpenting dalam pendekatan ini adalah memandang masyarakat sebagai subjek bukan objek penanganan bencana. Dengan demikian beberapa faktor kerentanan dalam masyarakat dan juga kerentanan sosial merupakan hal yang perlu ditekan atau dikurangi. Sebaliknya kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkecil risiko jika terjadi bencana. Bahasan bagian ini berisi gambaran kondisi sosial kemasyarakatan yang mengindikasikan kerentanan maupun kapasitas sosial di daerah kajian Kota Bengkulu.

#### **5.1. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT KOTA BENGKULU**

Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi yang relatif baru, banyak melakukan pembangunan fisik maupun nonfisik sehingga merupakan tempat tujuan pendatang. Mereka berasal dari wilayah sekitar Kota Bengkulu, yaitu beberapa kabupaten dalam Provinsi Bengkulu maupun berbagai wilayah di luar provinsi yang kebanyakan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, dan diikuti pendatang dari Sumatera Utara dan Jawa. Hal ini berimplikasi pada struktur masyarakat Kota Bengkulu yang lebih heterogen dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.

Penduduk Provinsi Bengkulu menurut komposisi etnis terdiri dari mayoritas suku Rejang, atau kurang lebih dua per tiga dari penduduk di provinsi ini. Mereka mendiami daerah Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan beberapa daerah di luar Bengkulu. Orang Rejang berasal dari Bidara Cina yang melewati Pagaruyung, juga dari Majapahit dari Jawa. Kemudian suku Serawai pada umumnya mendiami daerah Bengkulu Selatan. Sedangkan ketiga adalah suku Melayu, yang banyak mendiami Kota Bengkulu dan beberapa kecamatan di pinggiran kota Bengkulu wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian penduduk Bengkulu pada umumnya mempunyai latar belakang budaya Minangkabau, Jawa, dan Melayu (<http://www.tamanmini.com/anjungan>). Sedangkan komposisi etnis penduduk Kota Bengkulu, terutama penduduk asli, adalah suku Melayu sebanyak 15 persen, suku Serawai 15 persen, suku Rejang 7 persen, Lembak 4 persen, dan suku Muko-muko 0,6 persen. Sedangkan pendatang terdiri dari suku Minangkabau sebanyak 12 persen, suku Jawa dan Sunda 14 persen, dan suku Batak 5 persen (Bappeda Pemkot Bengkulu, 2005).

Masyarakat Kota Bengkulu terdiri dari multietnis, tetapi falsafah hidup masyarakat Kota Bengkulu adalah "*sekundang setungguan seiyo sekato*", yang menunjukkan pada dasarnya masyarakatnya plural tetapi tetap satu. Di samping itu, pembuatan kebijakan bagi masyarakat Bengkulu yang menyangkut kepentingan bersama sering didengar dalam bahasa pantun, yaitu "*Kebukit samo mendaki, kelurah samo menurun, yang berat samo dipikul, yang ringan samo dijinjing*", artinya dalam membangun, pekerjaan seberat apa pun jika dikerjakan sama-sama akan terasa ringan. Perbedaan pendapat juga dianggap sebagai suatu dinamika dan dapat dimusyawarahkan sesuai dengan pepatah: "*Bulek air kek pembuluh, bulek kata rek sepakat*", artinya bersatunya air dengan bambu, bersatunya pendapat dengan musyawarah. (<http://www.tamanmini.com/anjungan>). Dengan demikian, perbedaan pendapat bukan merupakan potensi konflik, sehingga solidaritas sosial mudah dibangun, termasuk apabila terjadi musibah bencana alam. Di samping itu, juga telah terjadi pembauran antar-etnis di Kota Bengkulu. Hal itu bisa cepat



terjadi melalui akulturasi maupun asimilasi secara kultural, yaitu melalui perkawinan campuran dan konversi ke agama lokal atau ke agama Islam.

Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, yang mencapai sekitar 95 persen, agama Protestan sekitar 3 persen, dan Katholik hanya 1,3 persen, dan sisanya kurang dari 1 persen memeluk agama Buddha dan Hindhu. Kecamatan Ratu Agung yang menjadi wilayah kajian, memiliki proporsi penduduk beragama Islam lebih besar, yaitu 98 persen dari keseluruhan penduduk keseluruhan (BPS,2005). Proporsi penduduk Kelurahan Tanah Patah yang menjadi wilayah kajian, yang beragama Islam tidak sebesar di Kota Bengkulu dan Kecamatan Ratu Agung, yaitu hanya sekitar 82 persen. Sekitar 16 persen penduduk memeluk agama Kristen, dan sisanya beragama Khatolik, Hindhu, dan Buddha.

Berkaitan dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, terdapat upacara tradisional yang menyangkut aspek agama Islam yaitu Festival *Tabot*, yang diadakan satu tahun sekali pada setiap tanggal 10 Muharram. Upacara ini berhubungan dengan sejarah kepahlawanan Husein bin Ali bin Abi Thalib, salah satu cucu Nabi Muhammad S.A.W. Di dalam upacara ini terdapat unsur agama, juga unsur sejarah dan kesenian. Meskipun demikian, sekarang ini upacara itu telah bergeser maknanya dan sekadar menjadi pesta tahunan masyarakat Bengkulu. Bahkan, sakralitas sudah mulai meluntur dan dapat dikatakan sudah menjadi semacam seni pertunjukan saja. Pada awalnya aspek ritual yang semula melandasinya adalah pusat dari segala upacara tradisi itu, kini terkesan hanya pelengkap. Hal ini berkaitan dengan berbagai ritus yang menyertainya yang sebagian besar murni sebagai tontonan, dan juga tentang keberadaan arena pameran pembangunan dan pasar malam di pusat kegiatan festival di Lapangan Merdeka Bengkulu. (*Kompas*, 15 Febuari, 2006).

Sistem pelapisan sosial masyarakat Bengkulu pada zaman dulu tercermin dalam kepemilikan rumah. Golongan pejabat dan bangsawan keturunan raja-raja mendiami rumah Gedang, sedangkan rakyat biasa umumnya tinggal dalam rumah Bubungan Lima.

Perbedaan kedua jenis rumah ini dapat dilihat dari luas, bentuk, ragam hias, serta tangga rumah. (<http://www.tamanmini.com/anjungan>). Pelapisan atau struktur sosial masyarakat saat ini masih tercermin dari kepemilikan, dan juga kepemilikan rumah yang dilihat dari pekerjaan maupun pendidikan. Cockerham (2000) dalam *The Global Society* mengemukakan bahwa struktur sosial masyarakat berkaitan dengan empat komponen, yaitu status, peran, kelompok, dan kelembagaan, yang kesemuanya berinteraksi membentuk hubungan sosial. Keempat komponen tersebut dimanifestasikan melalui kepemilikan, pendidikan, dan pekerjaannya sehingga berimplikasi terhadap peran yang harus dijalankan orang tersebut dalam kelompok dan kelembagaan yang akan menempatkannya pada kelas sosial tertentu, apakah seseorang masuk dalam kelompok kelas menengah atau kelas bawah dalam masyarakat.

Mata pencaharian penduduk Kota Bengkulu yang paling menonjol adalah bekerja di sektor jasa, termasuk jasa pemerintahan yaitu sekitar 40 persen. Sedangkan yang bekerja di sektor perdagangan mencapai lebih dari sepertiganya. Sebagaimana dikemukakan pada bab IV bahwa sektor informal merupakan sumber mata pencaharian cukup penting terutama bagi mereka yang berpendidikan menengah dan rendah. Struktur pekerjaan penduduk di Kecamatan Ratu Agung proporsi terbesar adalah pegawai negeri yaitu sekitar 38 persen, diikuti pekerja di sektor swasta yang hampir mencapai 30 persen, kemudian pedagang sebanyak 21 persen, dan petani hanya kurang dari 10 persen (BPS dan Bappeda Pemerintah Kota Bengkulu, 2005). Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Tanah Patah kebanyakan bekerja di sektor informal. Sedangkan yang berstatus sebagai pegawai negeri, TNI, dan POLRI kurang menonjol, yaitu hanya sekitar 20 persen. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang narasumber, seperti pada masyarakat pada umumnya, masyarakat Kota Bengkulu menganggap bahwa seseorang yang mempunyai status sosial tinggi dalam masyarakat adalah orang "berpunya", artinya mereka yang mempunyai kekayaan, dan berpenghasilan tetap seperti pengusaha, pejabat, termasuk pegawai

negeri. Mereka termasuk dalam status sosial yang relatif tinggi dibandingkan pedagang dan petani.

Struktur sosial penduduk apabila dilihat dari tingkat pendidikan, menunjukkan pendidikan yang cukup tinggi, dengan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA adalah 14 persen, berpendidikan Diploma I-III hampir 40 persen, dan berpendidikan Sarjana ke atas hampir 20 persen (Bengkulu Dalam Angka. 2005). Dengan kata lain, penduduk yang tamat SMA ke atas mencapai dua per tiga. (BPS dan Bappeda Kota Bengkulu, 2005). Tingkat pendidikan yang relatif tinggi juga terjadi pada penduduk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sebagaimana pada pembahasan di bagian III bahwa sekitar sepertiga penduduk di Kecamatan Ratu Agung berpendidikan tamat SMA dan 10 persen berpendidikan universitas (Pemerintah Kota Bengkulu, Kecamatan Ratu Agung, 2007). Sedangkan untuk Kelurahan Tanah Patah yang berpendidikan tamat SMA ke atas proporsinya lebih tinggi yaitu hampir mencapai separuhnya. Kondisi ini merupakan potensi yang cukup baik untuk mengembangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Bengkulu. Sebagaimana dikemukakan dalam Bakornas (2005) bahwa pendidikan merupakan sumberdaya penting untuk mengurangi kerentanan sosial dalam menghadapi bencana.

Kondisi sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kerentanan dan kapasitas adalah keberadaan kelembagaan. Hal ini penting karena kelembagaan merupakan wadah bagi mobilisasi sumberdaya maupun sumberdana untuk menghadapi bencana alam. Kelembagaan utama pengelola bencana di Kota Bengkulu adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 208 Th 2006. Kelembagaan ini relatif belum menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Organisasi massa bentukan pemerintah adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang mendapat pembinaan dari Dinas Sosial Tingkat Provinsi (Dinkesos). Tagana merupakan organisasi dalam tubuh Karang Taruna yang memang disiapkan membantu

penanggulangan bencana. Wilayah kerja Tagana adalah tingkat kelurahan, sehingga setiap kelurahan terdapat satu organisasi Tagana. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa ketua RT yang menjadi kajian di Kelurahan Tanah Patah, Karang Taruna di daerah tersebut kurang aktif.

Keberadaan organisasi lain, seperti PMI dan WALHI serta beberapa LSM, di antaranya *Women Crisis Center* (WCC) dan *Children Crisis Center* serta Perkumpulan Bantuan Hukum Bengkulu (PBHB) yang mempunyai berbagai kelompok pendampingan, seperti petani, nelayan, dan pedagang, juga merupakan modal sosial yang tidak kalah penting. Demikian pula, perguruan tinggi terutama Universitas Negeri Bengkulu (UNIB), pada waktu terjadi gempa bumi tahun 2000 juga berperan dalam memobilisasi maupun mendistribusikan bantuan.

## **5.2. KONDISI SOSIAL-KEMASYARAKATAN DAERAH PENELITIAN**

Kondisi sosial kemasyarakatan pada tingkat kelurahan yang menjadi kajian adalah Kelurahan Tanah Patah, yang lebih didasarkan pada hasil survei di tingkat rumah tangga sebagai unit terjadinya interaksi sosial yang paling kecil. Dalam kajian ini kondisi sosial kemasyarakatan dilihat dari aspek hubungan kemasyarakatan, peran tokoh masyarakat/pimpinan serta keberadaan dan peran kelembagaan masyarakat.

### **5.2.1. Hubungan Kemasyarakatan**

Hubungan kemasyarakatan dalam kajian ini dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam kegotongroyongan atau tolong-menolong jika ada keperluan dan hajatan warga, serta jika terjadi musibah. Berdasarkan hasil survei, kebiasaan tolong-menolong di lingkungan RT/RW di lokasi penelitian untuk membantu hajatan warga, memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan

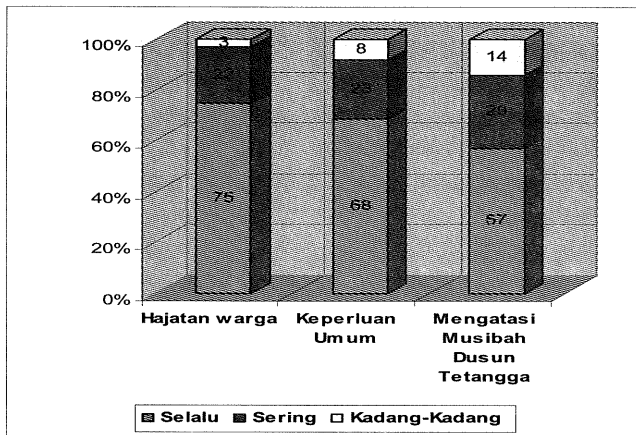
gotong royong/kerja bakti untuk keperluan umum. Responden yang menyatakan bahwa mereka “selalu” melakukan tolong-menolong untuk hajatan, persentasenya lebih besar dibandingkan responden yang menyatakan “selalu” melakukan kegiatan untuk keperluan umum seperti kerja bakti. atau 75 persen dibanding 68 persen. Sedangkan kegiatan untuk mengatasi musibah dengan dusun tetangga, persentase responden yang menyatakan “selalu” melakukan kegiatan tersebut semakin mengecil yaitu kurang dari 60 persen. (Diagram 5.1). Tolong-menolong antarwarga dalam satu lokasi (RT/RW) lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan tolong-menolong dengan warga di luar lingkungan RW. Hal ini wajar mengingat jika terjadi musibah warga terdekat yang pertama memberikan bantuan dan pertolongan.

Responden yang menyatakan bahwa mereka “sering” melakukan kegiatan tolong-menolong jika terjadi musibah, seperti banjir, kebakaran di dusun tetangga, persentasenya paling besar dibandingkan responden yang melakukan tolong-menolong untuk keperluan umum, misalnya kerja bakti, dan hajatan warga (Diagram 5.1). Keadaan ini menunjukkan potensi solidaritas yang menggembirakan. Hubungan kemasyarakatan terutama dilihat dari kegiatan tolong-menolong antarwarga dalam satu lingkungan RT atau bahkan di luar lingkungan, merupakan modal sosial yang perlu dibangun dan dipertahankan karena bermanfaat dalam pengembangan kesiapsiagaan jika terjadi bencana.

Kegiatan tolong menolong warga dicermati lebih lanjut menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan, maka terdapat perbedaan yang kurang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan serta responden yang berpendidikan tamat SD dan tamat SMA ke atas. Responden perempuan cenderung menyatakan “selalu” mempunyai kebiasaan tolong-menolong antarwarga dengan kampung/dusun tetangga dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, responden laki-laki cenderung lebih banyak menyatakan “kadang-kadang” dibandingkan perempuan, meskipun perbedaannya tidak mencolok. Menurut perbedaan tingkat pendidikan, terlihat pada kelompok responden berpendidikan rendah atau tamat SD kebawah

cenderung lebih banyak menyatakan hanya ”kadang-kadang” melakukan tolong-menolong dibandingkan dengan yang menyatakan “selalu” melakukan tolong-menolong. Sebaliknya responden yang berpendidikan tinggi atau tamat SMA ke atas, proporsi yang menyatakan “selalu” melakukan tolong-menolong lebih besar dibandingkan yang menyatakan “sering” dan “kadang-kadang” melakukan tolong-menolong bila terdapat hajatan warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan mempunyai kesadaran yang lebih tinggi dalam beraktivitas sosial.

**Diagram 5.1. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kebiasaan Tolong-Menolong Untuk Hajatan Warga, Keperluan Umum, dan Dusun Tetangga, Apabila Terjadi Musibah, Kota Bengkulu, 2007 (%)**

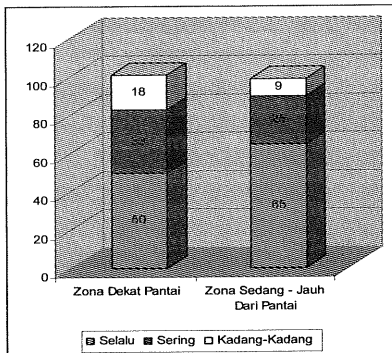


Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007.

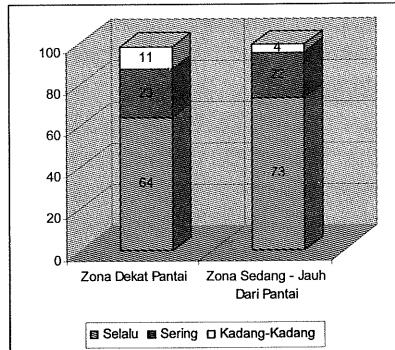
Perbedaan kebiasaan tolong-menolong dan gotong royong antarwarga, apabila dilihat menurut perbedaan lokasi zona dekat dengan pantai atau kurang dari 500 m dan zona sedang dan jauh dari pantai atau lebih dari 500 m, menunjukkan bahwa kegiatan hajatan

warga, tidak terdapat perbedaan berarti antara responden yang menyatakan “selalu” dan “sering” dan hanya “kadang-kadang” melakukan tolong-menolong. Sedangkan kegiatan kerja bakti untuk keperluan umum terdapat perbedaan kebiasaan responden yang berlokasi di zona dekat pantai dan jauh dari pantai. Responden yang bertempat tinggal jauh dari pantai cenderung menyatakan mereka “selalu” dan “sering” melakukan kegiatan tolong-menolong. Sebaliknya responden yang tinggal di lokasi dekat dengan pantai lebih banyak proporsinya menyatakan hanya “kadang-kadang” melakukan kegiatan tolong-menolong. Pola ini juga terjadi pada kebiasaan warga dalam tolong-menolong dengan dusun tetangga (Diagram 5.2. dan 5.3.). Perbedaan tersebut relatif tidak menonjol, akan tetapi hubungan kemasyarakatan yang lebih kuat seharusnya terjadi pada lokasi rawan atau dekat dengan pantai. Hal ini mengingat apabila terjadi bencana tsunami, warga yang tinggal di lokasi rawan memerlukan kesiapsiagaan yang lebih tinggi, dan juga meningkatkan solidaritas sosial.

**Diagram 5.2. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kebiasaan Tolong-Menolong untuk Keperluan Umum Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



**Diagram 5.3. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kebiasaan Tolong-Menolong dengan Dusun Tetangga Apabila Terjadi Musibah Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007(%)**



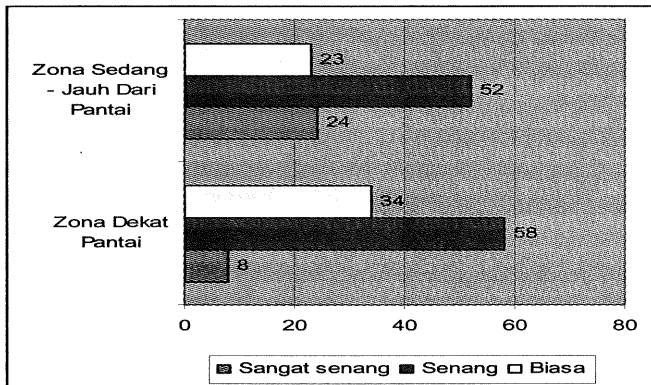
Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007.

Kebiasaan kerjasama dan tolong-menolong di dalam masyarakat, berpotensi besar terhadap kesadaran kolektif untuk memberikan bantuan apabila terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk meningkatkan kapasitas sosial dalam menghadapi bencana.

Kondisi sosial kemasyarakatan dilihat dari keterbukaan masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap pendatang, juga berpengaruh terhadap kemudahan membangun solidaritas sosial. Hasil kajian menemukan masyarakat yang menyatakan “sangat senang menerima pendatang”, jumlahnya relatif kecil yaitu 16 persen. Sedangkan yang menyatakan “senang menerima pendatang” lebih dari separuh yaitu 55 persen, tetapi hampir sepertiga menyatakan mereka hanya menyatakan “biasa” saja. Keadaan ini mengindikasikan masyarakat di daerah kajian cukup terbuka. Keterbukaan masyarakat dalam menerima pendatang yang dilihat menurut perbedaan jenis kelamin maupun tingkat pendidikan, tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Bila dilihat menurut zona atau lokasi tempat tinggal menunjukkan responden yang tinggal di lokasi dekat dari pantai memiliki persentase lebih besar yang menyatakan “biasa” saja apabila menerima pendatang dari luar dibandingkan responden yang bertempat tinggal jauh dari pantai. Sebaliknya, mereka yang tinggal jauh dari pantai cenderung menyatakan sikap “sangat senang” dan “senang” dalam menerima pendatang. Hal ini mengindikasikan mereka yang tinggal jauh dari pantai relatif lebih terbuka daripada mereka yang tinggal dekat dari pantai.



**Diagram 5.4. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pendapat Tentang Sikap Masyarakat Bila Menerima Pendetang dari Luar Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

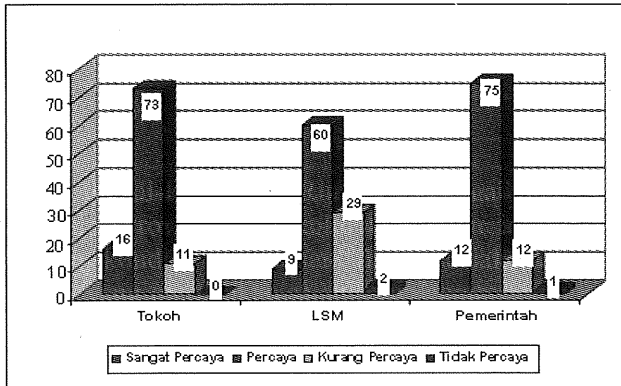
### 5.2.2. Keberadaan dan Peran Tokoh Masyarakat /Pimpinan

Tokoh masyarakat berasal dari pimpinan informal maupun pimpinan formal, merupakan salah satu kunci melakukan mobilisasi sumberdaya dan sumberdana atau menggerakkan partisipasi warga. Keberadaan mereka sangat diperlukan. Tokoh/pimpinan yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga juga merupakan potensi yang dapat memainkan peran apabila terjadi bencana alam. Sebagian besar responden, yaitu sekitar 77 persen, menyatakan mereka “mudah” menemukan tokoh dan hanya satu kasus yang menyatakan sulit menemukan tokoh tersebut.

Selain keberadaan tokoh masyarakat atau pimpinan yang mampu menyelesaikan perselisihan warga, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh/pimpinan juga merupakan hal yang lebih penting. Sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 5.5, sebagian besar responden menyatakan mereka percaya kepada tokoh masyarakat atau pemimpin, bahkan 16 persen di antaranya menyatakan sangat

percaya. Sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, persentasenya sedikit lebih besar yaitu mencapai tiga per empat responden yang menyatakan “percaya”. Proporsi responden yang percaya pada LSM lebih kecil dibandingkan kepercayaan terhadap tokoh masyarakat dan pemerintah, tetapi masih di atas separuhnya. Hal ini tentunya juga merupakan modal bagi peningkatan terbangunnya jaring pengaman sosial.

**Diagram 5.5. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pendapat Tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh Masyarakat, LSM, dan Pemerintah Kelurahan, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

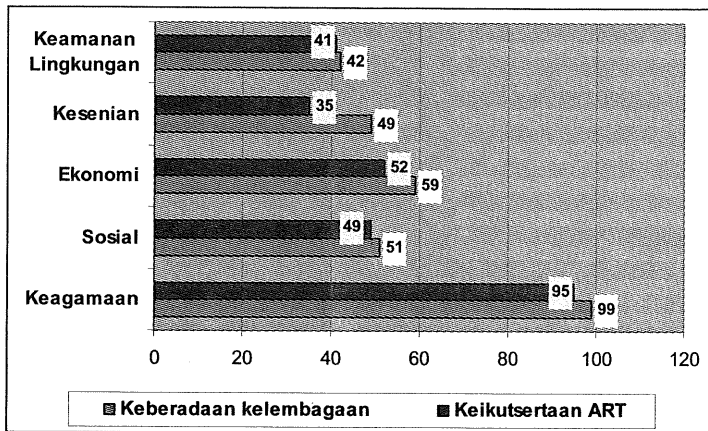
Responden dilihat dari peran tokoh masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan kebencanaan, berpendapat bahwa tokoh masyarakat yang mampu berperan memberi informasi tentang bencana adalah sekitar 88 persen. Demikian pula yang berpendapat bahwa terdapat tokoh atau warga masyarakat yang dapat berperan menggerakkan masyarakat untuk menyelamatkan diri serta mengelola logistik untuk kebutuhan dasar bagi korban, menunjukkan persentase yang sama yaitu 88 persen. Gambaran ini merupakan kondisi yang menggembirakan, yang berarti telah ada potensi bagi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

### 5.2.3. Keberadaan dan Peran Kelembagaan Masyarakat

Di samping tokoh masyarakat maupun pemimpin yang berperan dalam mengatasi perselisihan warga sekaligus dapat berperan dalam menggerakkan solidaritas sosial, kelembagaan masyarakat juga merupakan salah satu modal sosial yang sangat berharga bagi wadah yang berkaitan dengan penanggulangan dan mengatasi persoalan yang timbul bila terjadi bencana alam. Pengertian kelembagaan dalam kajian ini adalah kegiatan rutin dan memiliki pengurus yang mengelola kegiatan tersebut, meskipun tidak selalu dalam bentuk organisasi formal yang mempunyai anggaran dasar – anggaran rumah tangga.

Keberadaan kelembagaan menurut persepsi responden menunjukkan hampir semua responden berpendapat lembaga keagamaan terdapat di lokasi kajian (Diagram 5.6). Penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, terdapat kegiatan pengajian di seluruh RT di Kelurahan Tanah Patah, sehingga hampir seluruh responden menyatakan lembaga keagamaan terdapat di lokasi kajian. Sedangkan responden yang berpendapat bahwa di lokasi kajian terdapat lembaga ekonomi yang jumlahnya lebih dari separuhnya dan mendekati 60 persen. Lembaga ekonomi di lokasi kajian dimaksudkan sebagai kegiatan arisan dan juga simpan pinjam. Di samping itu, terdapat semacam berbagai kelompok usaha ekonomi produktif, di antaranya kelompok pembuatan makanan khas Bengkulu, seperti pais, kelompok usaha kain besurek (kain batik khas Bengkulu). Kelompok usaha ekonomi produktif tersebut di bawah binaan Dinas Perindustrian setempat. Kegiatan dalam kelembagaan tersebut bersifat ekonomis, tapi kenyataannya tidak terlepas dari kegiatan sosial meskipun dalam lingkup kecil seperti membantu anggota kelompok yang mengalami musibah seperti ada yang sakit, dan sebagainya.

**Diagram 5.6. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pendapat Tentang Keberadaan Kelembagaan dan Partisipasi ART, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



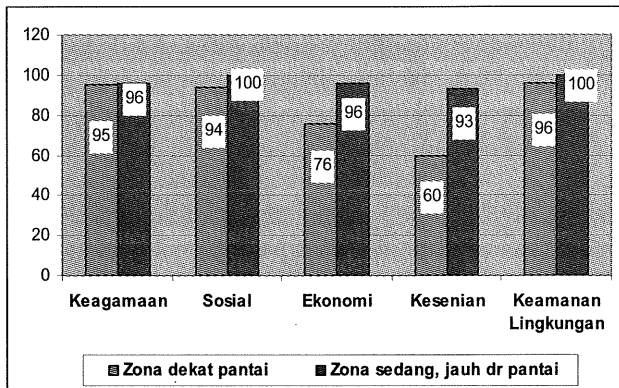
Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Sekitar separuh responden menyatakan di lokasi kajian terdapat lembaga sosial seperti Karang Taruna dan lembaga kesenian, selain lembaga keagamaan dan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa ketua RT di wilayah Kelurahan Tanah Patah, lembaga Karang Taruna dan kesenian yang ada relatif kurang aktif dan hanya mempunyai kegiatan saat mendekati acara 17 Agustus. Hanya sedikit responden menyatakan terdapat kegiatan keamanan lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ketua RT, kegiatan tersebut memang kurang digalakkan karena secara umum di daerah penelitian relatif aman, sehingga tidak terdapat ronda malam serta kegiatan-kegiatan keamanan lingkungan.

Keikutsertaan masyarakat, terutama anggota rumah tangga (ART) responden dalam kelembagaan yang ada, menunjukkan tidak seluruh ART responden ikut dalam kelembagaan tersebut. Hal ini terlihat dari perbedaan persentase keberadaan kelembagaan dan keikutsertaan ART sebagaimana terlihat dalam Diagram 5.6. Partisipasi warga dalam berbagai kegiatan relatif cukup baik jika

dilihat dari persentase. Berkaitan dengan kelembagaan masyarakat maupun keikutsertaan dan menurut perbedaan lokasi tempat tinggal responden, yaitu zona dekat pantai dan zona sedang, jauh dari pantai, secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebagaimana terlihat dari diagram 5.7. Namun, kelembagaan ekonomi dan kesenian dijumpai perbedaan yang relatif cukup besar, yang menunjukkan partisipasi ART zona dekat pantai dalam kedua kelembagaan tersebut lebih kecil. Hal ini kemungkinan terkait sifat kelembagaan, misalnya keterlibatan dalam kelembagaan kesenian memerlukan minat dan keterampilan khusus. Sedangkan kelembagaan ekonomi, yaitu arisan, terdapat sebagian ART yang tidak berpartisipasi terutama mereka yang bekerja sebagai pemulung atau pedagang kecil karena alasan keterbatasan ekonomi. Di samping itu, kegiatan arisan juga kurang diminati sebagian warga karena arisan di salah satu RT lokasi kajian, cenderung menjadi “ajang pameran pemilikan barang-barang konsumtif” dari para ibu peserta arisan sebagaimana dikemukakan RT setempat. Hal ini membuat keengganan sebagai warga untuk ikut arisan.

**Diagram 5.7. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Partisipasi ART Dalam Kegiatan Kelembagaan dan Perbedaan Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%)**

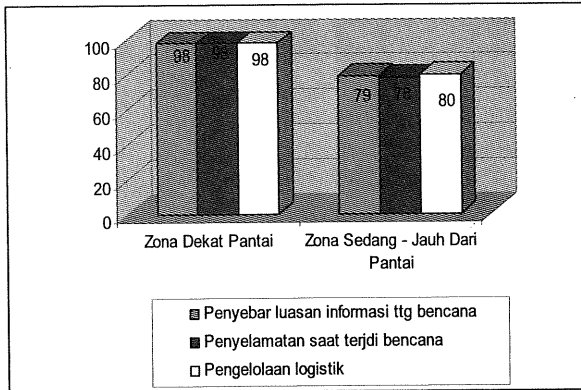


Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana dijumpai di lokasi kajian, selain adanya kegiatan dalam kelembagaan agama, sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 88 persen responden menyatakan di lokasi kajian terdapat kegiatan penyebarluasan informasi tentang bencana yang dilakukan masyarakat dan kegiatan penyelamatan keluarga maupun warga lain ketika terjadi bencana. Sekitar 88 persen responden mengemukakan di lokasi kajian terdapat kegiatan pengelolaan logistik untuk kebutuhan dasar korban bencana.

Kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan menurut perbedaan lokasi, yaitu zona dekat dan sedang/jauh dari pantai, menunjukkan responden yang bertempat tinggal di lokasi dekat pantai menunjukkan proporsi yang lebih besar yang menyatakan kegiatan “penyebarluasan informasi tentang bencana”, “penyelamatan keluarga dan warga lain ketika terjadi bencana” serta kegiatan “pengelolaan logistik untuk korban bencana”. Sebaliknya, responden yang tinggal di lokasi sedang dan jauh dari pantai menyatakan berbagai kegiatan tersebut tidak ada (Diagram 5.8.). Hal ini kemungkinan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada masyarakat yang biasa dilakukan pada masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Apabila dikritisi lebih lanjut, data tersebut cenderung “bias” karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan rutin. Berbagai kegiatan tersebut memang pernah ada, tetapi pada waktu diadakan penelitian sudah tidak aktif lagi, misalnya kegiatan penyelamatan warga dan pengelolaan logistik untuk kebutuhan dasar korban, yang lebih berkaitan dengan kegiatan pada waktu terjadi gempa bumi pada tahun 2000. Selain itu, ceramah tentang penyebarluasan informasi pengetahuan bencana yang diselenggarakan oleh Pemkot Bengkulu pada tahun 2006, pernah dilakukan. Akan tetapi, hal itu merupakan cikal bakal yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan, seperti pelatihan evakuasi, pelatihan pengelolaan bantuan logistik bagi korban apabila dilakukan secara rutin akan sangat bermanfaat dalam kesiapsiagaan apabila terjadi bencana.

**Diagram 5.8. Distribusi Responden yang Menyatakan Terdapat Kegiatan Kebencanaan Menurut Zona, Kota Bengkulu, 2007 (%)**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007.

Keberadaan lembaga keagamaan, ekonomi, sosial maupun lembaga kesenian merupakan bentuk jaringan sosial dan sumber daya yang berpotensi menjadi elemen penting modal sosial. Hal itu dapat berfungsi optimal dan bermanfaat maksimal bagi warga masyarakat.

### 5.3. MODAL SOSIAL

Masyarakat memiliki potensi yang dapat membangkitkan solidaritas tolong-menolong dalam mengatasi permasalahan dan musibah yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Potensi tersebut merupakan modal sosial. Di sisi lain, masyarakat tidak mempunyai potensi tersebut, akan terjadi kerentanan. Modal sosial bisa ditemukan dalam unit-unit sosial di masyarakat, mulai dari yang paling kecil dan sederhana, seperti keluarga, rukun warga, atau jamaah pengajian, sampai yang paling besar dan kompleks, seperti kelembagaan maupun negara.

Menurut Coleman (1988) modal sosial adalah kumpulan tindakan, dan hubungan- hubungan untuk membangkitkan gerakan solidaritas. Modal sosial menurut Coleman adalah *inherently functional* dan apa saja yang memungkinkan seseorang atau institusi bertindak dengan menyediakan sumberdaya yang diperlukan. Sedangkan Putnam (1995) mengatakan bahwa modal sosial berkaitan dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dynes, R. Russell (2006) juga mengemukakan pentingnya kelembagaan sebagai modal sosial untuk merespon kejadian bencana. Sedangkan menurut Bourdieu (1983), kekuatan modal sosial bertumpu pada dua hal yaitu jaringan dan sumber daya. konsep modal sosial itu merujuk dua komponen penting. Pertama, jaringan sosial yang beroperasi di masyarakat yang memberi manfaat mutualistik bagi para warganya dan kedua, berbagai jenis sumber daya yang tersedia di masyarakat bersangkutan yang dapat didayagunakan bagi kepentingan publik.

Dalam kajian ini, modal sosial yang berkaitan dengan nilai indeks kerentanan terutama dilihat dari tiga aspek, yaitu kegotongroyongan atau kebiasaan warga untuk tolong-menolong apabila terjadi musibah, dan keberadaan kelembagaan serta partisipasi anggota rumah tangga dalam kelembagaan yang bersangkutan. Kebiasaan tolong menolong masyarakat di lokasi kajian dengan masyarakat dusun tetangga apabila mengalami musibah, lebih dari separuh di antara mereka menyatakan “selalu” mempunyai kebiasaan tersebut. Kebiasaan tolong-menolong dibedakan menurut wilayah atau zona yang berlokasi dekat pantai dan lokasi sedang dan jauh dari pantai, kurang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terdapat sedikit perbedaan frekuensi dan intensitas tolong-menolong pada zona dekat pantai, yaitu persentase responden yang menyatakan hanya “kadang kadang” melakukan kegiatan tolong-menolong dengan warga kampung tetangga bila terjadi musibah, lebih besar dibandingkan responden yang tinggal di lokasi sedang dan jauh dari pantai. Dengan kata lain, warga yang bertempat tinggal di dekat pantai memiliki intensitas kegiatan tolong-menolong yang relatif



lebih rendah dibandingkan dengan warga yang tinggal di lokasi sedang dan jauh dari pantai (Diagram 4.3). Dikaitkan dengan karakteristik sosial ekonomi, mayoritas penduduk yang berlokasi di dekat pantai adalah pendatang atau penduduk musiman dan mengontrak rumah-rumah petak yang cukup padat, dengan pekerjaan di sektor informal, di antaranya pemulung, pedagang kue keliling, pedagang jamu serta buruh bangunan, buruh angkut di pasar. Mereka adalah penduduk yang memiliki mobilitas lebih tinggi karena hanya mengontrak rumah, sehingga sewaktu-waktu bisa pindah. Sedangkan penduduk yang berlokasi di wilayah sedang dan jauh dari pantai adalah penduduk tetap dengan pekerjaan, di antaranya sebagai pegawai negeri, sehingga cenderung memiliki solidaritas sosial yang relatif lebih kuat. Warga yang tinggal di dekat pantai, memiliki solidaritas cukup kuat antarwarga di lingkungan mereka sendiri, akan tetapi solidaritas di luar lingkungan menjadi melemah. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua RT di lokasi tersebut, di antara mereka terdapat perkumpulan, yaitu Persatuan Amal Sosial (PAS) dengan iuran 2.000 rupiah tiap anggota per bulan, yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi warga yang mengalami musibah, seperti sakit dan meninggal. Kegiatan tersebut terbatas di lingkungan mereka sendiri sesama kaum pendatang.

Keberadaan kelembagaan dan partisipasi anggota rumah tangga yang tinggal di zona dekat dengan pantai, memperlihatkan partisipasi mereka yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan responden yang tinggal di zona berjarak sedang dan jauh dari pantai. Keadaan ini juga berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Kegiatan kelembagaan yang bersifat umum, seperti kelembagaan ekonomi dan sosial, berintensitas relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk di lokasi berjarak sedang dan jauh dari pantai, tetapi tidak demikian halnya dengan kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan. Diagram 4.7. menunjukkan responden yang tinggal di lokasi zona dekat pantai lebih banyak yang menyatakan terdapat berbagai kegiatan penyebaran informasi tentang bencana, pelatihan penyelamatan warga dan keluarga untuk menghadapi bencana alam

serta kegiatan pelatihan pengelolaan logistik. Kegiatan tersebut tidak intensif dan hanya pernah dilakukan, tetapi paling tidak telah memberikan wacana dan pengetahuan bagi warga.

Kegiatan gotong royong yang dilakukan antarwarga, merupakan cikal bakal tumbuhnya solidaritas sosial apabila terjadi musibah bencana alam, gempa bumi maupun tsunami. Masyarakat memiliki kondisi rentan dari segi kependudukan maupun ekonomi tetapi mempunyai modal sosial yang kuat, maka penanganan korban relatif akan lebih mudah. Pengalaman kasus bencana baik di Pangandaran, Yogyakarta, Aceh-Nias, dan Bengkulu menunjukkan pada masa awal terjadi bencana, pemerintah belum mampu terjun menagani bencana dan memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi, solidaritas warga terdekat dan bantuan yang berasal dari komponen masyarakat non-pemerintah telah membuktikan pentingnya modal sosial. Respon spontan dari masyarakat menunjukkan komunitas bangsa ini memiliki modal sosial yang sangat besar dan kuat.

Penguatan modal sosial di tingkat lokal maupun daerah sebagai fondasi pengurangan risiko terjadinya bencana, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dalam konteks hubungan antara masyarakat dan pemerintah karena modal sosial merupakan wujud jaringan kerja pada tingkat masyarakat. Hal itu berkaitan dengan manajemen berbasis masyarakat yang merupakan upaya meningkatkan kapasitas (modal sosial) masyarakat atau mengurangi kerentanan masyarakat.

# BAB VI

## PENUTUP

### 6.1. KERENTANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

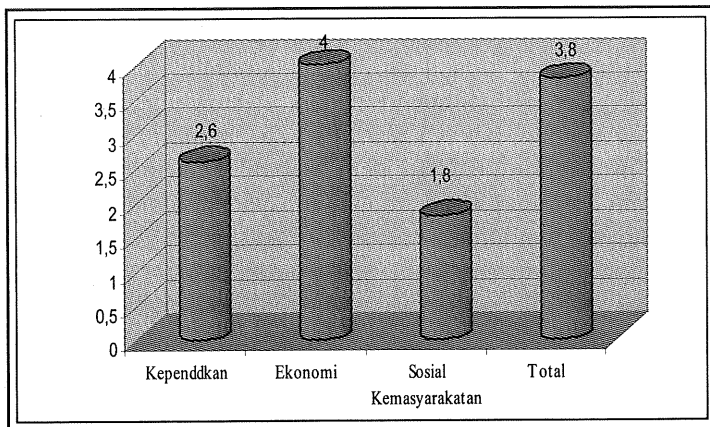
**K**erentanan sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang perlu diketahui yang berkaitan dengan pengurangan risiko apabila terjadi bencana alam. Suatu daerah mempunyai potensi terjadi ancaman bahaya (*hazards*) yang cukup tinggi, disertai kerentanan sosial ekonomi yang juga tinggi, maka daerah tersebut akan memiliki risiko terjadi korban yang cukup besar pula. Ancaman bahaya alam bersifat tetap karena merupakan bagian dari proses dan kejadian alam. Sebaliknya, tingkat kerentanan dapat dikurangi, sehingga kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman semakin meningkat.

Kerentanan sosial ekonomi masyarakat terdiri dari kerentanan kependudukan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga aspek kerentanan tersebut memberikan kontribusi terhadap kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Kerentanan kependudukan diukur berdasarkan jumlah penduduk usia balita dan lansia. Selanjutnya, kerentanan ekonomi dilihat dari pendapatan rumah tangga dan kerentanan sosial kemasyarakatan dikaji berdasarkan hubungan sosial, yaitu kebiasaan tolong-menolong antarwarga apabila terjadi musibah dan keberadaan kelembagaan serta partisipasi anggota rumah tangga dalam kelembagaan.

Tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat diukur dari besar kecilnya indeks kerentanan. Semakin tinggi nilai indeks akan semakin tinggi tingkat kerentanannya. Indeks kerentanan sosial ekonomi masyarakat terdiri dari kerentanan kependudukan, kerentanan ekonomi, dan kerentanan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan gabungan tiga komponen tersebut, nilai indeks kerentanan sosial-ekonomi masyarakat Kota Bengkulu adalah 3,8

dalam skala 0-5. Hal ini menggambarkan masyarakat di lokasi penelitian termasuk kategori **rentan**. Faktor utama yang berpengaruh adalah kondisi ekonomi rumah tangga yang memperbesar nilai indeks kerentanan ekonomi adalah 4, yang termasuk **kategori sangat rentan**. Sebaliknya, kondisi sosial-kemasyarakatan memperkecil nilai indeks, dengan nilai **1,8** yang termasuk **kategori tidak rentan**.

**Diagram 6.1. Tingkat Kerentanan Sosial-Ekonomi, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, 2007**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tanah Patah yang cenderung belum baik kemungkinan berkaitan dengan sumber mata pencaharian utama penduduk yang umumnya bekerja di sektor perdagangan dengan skala usaha sangat kecil, yaitu pedagang kaki lima dan pedagang keliling. Sedangkan mereka yang bekerja di sektor bangunan umumnya berstatus sebagai buruh/kernet. Hanya beberapa orang yang berstatus sebagai tukang dengan upah yang lebih tinggi daripada kernet. Akibatnya, penghasilan rumah tangga pada umumnya tergolong rendah, walaupun dalam satu rumah tangga kadang terdapat lebih dari satu orang yang bekerja. Lapangan

pekerjaan lain yang dilakukan oleh sebagian rumah tangga adalah sektor jasa perseorangan, seperti tukang cuci dan pembantu rumah tangga, dengan gaji/upah yang rendah. Sektor jasa kemasyarakatan hanya menyerap sebagian kecil rumah tangga. Realitas yang menunjukkan banyaknya rumah tangga bekerja di berbagai lapangan pekerjaan berupah/berpenghasilan rendah, menjadikan kebanyakan rumah tangga berada pada kondisi rentan karena beberapa faktor, antara lain (1) pendapatan rumah tangga kurang dari 600.000 rupiah/bulan yang mencapai sekitar 34 persen, (2) tidak berkesinambungan, dan (3) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar apalagi untuk modal ekonomi dalam kegiatan mitigasi bencana alam.

Indikator sosial-kemasyarakatan yang berkontribusi positif, dan yang memperkecil nilai indeks kerentanan, menunjukkan faktor kegotongroyongan, yaitu saling membantu dalam musibah, lebih berperan daripada faktor keberadaan dan partisipasi ART dalam kelembagaan sosial. Ciri individualistik bukan merupakan tipikal masyarakat di lokasi kajian meskipun mereka tinggal di wilayah perkotaan. Mereka masih memiliki kebiasaan untuk saling menolong dalam menghadapi musibah/kesulitan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Beberapa kelembagaan juga ditemukan, walaupun terdapat juga kelembagaan yang tidak beraktivitas secara rutin. Kelembagaan yang berkegiatan secara aktif adalah lembaga keagamaan dan ekonomi, termasuk arisan. Lembaga keagamaan berkegiatan yang terfokus pada kegiatan pengajian, tetapi juga kegiatan kesenian, seperti rebana. Kelembagaan ini melibatkan semua segmen masyarakat, yaitu perempuan, laki-laki, dari kalangan dewasa, remaja, dan anak-anak. Keberadaan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, yang sering diminta warga dalam mengatasi persoalan keseharian, memperkuat modal sosial di lingkungan masyarakat Kelurahan Tanah Patah. Kebanyakan responden juga berpendapat "sering dan selalu" saling membantu dalam mengatasi musibah dengan warga kampung tetangga. Tingginya kegiatan gotong royong merupakan faktor yang kondusif untuk meningkatkan kesadaran kolektif serta merupakan modal sosial dalam

mengembangkan sistem pengelolaan kebencanaan, termasuk gempa bumi dan tsunami, yang berbasis masyarakat.

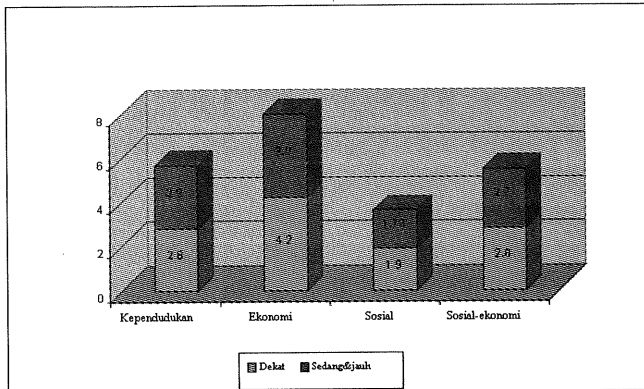
Aspek kependudukan yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kerentanan sosial-ekonomi, tampaknya tidak banyak mempengaruhi nilai indeks. Angka kerentanan kependudukan di lokasi penelitian, termasuk kategori **rentan**, dicirikan oleh proporsi ART balita yang relatif tinggi, yaitu 36,5 persen. Sedangkan beberapa rumah tangga juga mempunyai ART lansia (65 tahun ke atas), yaitu sekitar 10 persen. Besarnya struktur penduduk balita kemungkinan berkaitan dengan struktur umur penduduk yang masih berada pada usia produktif dan banyak keluarga muda, antara lain akibat migrasi masuk. Kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk rentan perlu diperhatikan agar daerah ini tidak jatuh pada kondisi rentan kependudukan. Keterkaitan antara kerentanan kependudukan, kerentanan ekonomi, dan sosial kemasyarakatan secara umum dapat dipahami sebagai kondisi yang karakteristik kependudukan dan ekonomi dalam posisi **rentan**, akan tetapi masyarakat mempunyai modal sosial yang cukup kuat. Kerentanan kependudukan berkaitan dengan proporsi ART balita yang relatif besar, dan juga berkaitan dengan kondisi kapasitas SDM (ART) di lokasi kajian yang tidak mempunyai keterampilan yang berkaitan dengan penanganan bencana, seperti pertolongan pertama, pembuatan peralatan untuk evakuasi, dan penyelamatan diri. Apabila terjadi bencana gempa bumi maupun tsunami, warga tidak dapat menolong diri sendiri. Kerentanan ekonomi juga menimbulkan ketergantungan warga terhadap bantuan dari luar dalam memenuhi kebutuhan dasar apabila terjadi bencana, tetapi warga mempunyai modal sosial untuk bekerjasama di dalam berbagai komunitas. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di berbagai bagian paling kecil dalam masyarakat. Apabila masyarakat mempunyai modal sosial, bantuan spontan bisa dikumpulkan dalam waktu singkat, bahkan sebelum pihak pemerintah turun tangan.

Indeks kerentanan sosial ekonomi antara penduduk yang bermukim di dekat pantai (<500 meter) dan daerah yang sedang dan

jauh dari pantai (500 meter atau lebih), perbedaannya tidak mencolok. Nilai indeks daerah yang dekat pantai adalah 2,8 dan wilayah yang lebih jauh adalah 2,7. Hanya indikator kependudukan yang tidak menunjukkan perbedaan antara kelompok penduduk yang tinggal dalam jarak yang dekat dengan pantai dan yang jauh dari pantai. Perbedaan indeks yang paling besar di antara penduduk yang tinggal di dua wilayah permukiman yang berbeda secara geografis tersebut ditemukan pada indikator ekonomi. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan karakteristik pekerjaan di antara mereka. Mayoritas penduduk yang tinggal dekat pantai bekerja di sektor informal yang memberikan penghasilan dalam jumlah tidak menentu. Sebagian penduduk yang tinggal lebih jauh dari pantai juga ada yang bekerja di sektor informal, namun proporsinya lebih sedikit daripada mereka yang bekerja di sektor formal, seperti pegawai di instansi pemerintah.

Indikator sosial kemasyarakatan menunjukkan penduduk yang tinggal di dekat pantai mempunyai indeks kerentanan yang lebih tinggi daripada mereka yang tinggal jauh dari pantai. Hal ini berarti tingkat kerentanan sosial kemasyarakatan penduduk yang tinggal dekat pantai lebih tinggi karena daerah dekat pantai dihuni penduduk yang hidup berkelompok dan cenderung berasal dari satu sukubangsa dan lebih homogen. Di samping itu, mayoritas penduduk yang tinggal dekat pantai adalah pendatang dan penduduk non-permanen yang tinggal di rumah-rumah petak dengan cara mengontrak dan tidak menetap dalam waktu lama, sehingga kurang membangun kegotongroyongan, terutama dengan orang-orang dari suku yang berbeda. Sedangkan daerah yang jauh dari pantai relatif lebih heterogen, dihuni oleh penduduk dari berbagai sukubangsa serta penduduk permanen, dan mereka dapat membangun kegotongroyongan. Dengan demikian struktur sosial masyarakat berpengaruh terhadap hubungan kemasyarakatan, termasuk kegotongroyongan.

**Diagram 6.2. Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Menurut Kedekatan dengan Pantai, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, 2007**



Sumber: Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, LIPI, 2007

## 6.2. KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat kerentanan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap risiko bencana, karena risiko bencana akan terjadi bila bertemu dengan "kondisi yang rentan". Kota Bengkulu sebagai daerah yang berpotensi terjadi gempa bumi maupun tsunami, merupakan bagian dari peristiwa alam yang tidak dapat dihindari. Upaya untuk mengurangi risiko terjadinya korban dilakukan di antaranya mengurangi tingkat kerentanan. Kebijakan daerah berkaitan dengan penanganan bencana harus mengarah pada pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas, sehingga akan memperkecil risiko korban bencana. Ketiga kata kunci tersebut dapat diimplementasikan dalam setiap sektor kegiatan. Semua aktivitas pembangunan di Kota Bengkulu harus mengarah pada paradigma pengurangan risiko bencana.

Kota Bengkulu yang berpotensi terjadi bencana gempa bumi dan tsunami, juga mempunyai kerentanan kependudukan di lokasi



kajian yang **rentan**. Hal ini berkaitan dengan proporsi jumlah balita yang relatif besar. Balita merupakan segmen penduduk yang memerlukan bantuan dan penanganan khusus apabila terjadi bencana, dan juga penduduk lansia. Kapasitas SDM di lokasi kajian masih kurang dalam menangani kebencanaan, seperti keterampilan pertolongan pertama, evakuasi, dan pengolahan air bersih. Apabila terjadi bencana penduduk cenderung akan tergantung pada bantuan pihak luar. Kebijakan pendidikan publik berkaitan dengan kesiapsiagaan mengantisipasi terjadinya bencana, termasuk berbagai pelatihan, perlu digalakkan kembali secara proaktif, terutama di berbagai daerah rentan gempa bumi maupun tsunami.

Kota Bengkulu dilihat dari segi kerentanan ekonomi termasuk dalam kategori **sangat rentan**. Keadaan ini memerlukan pemberdayaan melalui peningkatan *income generating* misalnya pembinaan usaha kecil, peningkatan keterampilan, dan pemberian akses permodalan. Dengan demikian, skala usaha diharapkan dapat meningkat, dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Kerentanan sosial kemasyarakatan yang termasuk dalam kategori **tidak rentan**, merupakan modal sosial yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Implementasi berbagai program perlu memperhatikan kondisi masyarakat dan juga keberadaan elemen masyarakat yang potensial, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun struktur sosial masyarakat yang bersangkutan menurut komposisi etnis, pendidikan, dan mata pencaharian. Hubungan kemasyarakatan dalam bentuk kerjasama atau gotong royong pada masyarakat sekitar, perlu dipahami agar setiap proses kebijakan dapat dilakukan dengan modal yang tersedia dalam masyarakat dan mengikuti prinsip-prinsip hubungan sosial yang sudah ada. Kelembagaan Satkorlak yang sudah dibentuk beserta Prosedur Tetap (Protap) harus dioptimalkan sesuai dengan kapasitas dan modal sosial di Kota Bengkulu yang cukup besar, seperti tingkat pendidikan penduduk yang relatif tinggi, keberadaan berbagai kelembagaan dan perguruan tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Bengkulu. 2007. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin di Kota Bengkulu Tahun 2006*. Bengkulu: BKKBN Kota Bengkulu.
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas-PB). 2006. "Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah". <http://www.perba.ristek.go.id/str/Pedoman%20Penyusunan%20Rencana%20Penanganan%20Bencana%20di%20Daerah.PDF>.
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). 2007. "Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia". <http://72.14.235.104/search?q=cache:inydcdTCZFEJ:www.bakornaspb.go.id/new/id/docu>.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu. 2006. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu: Laporan Akhir Tahun Anggaran 2005*. Bengkulu: Bappeda Kota Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Bengkulu*. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, Seri L2.2.7.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Data dan Informasi Kemiskinan*. Buku 2: Kabupaten. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu. 2006. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu 2000-2005*. Bengkulu: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu dan Bappeda Kota Bengkulu. 2006. *Bengkulu dalam Angka*. Bengkulu: BPS.

- Badan Pusat Statistik. 2004. *Peta Penduduk Miskin Indonesia 2004*. Jakarta: BPS.
- Bourdieu, P. 1983. "Forms of Capital". in J. C. Richards (ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press  
[http://www.infed.org/biblio/social\\_capital.htm](http://www.infed.org/biblio/social_capital.htm).
- Coleman, J. C. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology*. 94: S95-S120.  
[http://www.infed.org/biblio/social\\_capital.htm](http://www.infed.org/biblio/social_capital.htm).
- Cordina, Gordon. 2004. "Economic Vulnerability and Economic Growth: Some Results from Neo-classical Growth Modelling Approach". *Journal of Economic Development*. Vol 29 (2).
- Departemen Pekerjaan Umum. *Profil Kabupaten/Kota Bengkulu*.  
<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/rofil/barat/bengkulu/bengkulu.pdf>.  
download 7/2/2007.
- Departemen Sosial, Badan Pusat Statistik, PT Pos dan BRI. 2005. *Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Langsung Tunai Bagi Rumah Tangga Miskin Dalam Rangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak*. Jakarta: Depsos.
- Dwyer, dkk. 2004. "Quantifying Social Vulnerability. A Methodology for Identifying those at Risk to Natural Hazards".  
[http://72.14.205/104/search?q=cache:Gaukqir2vLYJ:www.ga.gov.ua/image\\_cache/GA426](http://72.14.205/104/search?q=cache:Gaukqir2vLYJ:www.ga.gov.ua/image_cache/GA426), download 13/2/2007
- Dynes, Russell R. 2006. "Social Capital: Dealing With Community Emergencies, Homeland Security Affairs"., Vol. II, No. 2 (July 2006). <http://www.hsaj.org/pages/volume2/issue2/pdf5/2.2.5.pdf>.
- Hidayati, Deny. dkk. 2006. "Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia". *Laporan Penelitian, Kerjasama LIPI UNESCO, dan ISDR*.

[http://www.nakertrans.go.id/statistik\\_trans/Data%20TRANSMIGRAN/Kolonial.php](http://www.nakertrans.go.id/statistik_trans/Data%20TRANSMIGRAN/Kolonial.php). "Penempatan Transmigrasi Selama Masa Kolonial Tahun 1905 s/d 1942", *download* 12/11/2005.

<http://72.14.205.104/search?q=cache:acrN0YKAXHEJ:www.sidsnet.org/docshare/other/2...> "Building Resilience to Social Vulnerability. A SIDS Perspective", *download* 13/2/2007

<http://www.transparansi.or.id/otoda/sumber.html>. "Masyarakat Transparansi Indonesia, 1999".

Kalaycioglu, S; H. Rittersberger; K Celik, dan F.Gunes. 2006. "Integrated Natural Disaster Risk Assessment: the Socio-economic Dimension of Earthquake Risk in Urban Area". *Power point* dipresentasikan dalam *Konferensi Geohazards-Technical, Economical and Social Risk Evaluation*. di Lillehammer-Norwegia, 18-21 Juni 2006.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2006. *Lansia Korban Bencana Kurang Diperhatikan*. <http://www.menkokesra.go.id/content/view/2188/1/>, *download* 26/7/2007.

*Kompas*, 2006, 15 Febuari. "Festival Tabot Di Bengkulu hanya Untuk Konsumsi Lokal".

Pemerintah Kota Bengkulu, Kecamatan Ratu Agung, 2007. *Laporan Bulanan Penduduk Bulan April 2007*.

Pusat Data dan Analisa Tempo. 2006. "Indonesia Rawan Bencana". [http://www.pdat.co.idhg/political\\_pdat/2006/06/19/pol,20060619-01,id.html](http://www.pdat.co.idhg/political_pdat/2006/06/19/pol,20060619-01,id.html).

Putnam, R. D. 1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy* 6:1, Jan, 65-78. [http://muse.jhu.edu/demo/journal\\_of\\_democracy/v006/putnam.html](http://muse.jhu.edu/demo/journal_of_democracy/v006/putnam.html).

- Sadisun, Imam A. "SMART SOP Dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam". [http://www.sadisun/enngeol.org/pdf/2007\\_paper-SOP-Bencana\\_Bapeda.pdf](http://www.sadisun/enngeol.org/pdf/2007_paper-SOP-Bencana_Bapeda.pdf).
- Sobirin. 2007. "Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat". *Ayodya*, Edisi I. Yogyakarta: Pemkot Yogyakarta. <http://www.yogya.go.id/ayodya/manajemenmei07.asp>. *download* 27/6/2007.
- Sutrisno, Ramadhani. "Provinsi Bengkulu". [http://students.ukdw.ac.id/~22012558/kota\\_bengkulu.htm](http://students.ukdw.ac.id/~22012558/kota_bengkulu.htm).
- Syahwir, Coki H. 2005. "Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa". *Pikiran Rakyat*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/18/0801.htm>.
- Tempo, Pusat Data dan Analisis. 2006. "Indonesia Rawan Bencana". [http://www.pdat.co.id/hg/political\\_pdat/2006/06/19/pol,20060619-01.id.html](http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2006/06/19/pol,20060619-01.id.html).
- Masyarakat Penanggulangan Bencana (MPBI). "Kerangka Kerja Aksi Hyogo, 2005-2015". <http://www.mpbi.org/pustaka/files/file4416c8efc617e.pdf>.
- Tim Peneliti PPK-LIPI. 2006. *Penduduk dan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur*. Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).
- Walhi Kota Bengkulu. 2006. "Hutan Pantai Sabuk Pengaman Kota Bengkulu dari Bencana". [http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070327\\_pantai\\_bengkulu\\_li/](http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070327_pantai_bengkulu_li/). *download* 25/7/2007.
- Wikipedia*. Tahun atau *download*???. "Social Vulnerability". [http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_Vulnerability](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Vulnerability).
- Wisner. 2001. "Notes on Social Vulnerability: Categories, Situations, and Circumstances". <http://www.radixonline.org/resources/vulnerability-aag2001/rtf>, *download* 13/2/2007.

## LAMPIRAN

**Lampiran Tabel 1. Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera, Kota Bengkulu, 2006**

Kecamatan	Jml KK	Tahapan Keluarga Sejahtera				
		Pra-KS	KS I	KS II	KS III	KS III+
Gading Cempaka	13.943	459	2.771	2.931	5.863	1.919
Ratu Agung	8.638	512	2.353	2.792	2.141	840
Ratu Samban	4.627	424	1.366	1.428	1.018	391
Teluk Segara	5.124	564	1.173	1.700	1.492	195
Sungai Serut	4.140	375	945	1.298	1.360	162
Selebar	6.773	599	1.427	2.579	1.951	172
Kp. Melayu	5.275	967	1.684	1.774	754	96
Muara Bangkahulu	5.544	278	787	2.125	2.170	184
<b>Kota Bengkulu</b>	<b>54.064</b>	<b>4.178</b>	<b>12.551</b>	<b>16.627</b>	<b>16.749</b>	<b>3.959</b>

Sumber: BKKBN Kota Bengkulu, 2007

**Lampiran Tabel 2. Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera, Kota Bengkulu, 2006**

Kelurahan	Jml KK	Tahapan Keluarga Sejahtera				
		Pra-KS	KS I	KS II	KS III	KS III+
Kebun Tebeng	881	131	177	183	315	75
Nusa Indah	929	27	162	348	258	134
Kuala Lempuing	921	74	273	296	258	20
Tanah Patah	1.170	0	309	415	256	190
Kebun Beler	732	0	494	165	62	11
Sawah Lebar Baru	1.336	280	237	232	475	112
Sawah Lebar Lama	1.473	0	394	613	298	168
Kebun Kenanga	1.196	0	307	540	219	130
<b>Kec. Ratu Agung</b>	<b>8.638</b>	<b>512</b>	<b>2.352</b>	<b>2.792</b>	<b>2.141</b>	<b>840</b>

Sumber: BKKBN Kota Bengkulu, 2007

